

**Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II dan
entitas anaknya/*and its subsidiaries***

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen/
*Consolidated financial statements
as of December 31, 2017 and for the year then ended
with independent auditors' report*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2017
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	4-5	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	8-180	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA**

**DIRECTOR'S STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama/*Name*
Alamat kantor/*Office address*

Alamat domisili/*sesuai KTP atau kartu identitas lain/Residential address/in accordance with personal identity card*
Nomor telepon/*Telephone number*
Jabatan/*Title*
2. Nama/*Name*
Alamat kantor/*Office address*

Alamat domisili/*sesuai KTP atau kartu identitas lain/Residential address/in accordance with personal identity card*
Nomor telepon/*Telephone number*
Jabatan/*Title*

- : Elyn G. Masassya
: Pelabuhan Indonesia II
: Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok,
: Jakarta 14310, Indonesia
: Jl. Pondok Jaya V/4 C RT 005/003,
: Mampang Prapatan
: Jakarta, Indonesia
: 61-21-4301080
: Direktur Utama/*President Director*
- : Iman Rachman
: Pelabuhan Indonesia II
: Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok,
: Jakarta 14310, Indonesia
: Jl. Taman Wijaya Kusuma III/3.A RT 005/002
: Cilandak
: Jakarta, Indonesia
: 61-21-4301080
: Direktur/*Director*

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

1. *I responsible for the preparation and presentation of the Company's consolidated financial statements as of December 31, 2017 and for the year then ended.*
2. *The Company's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Company's consolidated financial statements, and*
b. *The Company's consolidated financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.*
4. *I am responsible for the Company's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 21 Februari 2018 / February 21, 2018


METERAI TEMPEL
9385EAEF547571956
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Elyn G. Masassya
Direktur Utama/*President Director*

Iman Rachman
Direktur/*Director*



Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-5826/PSS/2018

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-5826/PSS/2018

The Shareholder and the Board of Commissioners and Board of Directors Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2017, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. RPC-5826/PSS/2018 (lanjutan)

Report No. RPC-5826/PSS/2018 (continued)

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, in making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. RPC-5826/PSS/2018 (lanjutan)

Report No. RPC-5826/PSS/2018 (continued)

Opini

Opinion

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II and its subsidiaries as of December 31, 2017, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Muhammad Kurniawan

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0240/*Public Accountant Registration No. AP.0240*

21 Februari 2018/*February 21, 2018*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2017
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	Catatan/ Notes	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	14.207.330.332	2c,2d,2f,2u,4 40,41,42,43	14.467.875.678	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	6.999.082.698	2c,2d,2f,2u 2c,2g,2u 6,41,42,43	4.787.160.000	Short-term investments
Piutang usaha - neto				Trade receivables - net
Pihak ketiga	549.154.117		404.004.378	Third parties
Pihak berelasi	149.599.560	2d,40	80.267.487	Related parties
Piutang lain-lain - neto				Other receivables - net
Pihak ketiga	49.765.763	2g,2u,7,42,43	31.679.063	Third parties
Pihak berelasi	738.312.346	2d,40	108.443.481	Related parties
Uang muka dan beban dibayar di muka	144.176.602	2i,8 2c,2u,9 41,42,43	153.791.098	Advances and prepaid expenses
Pendapatan masih akan diterima				Accrued revenues
Pihak ketiga	303.926.301		201.554.511	Third parties
Pihak berelasi	26.573.499	2d,40	63.312.642	Related parties
Persediaan	56.480.952	2h,10	49.241.502	Inventories
Pajak dibayar di muka	557.236.979	2s,21a	432.913.175	Prepaid taxes
Total Aset Lancar	23.781.639.149		20.780.243.015	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Investasi pada entitas asosiasi	1.554.888.854	2j,11	1.619.970.587	Investment in associates
Properti investasi - neto	394.342.020	2k,12	415.822.791	Investment properties - net
Aset tetap - neto	11.325.850.596	2l,13	10.436.641.420	Fixed assets - net
Aset kerjasama operasi - neto	507.560.396	2n,14	535.920.134	Joint operation assets - net
Aset pajak tangguhan	44.644.534	2s,21f	37.017.244	Deferred tax assets
Aset takberwujud - neto	8.296.435.366	2o,15	8.617.040.414	Intangible assets - net
Taksiran tagihan restitusi pajak	839.786.756	2s,21a	668.961.286	Estimated claims for tax refund
Aset lain-lain	474.940.688	2u,16,42,43	359.883.364	Other assets
Total Aset Tidak Lancar	23.438.449.210		22.691.257.240	Total Non-current Assets
TOTAL ASET	47.220.088.359		43.471.500.255	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2017
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	Catatan/ Notes	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha		2c,2u 17,41,42,43		Trade payables
Pihak ketiga	367.571.206		401.719.610	Third parties
Pihak berelasi	999.183.968	2d,40	944.037.756	Related parties
Pendapatan diterima di muka jangka pendek	778.706.786	2d,2q,18 24,40	457.410.169	Short-term unearned revenues
Utang pajak	441.919.999	2s,21b	195.577.132	Taxes payable
Beban akrual	2.168.022.495	2u,19,42,43	1.148.153.513	Accrued expenses
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang		2u,42,43		Current maturities of long-term liabilities
Utang bank	1.860.603	2c,22,41	1.724.970	Bank loans
Sewa pembiayaan	-	2m	635.202	Finance lease
Liabilitas jangka panjang lainnya - pihak berelasi	54.127.289	2c,25	63.047.890	Other long-term liabilities - related parties
Liabilitas jangka pendek lainnya		2u,20,42,43		Other current liabilities
Pihak ketiga	165.639.036		183.421.670	Third parties
Pihak berelasi	95.916.891	2d,40	96.993.402	Related parties
Total Liabilitas Jangka Pendek	5.072.948.273		3.492.721.314	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang obligasi	21.376.332.500	2c,2u,23	21.178.512.268	Bonds payable
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar		2u,42,43		Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	-	22,41	1.860.603	Bank loans
Liabilitas jangka panjang lainnya - pihak ketiga	219.299.877	2c,25	221.112.329	Other long-term liabilities - third party
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	4.496.181.101	2q,24	4.754.664.509	Long-term unearned revenue
Liabilitas imbalan kerja	1.806.109.326	2t,26	1.554.159.311	Employee benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	301.299.484	2s,21f	356.873.980	Deferred tax liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	28.199.222.288		28.067.183.000	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	33.272.170.561		31.559.904.314	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2017
(Expressed in Thousands Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	Catatan/ Notes	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES AND EQUITY (continued)
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham				Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share
Modal dasar - 4.000.000 saham				Authorized capital - 4,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.444.029 saham	1.444.029.000	27	1.444.029.000	Issued and fully paid - 1,444,029 shares
Modal donasi	26.825.982	28	26.825.982	Donated capital
Tambahan modal disetor	(317.597.475)	2e,32	(317.597.475)	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	10.211.254.134		9.153.232.292	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	2.084.013.986		1.415.580.254	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	(72.365.832)	1e,31	53.674.364	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto	13.376.159.795		11.775.744.417	Equity attributable to owners of the parent entity - net
Kepentingan nonpengendali	571.758.003	2b,29	135.851.524	Non-controlling interests
Ekuitas - neto	13.947.917.798		11.911.595.941	Equity - net
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	47.220.088.359		43.471.500.255	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2017
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2017	Catatan/ Notes	2016	
Pendapatan operasi	10.913.967.400	2r,33	8.926.064.770	Operating revenues
Pendapatan konstruksi	319.744.293	2r,34	1.392.135.798	Construction revenues
Beban operasi	(7.656.306.865)	2r,35	(6.411.461.985)	Operating expenses
Beban konstruksi	(319.744.293)	2r,34	(1.392.135.798)	Construction expenses
Pendapatan operasi lainnya - neto	11.410.021	2r,36	208.659.785	Other operating income - net
LABA USAHA	3.269.070.556		2.723.262.570	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	534.789.328	2r,37	287.625.782	Finance income
Beban keuangan	(1.064.136.560)	2r,38	(1.043.385.641)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi	79.081.852	2j,2n,39	72.794.376	Equity in income of associates
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	2.818.805.176		2.040.297.087	INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX
Beban pajak final	(345.222.944)	21d	(253.178.548)	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	2.473.582.232		1.787.118.539	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN				CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	(291.831.888)	2s 21e	(237.965.664)	Current
Tangguhan	23.976.675	21f	(11.938.104)	Deferred
LABA TAHUN BERJALAN	2.205.727.019		1.537.214.771	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(159.232.831)	2t,31	(179.146.070)	Remeasurements of defined benefit plans
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	23.609.863	1e,31	(3.987.667)	Exchange differences due to financial statements translation
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	8.946.393	2f,31	-	Changes in fair value of available-for-sale financial assets
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.079.050.444		1.354.081.034	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended December 31, 2017
(Expressed in Thousands Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2017	Catatan/ Notes	2016	
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	2.179.893.506		1.511.459.775	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	25.833.513	2b,29	25.754.996	Non-controlling interests
LABA TAHUN BERJALAN	2.205.727.019		1.537.214.771	INCOME FOR THE YEAR
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	2.053.853.310		1.328.907.682	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	25.197.134	2b,29	25.173.352	Non-controlling interests
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.079.050.444		1.354.081.034	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	1.509.591	2v	1.046.696	BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017
 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
 For the Year Ended December 31, 2017
 (Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Equity attributable to owners of the parent entity

Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Modal donasi/ Donation capital	Tambahkan modal disetor/ Additional paid- in capital	Saldo laba/Retained earnings		Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income			Neto/ Net	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Ekuitas - neto/ Equity - net	
				Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Exchange difference due to financial statement translation	Pengukuran kembali program imbalan pasti/ Remeasurements of defined benefit plans	Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual/ Changes in fair value of available for-sale financial assets				
Saldo per 31 Desember 2015	1.444.029.000	26.825.982	(317.597.475)	8.196.831.000	1.232.455.771	372.230.129	(136.003.672)	-	10.818.770.735	128.625.369	10.947.396.104	Balance as of December 31, 2015
Pembagian dividen kas	30	-	-	-	(371.934.000)	-	-	-	(371.934.000)	(17.947.197)	(389.881.197)	Distribution of cash dividend
Cadangan umum	30	-	-	956.401.292	(956.401.292)	-	-	-	-	-	-	General reserve
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	1e	-	-	-	-	(3.987.985)	-	-	(3.987.985)	318	(3.987.667)	Exchange difference due to financial statements translation
Pengukuran kembali program imbalan pasti	1e,31	-	-	-	-	-	(178.564.108)	-	(178.564.108)	(581.962)	(179.146.070)	Remeasurements of defined benefit plans
Laba tahun berjalan		-	-	-	1.511.459.775	-	-	-	1.511.459.775	25.754.996	1.537.214.771	Income for the year
Saldo per 31 Desember 2016	1.444.029.000	26.825.982	(317.597.475)	9.153.232.292	1.415.580.254	368.242.144	(314.567.780)	-	11.775.744.417	135.851.524	11.911.595.941	Balance as of December 31, 2016
Pembagian dividen kas	30	-	-	-	(453.437.932)	-	-	-	(453.437.932)	-	(453.437.932)	Distribution of cash dividend
Cadangan umum	30	-	-	1.058.021.842	(1.058.021.842)	-	-	-	-	-	-	General reserve
Setoran modal pada entitas anak		-	-	-	-	-	-	-	-	410.709.345	410.709.345	Paid in capital for a subsidiary
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	1e	-	-	-	-	23.609.580	-	-	23.609.580	283	23.609.863	Exchange difference due to financial statements translation
Pengukuran kembali program imbalan pasti	1e,31	-	-	-	-	-	(158.595.274)	-	(158.595.274)	(637.557)	(159.232.831)	Remeasurements of defined benefit plans
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	1e,31	-	-	-	-	-	-	8.945.498	8.945.498	895	8.946.393	Changes in fair value of available-for-sale financial assets
Laba tahun berjalan		-	-	-	2.179.893.506	-	-	-	2.179.893.506	25.833.513	2.205.727.019	Income for the year
Saldo per 31 Desember 2017	1.444.029.000	26.825.982	(317.597.475)	10.211.254.134	2.084.013.986	391.851.724	(473.163.054)	8.945.498	13.376.159.795	571.758.003	13.947.917.798	Balance as of December 31, 2017

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2017
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,				
	2017	Catatan/ Notes	2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	9.545.892.387		8.512.075.301	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(4.316.101.188)		(4.118.471.372)	Payment to contractors, suppliers and others
Pembayaran kepada karyawan	(2.245.546.714)		(1.833.435.900)	Payment to employees
Pembayaran pajak penghasilan	(391.972.308)		(141.735.373)	Payment for income taxes
Penghasilan bunga	439.649.013		243.908.383	Interest received
Pembayaran beban bunga dan keuangan lainnya	(984.317.563)		(960.401.313)	Payment of interest and other financial charges
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.047.603.627		1.701.939.726	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dividen	130.367.400		193.335.930	Receipt of dividend
Perolehan aset tetap dan aset takberwujud	(775.034.171)		(2.125.974.262)	Acquisition of fixed assets and intangible assets
Penempatan investasi jangka pendek	(2.011.922.698)	5	(1.727.260.000)	Placement of short-term investments
Penerimaan sewa di muka	308.934.500		526.670.000	Receipt of advance rental fee
Penempatan deposito jangka panjang	-	16	(200.000.000)	Placement in long-term deposits
Investasi pada penyertaan saham	449.500.127		154.264.311	Investment in shares of stock
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.898.154.842)		(3.178.964.021)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	(2.360.172)	22	(1.626.360)	Payment of bank loans and other financial institution
Pembayaran dividen	(453.437.932)	30	(371.934.000)	Payment of dividend
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(455.798.104)		(373.560.360)	Net Cash Used in Financing Activities
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	45.803.973		(91.353.568)	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(260.545.346)		(1.941.938.223)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	14.467.875.678	4	16.409.813.901	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	14.207.330.332	4	14.467.875.678	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Perusahaan" atau "PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)") pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 15 Tahun 1983 juncto PP No. 5 Tahun 1985. Perum Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 03 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., tanggal 2 Agustus 2013 mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-38219 tanggal 12 September 2013.

Berdasarkan Akta No. 03 tersebut di atas, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000 yang berasal dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada PT Pengerukan Indonesia dalam rangka restrukturisasi PT Pengerukan Indonesia.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp1.017.611.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("the Company" or "PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)") was initially established as Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II based on Government Regulation No. 15 of 1983 as amended by Government Regulation No. 5 of 1985. It was a State-Owned Enterprise ("SOE") under the supervision of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Based on Government Regulation No. 57 Year 1991, the legal entity of Perum Pelabuhan II was changed into a State Owned Company (Persero). As result of such government regulation, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established based on Notarial Deed No. 3 of Imas Fatimah, S.H., dated December 1, 1992. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 dated June 17, 1993. Since the establishment of the Ministry of State-Owned Enterprise ("MOSOE"), the Company has been under the supervision of MOSOE. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Shareholders Decision Statement notarized by Notarial Deed No. 03 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 2, 2013 regarding the Company's additional share capital issued and fully paid share capital. This amendment was registered to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Acceptance Letter No. AHU-AH.01.10-38219 dated September 12, 2013.

Based on the Notarial Deed No. 03 as stated above, the Government of the Republic of Indonesia which in this case represented by the Minister of SOEs increased its investment in the Company amounting to Rp426,418,000 which was derived from the transfer of the entire share capital owned by the Republic of Indonesia in PT Pengerukan Indonesia for restructuring of PT Pengerukan Indonesia.

With the additional paid-in capital of the Republic of Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company's increased from Rp1,017,611,000 to Rp1,444,029,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Selain lingkup usaha tersebut di atas Perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan.

Saat ini, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Kelompok Usaha") bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, logistik, jasa informasi teknologi, jasa rumah sakit, jasa pengerukan, jasa kepelatihan dan lainnya.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan mengelola 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan yang terdiri dari:

Cabang Pelabuhan Utama	Tanjung Priok, Banten dan/and Panjang	Main Port Branch
Cabang Pelabuhan Madya	Teluk Bayur, Pontianak, Palembang, Bengkulu, Jambi dan/and Cirebon	Medium Port Branches
Cabang Pelabuhan Pratama	Pangkal Balam, Sunda Kelapa dan/and Tanjung Pandan	Small Port Branches

Berikut adalah izin-izin penting yang diperoleh Perusahaan sehubungan dengan operasional pelabuhan:

- Keputusan Menteri Perhubungan No. 98 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The Company's purposes and objectives are managing and operating port services and optimizing resource utilization owned by the Company to produce competitive and high quality goods and/or services to gain profits in order to increase the Company's value by applying the limited liability company principles.

Other than the above-mentioned scope of activities, the Company may establish and manage other businesses related to port business.

Currently, the Company and its subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Group") are involved in several businesses consisting of port services, logistic, information technology services, hospital services, dredging services, training services and others.

The Company's head office is located at Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

The Company's parent and ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

The Company manages 12 (twelve) Port Branches as follows:

The following are significant permits obtained by the Company in relation to port operations:

- *Decision of Minister of Transportation No. 98 Tahun 2011 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as Port Operation Entity.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

- Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1121 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.
- Perjanjian konsesi (Catatan 44a dan 45m).

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut:

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Tahun pendirian/ Year of establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
					2017	2016
<u>Kepemilikan Langsung/Direct Ownership</u>						
PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTP")	Jakarta	Terminal Petikemas dan Konvensional/ Container and multicargo Terminal	2013	99,99%	1.341.475.724	1.300.648.208
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia ("PPI")	Jakarta	Pengembangan Pelabuhan/ Port Development	2012	99,99%	1.677.063.640	999.799.869
PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")	Jakarta	Jasa Logistik/ Logistic Services	2002	99,00%	851.895.620	846.528.095
PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("JAI") ****)	Jakarta	Penyedia Jasa Transportasi Laut/ Ship Transportation Services Provider	2013	76,89%	1.455.285.673	624.411.300
PT Pengerukan Indonesia ("Rukindo")	Jakarta	Pengerukan Alur/ Dredging	1991	99,90%	395.455.609	362.365.520
PT Rumah Sakit Pelabuhan ("RSP")	Jakarta	Rumah Sakit/ Hospital	1999	99,77%	394.109.934	305.807.813
PT Indonesia Kendaraan Terminal ("IKT")	Jakarta	Terminal Kendaraan/ Car Terminal	2012	99,99%	335.622.282	264.961.265
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS")	Jakarta	Sistem Informasi/ Information System	2012	51,00%	177.002.587	160.081.388
PT Electronic Data Interchange Indonesia ("EDI")	Jakarta	Sistem Informasi/ Information System	1995	51,00%	156.514.721	148.362.833
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Jakarta	Penyedia Energi Listrik/ Electricity Provider	2012	55,00%	131.811.166	136.792.896
PT IPC Terminal Petikemas ("IPC TPK")	Jakarta	Terminal Petikemas dan Konvensional/ Container and multicargo Terminal	2013	99,99%	251.854.781	199.670.054

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

- Decision of Minister of Transportation No. KP 1121 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.
- Concession Agreement (Notes 44a and 45m).

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation

As of December 31, 2017 and 2016, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Tahun pendirian/ Year of establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	2017	2016
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI")	Jakarta	Jasa Peralatan Pelabuhan/ Port Equipment Services	2012	99,99%		96.908.940	97.995.907
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia ("PMLI")	Jakarta	Jasa Pelatihan dan Pendidikan Maritim dan Logistik / Maritime and Logistic training and education services	2013	99,99%		46.950.691	41.863.041
PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	Jakarta	Investasi pasar modal dan Konsultan bisnis/ Investment in stock exchange and business consultant	2017	99,99%		227.917.991	-

Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership

Dimiliki melalui/Owned through PPI

PT Akses Pelabuhan Indonesia ("API")	Jakarta	Penyertaan Saham pada proyek Jalan Tol/Investment in Toll and access Road Project	2014	98,01%		580.541.909	236.957.411
--------------------------------------	---------	---	------	--------	--	-------------	-------------

Entitas Asosiasi/Associate Entities

Dimiliki melalui/Owned through IPC TPK

PT New Priok Container Terminal One ("NPCT1") *)	Jakarta	Terminal Petikemas/ Container Terminal	2014	50,99%		3.945.894.744	3.373.557.860
--	---------	--	------	--------	--	---------------	---------------

Dimiliki melalui/Owned through API

PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP") (dahulu PT MTD CTP Express Way ("MTDX")) (Catatan 11/Note 11) **)	Jakarta	Operasi Jalan Tol/Toll Road Operation	2006	45,00%		1.771.559.735	965.684.175
---	---------	---------------------------------------	------	--------	--	---------------	-------------

PT Jakarta International Container Terminal ("JICT") (Catatan 45b/ Note 45b)	Jakarta	Terminal Petikemas/ Container Terminal	1999	48,90%		4.156.289.445	4.086.151.617
--	---------	--	------	--------	--	---------------	---------------

PT Terminal Petikemas Indonesia ("TPI")	Jakarta	Terminal Petikemas/ Container Terminal	2013	25,00%		135.742.777	140.075.492
---	---------	--	------	--------	--	-------------	-------------

Operasi Bersama/Joint Operation

Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja ("TPK Koja") (Catatan 45a/ Note 45a)	Jakarta	Terminal Petikemas/ Container Terminal	1994	54,91%		684.756.228	872.664.308
--	---------	--	------	--------	--	-------------	-------------

Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia ("MKO MTKI") (Catatan 45o/ Note 45o) ***)	Gresik	Terminal Kendaraan/ Car Terminal	2015	45,00%		3.032.952	792.545
--	--------	----------------------------------	------	--------	--	-----------	---------

*) Laporan keuangan NPCT1 tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan IPC TPK, karena IPC TPK tidak memiliki pengendalian atas NPCT1.

***) Pada bulan September 2015, API melakukan akuisisi 45% kepemilikan saham di CTP (dahulu MTDX) (Catatan 11).

****) Pada bulan April 2015, IKT membentuk manajemen kerjasama operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia dengan porsi pendanaan 45% (Catatan 45o).

*****) Pada bulan Desember 2017, JAI menerbitkan saham baru sebanyak 1.215.506.500 saham atau 23% dari modal ditempatkan dan disetor JAI setelah penawaran umum perdana saham JAI di Bursa Efek Indonesia.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

Tahun pendirian/ Year of establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
		2017	2016
		96.908.940	97.995.907
		46.950.691	41.863.041
		227.917.991	-
		580.541.909	236.957.411
		3.945.894.744	3.373.557.860
		1.771.559.735	965.684.175
		4.156.289.445	4.086.151.617
		135.742.777	140.075.492
		684.756.228	872.664.308
		3.032.952	792.545

*) The financial statements of NPCT1 is not consolidated into IPC TPK's financial statements, due to IPC TPK has no control over NPCT1.

***) On September 2015, API performed an acquisition of 45% share of ownership in CTP (formerly MTDX) (Note 11).

****) On April 2015, IKT establishing joint operation management Maspion Terminal Kendaraan Indonesia with funding portion of 45% (Note 45o).

*****) On December 2017, JAI issued new shares of 1,215,506,500 shares or 23% of JAI's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

EDII

EDII didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1995 dari Notaris Sulami Mustafa, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9572.HT.01.01.TH.95 tanggal 3 Agustus 1995.

Pada tanggal 31 Desember 2016, modal dasar EDII adalah sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 25.000.000 saham atau sebesar Rp25.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 51% atau sebanyak 12.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp12.750.000.
- PT Sisindokom Teknologi memiliki 49% atau sebanyak 12.250.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.250.000.

Saat ini, EDII bergerak dalam bidang penyediaan data informasi, transfer data, penjualan software dan pelayanan administrasi efek.

MTI

MTI didirikan berdasarkan Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 tanggal 15 Februari 2002. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 April 2002.

Modal dasar MTI sebesar Rp28.500.000 terdiri dari 57.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 34.629.439 saham atau sebesar Rp17.314.719.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

EDII

EDII was established based on Notarial Deed No. 1 dated June 1, 1995 of Sulami Mustafa, S.H and was approved by Minister of Justice in Decree No. C2-9572.HT.01.01.TH.95 dated August 3, 1995.

As of December 31, 2016, the authorized capital of EDII amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp25,000,000 composed of 25,000,000 shares with share ownership as follows:

- *The Company owns 51% or 12,750,000 shares amounting to Rp12,750,000.*
- *PT Sisindokom Teknologi owns 49% or 12,250,000 shares amounting to Rp12,250,000.*

Currently, EDII's activities consist of providing of information data, data transfer, software sales and securities administration services.

MTI

MTI was established based on Notarial Deed of Notary Herdimansyah Chaidirsyah, SH., No. 15 dated February 15, 2002. The establishment of MTI was approved by Minister of Justice and Human Rights in Decree No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal April 11, 2002.

The authorized capital of MTI amounted to Rp28,500,000 composed of 57,000,000 shares with par value of Rp500 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp17,314,719 composed of 34,629,439 shares.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

MTI (lanjutan)

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah:

- Perusahaan memiliki sebesar 99% atau sebanyak 34.283.150 saham dengan nilai nominal Rp17.141.575.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 1% atau sebanyak 346.289 saham dengan nilai nominal Rp173.144.

Saat ini, MTI bergerak dalam bidang jasa logistik.

RSP

RSP didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Nelly Elsy Tahamata, SH., No. 2 tanggal 1 Mei 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.11876.HT.01.01 tanggal 29 Juni 1999.

Modal dasar RSP sebesar Rp150.000.000 terdiri dari 150.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,52% atau sebanyak 37.452 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.452.000.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,48% atau sebanyak 180 saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.

Saat ini, RSP bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya.

IKT

IKT didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 November 2012 oleh Yulianti Irawati, SH., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

MTI (continued)

The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 99% or 34,283,150 shares with total amount of Rp17,141,575.
- Koperasi Pegawai Maritim owns 1% or 346,289 shares with total amount of Rp173,144.

Currently, MTI's activities are in logistic services.

RSP

RSP was established based on Establishment Notarial Deed of Notary Nelly Elsy Tahamata, S.H., No. 2 dated May 1, 1999 and has been approved by Minister of Justice of Republic Indonesia with the Decree No. C.11876.HT.01.01 dated June 29, 1999.

The authorized capital of RSP amounted to Rp150,000,000 composed of 150,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share.

The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.52% or 37,452 shares with total amount of Rp37,452,000.
- Koperasi Pegawai Maritim owns 0.48% or 180 shares with total amount of Rp180,000.

Currently, RSP activities are in health services and other health support services.

IKT

IKT was established based on Notarial Deed No. 10 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, SH., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of IKT was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 dated November 19, 2012.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

IKT (lanjutan)

Modal dasar IKT sebesar Rp40.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 990.000 saham dengan nilai sebesar Rp9.900.000.
- MTI memiliki 1% atau sebanyak 10.000 saham dengan nilai sebesar Rp100.000.

Saat ini, IKT bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan, bongkar muat barang, pelayanan penumpukan dan pelayanan logistik lainnya.

ILCS

ILCS didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 21 September 2012 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 September 2012.

Modal dasar ILCS sebesar Rp400.000.000 terdiri dari 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 51% atau sebanyak 5.100.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp51.000.000.
- PT Multimedia Nusantara memiliki 49% atau sebanyak 4.900.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp49.000.000.

Saat ini, ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan *e-trade logistic* dan jasa lainnya yang meliputi jasa pengelolaan data, jasa *e-commerce*, konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, jasa pembuatan perangkat lunak, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi dan jasa konsultan teknologi informasi.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

IKT (continued)

The authorized capital of IKT amounted to Rp40,000,000 composed of 4,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99% or 990,000 shares with total amount of Rp9,900,000.
- MTI owns 1% or 10,000 shares with total amount of Rp100,000.

Currently, IKT's activities consist of car terminal management, stevedoring/cargodoring, yard operation and other logistic services.

ILCS

ILCS was established based on Notarial Deed No. 11 dated September 21, 2012 of Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., M.Kn. The establishment of ILCS was approved by Minister of Law and Human Rights No.AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 dated September 26, 2012.

The authorized capital of ILCS amounted to Rp400,000,000 composed of 40,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 51% or 5,100,000 shares with total amount of Rp51,000,000.
- PT Multimedia Nusantara owns 49% or 4,900,000 shares with total amount of Rp49,000,000.

Currently, ILCS' activities consist of providing *e-trade logistic services* and other services including data management, *e-commerce*, consultation on computing and informatics engineering services, software development services, multimedia provision and utilization through telecommunication hardware and consultation in information technology services.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PPI

PPI didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-57925.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Modal dasar PPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 2.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- MTI memiliki 1% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, PPI bergerak dalam bidang pengembangan pelabuhan.

JPPI

JPPI didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-57978.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Modal dasar JPPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 2.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- MTI memiliki 1% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PPI

PPI was established based on Notarial Deed No. 9 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU-57925.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 13, 2012.

The authorized capital of PPI amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company owns 99% or 2,475,000 shares with total amount of Rp24,750,000.*
- *MTI owns 1% or 25,000 shares with total amount of Rp250,000.*

Currently, PPI engages in port development.

JPPI

JPPI was established based on Notarial Deed No. 8 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU-57978.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 13, 2012.

The authorized capital of JPPI amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company owns 99% or 2,475,000 shares with total amount of Rp24,750,000.*
- *MTI owns 1% or 25,000 shares with total amount of Rp250,000.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JPPI (lanjutan)

Saat ini, JPPI bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan usaha teknik meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrikal dan mekanikal, bejana tekan (*boiler/pressure vessel*), serta bidang usaha terkait.

EPI

EPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-58019.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 14 November 2012.

Modal dasar EPI sebesar Rp600.000.000 terdiri dari 60.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 55% atau sebanyak 8.250.000 saham dengan nilai sebesar Rp82.500.000.
- PT Haleyora Power memiliki 45% atau sebanyak 6.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp67.500.000.

Saat ini, EPI bergerak dalam bidang penyedia pasokan energi listrik di wilayah pelabuhan dan sekitarnya.

Rukindo

Rukindo didirikan dengan nama PT Pengerukan Indonesia (Persero) berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 Oktober 1991 dari Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Notaris Imas Fatimah, S.H., yang kemudian diubah dengan Akta No. 51 tanggal 11 Februari 1992 dari Notaris Imas Fatimah, S.H. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 tanggal 3 Maret 1992.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JPPI (continued)

Currently, JPPI activities are in providing technical activities including installation, reparation and maintenance and installation of technical tools, installation of equipment for water, gas, telecommunication, electrical and mechanical and boiler/pressure vessel and the related activities.

EPI

EPI was established based on Notarial Deed No. 11 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU-58019.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 14, 2012.

The authorized capital of EPI amounted to Rp600,000,000 composed of 60,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 55% or 8,250,000 shares with total amount of Rp82,500,000.
- PT Haleyora Power owns 45% or 6,750,000 shares with total amount of Rp67,500,000.

Currently, EPI's activities consist of providing electrical supply on port areas.

Rukindo

Rukindo was established under the name of PT Pengerukan Indonesia (Persero) based on Deed No. 2 dated October 1, 1991 of Achmad Bajumi, S.H., a substitute of Notary Imas Fatimah, S.H., which was subsequently amended by Deed No. 51 dated February 11, 1992 of Notary Imas Fatimah, S.H. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 dated March 3, 1992.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Rukindo (lanjutan)

Modal dasar Rukindo sebesar Rp2.000.000.000 terdiri dari 2.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 47 tanggal 28 Desember 2017, para pemegang saham Perusahaan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula berjumlah Rp195.000.000 yang akan dikonversi menjadi modal pada akhir tahun ke-10 (sepuluh). Saham yang diterbitkan sejumlah 195.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 per saham.

Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 48 tanggal 28 Desember 2017 yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-AH.01.03-0007913 tanggal 10 Januari 2018, Perusahaan menerima 70.000 saham baru sebagai hasil konversi utang Rukindo kepada Perusahaan. Kepemilikan saham Perusahaan di Rukindo bertambah menjadi 99,93%.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,93% atau sebanyak 806.622 saham dengan nilai sebesar Rp806.622.000.
- PPI memiliki 0,07% atau sebanyak 542 saham dengan nilai sebesar Rp542.000.

Saat ini, Rukindo terutama bergerak dalam bidang pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan, reklamasi dan transportasi hasil keruk.

JAI

JAI didirikan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 10 Juli 2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 9 September 2013.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

Rukindo (continued)

The authorized capital of EPI amounted to Rp2,000,000,000 composed of 2,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Based on Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H., No. 47 dated December 28, 2017, the Company's shareholders approved the following matters:

- Increase in the issued and paid capital from Rp195,000,000 which will be converted into capital at the end of 10 (ten) year. The issued shares amounted 195,000 shares with a par value of Rp1,000,000 per share.

Based on Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H., No. 48 dated December 28, 2017, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No AHU-AH.01.03-0007913 dated January 10, 2018, the Company received 70,000 newly-issued shares as a result of the conversion of Rukindo's payable to the Company. The Company's shares ownership in Rukindo increased to 99.93%.

The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99.93% or 806,622 shares with total amount of Rp806,622,000.
- PPI owns 0.07% or 542 shares with total amount of Rp542,000.

Currently, Rukindo's main activities consist of dredging of sail navigation channel, port basin, reclamation and transportation of dredging products.

JAI

JAI was established based on Notarial Deed No. 24 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 9, 2013.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JAI (lanjutan)

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No. 14 tanggal 11 Oktober 2017 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham JAI menyetujui diantaranya:

- perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham menjadi Rp100 (nilai penuh) per saham.
- Pengeluaran saham dalam simpanan JAI, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 30% dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum selesai dilaksanakan atau sejumlah sebanyak-banyaknya 1.743.987.600 saham baru, yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham JAI.
- Meningkatkan modal dasar JAI dari sebesar Rp100.000.000 menjadi Rp1.500.000.000, yang terbagi atas 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp58.000.000 menjadi Rp406.930.460 dimana peningkatan sebesar Rp348.930.460 atau sebesar 3.489.304.600 saham dilakukan oleh Perusahaan melalui inbreng 21 unit kapal, terdiri dari 9 unit kapal pandu, 10 unit kapal tunda dan 2 unit kapal kepil. Inbreng kapal tersebut telah dilakukan penilaian oleh KJPP Toto Suharto & Rekan dengan hasil penilaian No. P.PP.17.00.0111 tanggal 9 Juni 2017.

Modal dasar JAI sebesar Rp1.500.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 76,89% atau sebanyak 4.063.504.600 saham dengan nilai sebesar Rp406.350.460.
- MTI memiliki 0,11% atau sebanyak 5.800.000 saham dengan nilai sebesar Rp580.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JAI (continued)

Based on Deed of Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company No. 14 dated October 11, 2017 of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta, JAI's shareholders agrees among others:

- change in par value of share from Rp1,000,000 (full amount) per share to Rp100 (full amount) per share.
- Issuance of shares in the JAI's savings, which represents new shares issued from the portfolio of as much as 30% of the issued and paid-up capital after the public offering has been completed or as much as 1,743,987,600 new shares, offered to the public through initial public offering.
- Increase of the authorized share capital of JAI from Rp100,000,000 to Rp1,500,000,000, divided into 15,000,000,000 shares at par value of Rp100 (full amount) per share and the increase of issued and paid-up capital from Rp58,000,000 to Rp406,930,460 whereby an increase of Rp348,930,460 or 3,489,304,600 shares was performed by the Company through injection of 21 units of vessels, consist of 9 units of pilotage vessels, 10 units of tug vessels and 2 units of mooring vessels. Injection of vessels has been appraised by KJPP Toto Suharto & Partners through appraisal report No. P.PP.17.00.0111 dated June 9, 2017.

The authorized capital of JAI amounted to Rp1,500,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp100 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 76.89% or 4,063,504,600 shares with total amount of Rp406,350,460.
- MTI owns 0.11% or 5,800,000 shares with total amount of Rp580,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

JAI (lanjutan)

- Karyawan (Program ESA) memiliki 0,14% atau sebanyak 7.162.700 saham dengan nilai sebesar Rp716.270.
- Masyarakat memiliki 22,86% atau sebanyak 1.208.343.800 saham dengan nilai sebesar Rp120.834.380.

Saat ini, JAI bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan kapal, penundaan kapal, angkutan laut, sungai, danau dan penyebrangan, penyewaan kapal dan keagenan kapal.

PMLI

PMLI didirikan berdasarkan Akta No. 26 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-45955.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 2 September 2013.

Modal dasar PMLI sebesar Rp120.000.000 terdiri dari 120.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 29.700 saham dengan nilai sebesar Rp29.700.000.
- MTI memiliki 1% atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.

Saat ini, PMLI bergerak dalam bidang penyediaan jasa pendidikan, pelatihan, konsultasi di bidang maritim dan logistik serta mengelola fasilitas dan infrastruktur pendidikan dan pelatihan.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

JAI (continued)

- Employees (ESA Programme) owns 0.14% or 7,162,700 shares with total amount of Rp716,270.
- Publics owns 22.86% or 1,208,343,800 shares with total amount of Rp120.834.380.

Currently, JAI's activities consist of pilotage and tug services, sea, river, lake and crossing transportation, ship rental and ship agencies.

PMLI

PMLI was established based on Notarial Deed No. 26 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of PMLI was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-45955.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 2, 2013.

The authorized capital of PMLI amounted to Rp120,000,000 composed of 120,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99% or 29,700 shares with total amount of Rp29,700,000.
- MTI owns 1% or 300 shares with total amount of Rp300,000.

Currently, PMLI's activities consist of providing educational, training services, consultation on maritime and logistic areas and also manage facilities and infrastructure of education and training.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PTP

PTP didirikan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

Modal dasar PTP sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- MTI memiliki 1% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, PTP bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas, jasa curah kering, curah cair, *bunkering* serta jasa pergudangan dan lapangan.

IPC TPK

IPC TPK didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-40641.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013.

Modal dasar IPC TPK sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- PT MTI memiliki 1% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

Saat ini, IPC TPK bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas dan jasa kepelabuhanan lainnya.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PTP

PTP was established based on Notarial Deed No. 27 dated July 10, 2013 of Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of PTP was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 dated August 1, 2013.

The authorized capital of PTP amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company owns 99% or 24,750 shares with total amount of Rp24,750,000.*
- *MTI owns 1% or 250 shares with total amount of Rp250,000.*

Currently, PTP's activities consist of container terminal services, dry bulk and liquid bulk services, bunkering and warehousing and field services.

IPC TPK

IPC TPK was established based on Notarial Deed No. 25 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of IPC TPK was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-40641.AH.01.01.Tahun 2013 dated July 25, 2013.

The authorized capital of IPC TPK amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- *The Company owns 99% or 24,750 shares with total amount of Rp24,750,000.*
- *PT MTI owns 1% or 250 shares with total amount of Rp250,000.*

Currently, IPC TPK's activities consist of container terminal services and other port services.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

API

API didirikan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 24 Juli 2014 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-19255.40.10.2014 tanggal 4 Agustus 2014. Anggaran Dasar API telah mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 26 Maret 2015 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0934117.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 27 April 2015.

Modal dasar API sebesar Rp350.000.000 yang terbagi atas 35.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PPI memiliki 99% atau sebanyak 8.910.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp89.100.000.
- PTP memiliki 1% atau sebanyak 90.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp900.000.

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 21 Desember 2017 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp1.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp386.000.000 yang diambil bagian oleh PPI dan PTP masing-masing sebesar Rp382.140.000 dan Rp3.860.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0027756.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 27 Desember 2017.

Saat ini, kegiatan API terutama terkonsentrasi pada investasi pada MTDX, entitas asosiasi yang bergerak dalam penyelenggaraan proyek jalan tol.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

API

API was established based on Deed No. 29 dated July 24, 2014 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU-19255.40.10.2014 dated August 4, 2014. API's Articles of Association has been amended based on Deed No. 29 dated March 26, 2015 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, regarding the increase in authorized and paid-in capital, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No. AHU-0934117.AH.01.02.TAHUN 2015 dated April 27, 2015.

The authorized capital of API amounted to Rp350,000,000 which is divided into 35,000,000 shares with a nominal value of Rp10,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- PPI owns 99% or 8,910,000 shares with total amount of Rp89,100,000.
- PTP owns 1% or 90,000 shares with total amount of Rp900,000.

Based on Deed No. 33 dated December 21, 2017 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company increased the authorized capital to Rp1,000,000,000 and the issued and fully paid capital to Rp386,000,000 which was subscribed by PPI and PTP amounted to Rp382,140,000 and Rp3,860,000, respectively. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No. AHU-0027756.AH.01.02.TAHUN 2017 dated December 27, 2017.

Currently, the API's activities are primarily concentrated on investment in MTDX, an associate which is engaged in a toll road project.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

NPCT1

NPCT1 didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014 dari Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-11432.40.10.2014 tanggal 3 Juni 2014.

Modal dasar NPCT1 sebesar Rp340.725.600 yang terbagi atas 510 saham Kelas A dan 490 saham Kelas B masing-masing dengan nilai nominal Rp340.725.600 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- IPC TPK memiliki 51% atau sebanyak 510 saham Kelas A dengan nilai nominal sebesar Rp173.770.056.
- Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., memiliki 49% atau sebanyak 490 saham Kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp166.955.544.

Saat ini, NPCT1 bergerak dalam bidang pelayanan jasa bongkar muat barang.

TPI

TPI didirikan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 10 April 2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan AHU-21873.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 24 April 2013.

Modal dasar TPI sebesar Rp500.000.000 yang terbagi atas 500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

NPCT1

NPCT1 was established based on Deed No. 33 dated May 28, 2014 of Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No. AHU-11432.40.10.2014 dated June 3, 2014.

The authorized capital of NPCT1 amounted to Rp340,725,600 which is divided into 510 Class A shares and 490 Class B shares with a nominal value of Rp340,725,600 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- IPC TPK owns 51% or 510 Class A shares with total amount of Rp173,770,056.
- Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., owns 49% or 490 Class B shares with total amount of Rp166,955,544.

Currently, NPCT1 engage in cargo handling services.

TPI

TPI was established based on Deed No. 36 dated April 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No. AHU-21873.AH.01.01. Tahun 2013 dated April 24, 2013.

The authorized capital of TPI amounted to Rp500,000,000 which is divided into 500,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 25% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) owns 25% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 25% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

TPI (lanjutan)

- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

Saat ini, TPI belum melakukan kegiatan operasi komersial.

JICT

JICT didirikan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 27 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsy Tahamata, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-5466.HT.01.01.TH'99 tanggal 29 Maret 1999.

Berdasarkan Akta Perubahan No. 77 dan No. 78 tanggal 30 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsy Tahamata, S.H., dinyatakan bahwa modal dasar JICT adalah sebesar Rp221.450.406 terbagi atas 1 saham seri A porsi Pemerintah Republik Indonesia dan 442.900.812 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut (Catatan 45b, 45c, 45d dan 45e):

- Perusahaan memiliki 48,90% atau sebanyak 216.578.498 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp108.289.249.
- Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,10% atau sebanyak 442.899 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp221.449.
- Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (dahulu Grosbeak Pte. Ltd.) memiliki 51% atau sebanyak 225.879.415 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp112.939.707.

Saat ini, JICT bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan, jasa terminal petikemas, lapangan penumpukan dan jasa lainnya.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

TPI (continued)

- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 25% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.

Currently, TPI has not yet started commercial operation.

JICT

JICT was established based on Notarial Deed No. 72 dated March 27, 1999 of Notary Nelly Elsy Tahamata, S.H., M.Kn. The establishment of JICT was approved by Minister of Law and Human Rights No. C-5466.HT.01.01.TH'99 dated March 29, 1999.

Based on Deed of Amendment No. 77 and 78 dated March 30, 1999 by Notary Nelly Elsy Tahamata, S.H., the authorized capital of JICT amounted to Rp221,450,406, comprising of 1 Series A share for The Government of Republic of Indonesia portion and 442,900,812 Series B shares with par value of Rp500 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows (Notes 45b, 45c, 45d and 45e):

- The Company owns 48.90% or 216,578,498 Series B shares with total amount of Rp108,289,249.
- Koperasi Pegawai Maritim owns 0.10% or 442,899 Series B shares with total amount of Rp221,449.
- Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (formerly Grosbeak Pte. Ltd.) owns 51% or 225,879,415 Series B shares with total amount of Rp112,939,707.

Currently, JICT's activities consist of port services, container terminal services, dockyard and other related services.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

TPK Koja

Kerjasama Operasi TPK Koja didirikan berdasarkan Akta No. 53 tanggal 23 Oktober 1996 oleh Imas Fatimah, S.H. dan Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja pada tanggal 16 Agustus 1994 antara Perusahaan dengan PT Hutchison Ports Indonesia ("HPI"). Perjanjian tersebut kemudian diubah secara substansial pada tanggal 26 Maret 1999 ("Amandemen I") dan selanjutnya diubah pada tanggal 22 Juni 2011 ("Amandemen II"), tanggal 5 Agustus 2014 ("Amandemen III") dan tanggal 22 Juni 2015. Perjanjian tersebut berlaku selama 20 tahun sejak tanggal operasi komersial, yaitu tanggal 1 November 1998 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Maret 2039 (Catatan 45a).

Proporsi investasi partisipan untuk tahun 2015 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Saat ini, TPK Koja bergerak dalam bidang pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan dan terminal petikemas.

CTP (dahulu MTDX)

Berdasarkan Perjanjian Pengambilbagian Saham Bersyarat dan Perjanjian Pemegang Saham MTDX tanggal 14 April 2015, yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 28 Agustus 2015, API, MTD Capital Bhd dan PT Nusacipta Etika Pratama sepakat bahwa API akan melakukan investasi di MTDX dengan cara mengambil bagian atas 130.220 saham baru dengan total nilai nominal Rp118.500.200 (mewakili 45% kepemilikan saham) yang diterbitkan MTDX. Pada tanggal 18 September 2015, transaksi telah diselesaikan dan API menjadi pemilik 45% saham MTDX.

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., MTDX mengganti nama menjadi PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP"). Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0011468.AH.01.02 tanggal 26 Mei 2017.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

TPK Koja

Kerjasama Operasi TPK Koja was established based on Deed No. 53 dated October 23, 1996 of Imas Fatimah, S.H. and on Master Cooperation Agreement dated August 16, 1994 between the Company and PT Hutchison Ports Indonesia ("HPI"). The agreement was substantially revised on March 26, 1999 ("Amendment I") and revised further on June 22, 2011 ("Amendment II"), August 5, 2014 ("Amendment III") and June 22, 2015. The term of the agreement is 20 years from the date of commencement of full commercial operations on November 1, 1998 and has been extended until March 26, 2039 (Note 45a).

The investment proportions of the participants for the year 2015 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

Currently, TPK Koja's activities consist of operating and managing a container port and terminal.

CTP (formerly MTDX)

Based on Conditional Share Subscription Agreement and Shareholders Agreement of MTDX dated April 14, 2015, which was amended and restated on August 28, 2015, API, MTD Capital Bhd and PT Nusacipta Etika Pratama agreed that API will invest in MTDX by subscribing to 130,220 new shares with a total nominal amount of Rp118,500,200 (representing 45% share ownership) issued by MTDX. On September 18, 2015, the transaction was completed and API became the owner of 45% shares in MTDX.

Based on Deed No. 17 dated May 24, 2017 drawn before Drs. Soebiantoro, S.H., MTDX change the name to PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP"). The deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No. AHU-0011468.AH.01.02 dated May 26, 2017.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

MKO MTKI

Pada tanggal 9 April 2015, IKT mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik Jawa Timur dengan PT Maspion Industrial Estate ("MIE") dengan membentuk MKO MTKI. Jangka waktu perjanjian adalah 25 tahun dengan porsi pendanaan IKT dan MIE masing-masing sebesar 45% dan 55%.

Pada bulan Maret 2016, MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia telah beroperasi secara komersial dan bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan.

PII

PII didirikan berdasarkan Akta No. 112 tanggal 17 November 2017 dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusan No. AHU-0052776.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 21 November 2017.

Modal dasar PII sebesar Rp800.000.000 yang terbagi atas 800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 198.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp198.000.000.
- MTI memiliki 1% atau sebanyak 2.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.000.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

MKO MTKI

On April 9, 2015, IKT entered into an Agreement of Construction and Operation of Car Terminal in Gresik Jawa Timur with PT Maspion Industrial Estate ("MIE") by establishing MKO MTKI. The period of agreement is 25 years with the funding portion for IKT and MIE amounted to 45% and 55%, respectively.

On March, 2016, MKO Maspion Terminal Kendaraan Indonesia has operated commercially and engage in car terminal operation.

PII

PII was established based on Deed No. 112 dated April 10, 2013 of Notary Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. The Deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision letter No. AHU-0052776.AH.01.01. Tahun 2017 dated November 21, 2017.

The authorized capital of PII amounted to Rp800,000,000 which is divided into 800,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- The Company owns 99% or 198,000 shares with total amount of Rp198,000,000.
- MTI owns 1% or 2,000 shares with total amount of Rp2,000,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit,
Sekretaris Perusahaan dan Karyawan**

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016, SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016, SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016, SK-132/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan SK-215/MBU/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/
Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris

Tumpak H. Panggabean
Suaidi Marasabessy
Kushari Suprianto
Montty Giriana
D. Andhi Nirwanto
Djadmiko

Direksi

Direktur Utama
Direktur Komersial dan
Pengembangan Usaha
Direktur Teknik dan
Manajemen Resiko
Direktur Operasi dan
Sistem Informasi
Direktur Keuangan
Direktur SDM dan Hukum
Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan

Elvyn G. Masassya
Saptono R. Irianto
Dani Rusli Utama
Prasetyadi
Iman Rachman
Rizal Ariansyah
Riry Syeried Jetta

1. GENERAL (continued)

**c. Board of Commissioners, Directors, Audit
Committee, Corporate Secretary and
Employees**

Board of Commissioners and Directors

Based on the Statement of Decree of the Minister of SOEs in lieu of the General Meeting of the Company's Shareholders No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016, SK-82/MBU/04/2016 dated April 22, 2016, SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016, SK-132/MBU/07/2017 dated July 14, 2017 and SK-215/MBU/10/2017 dated Oktober 4, 2017 the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2017 are as follows:

Board of Commissioners

President/Independent
Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Directors

President Director
Director of Commercial and
Business Development
Director of Engineering and
Risk Management
Director of Operations and
Information System
Director of Finance
Director of Human Resources and Law
Director of Subsidiary Management

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. SK-40/MBU/03/2016 tanggal 1 Maret 2016, SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016 dan SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ Independen	Tumpak H. Panggabean
Komisaris Independen	Suaidi Marasabessy
Komisaris	Heru Pambudi
Komisaris	Cris Kuntadi
Komisaris	Montty Giriana
Komisaris	Fadjar Judisiawan
Komisaris	Djadmiko

Direksi

Direktur Utama	Elvyn G. Masassya
Direktur	Saptono R. Irianto
Direktur	Iman Rachman
Direktur	Dani Rusli Utama
Direktur	Disril Revolin Putra
Direktur	Riry Syeried Jetta
Direktur	Prasetyadi

Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan

Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	Kushari Suprianto
Anggota	Rakhmad Adi Santosa

Sekretaris Perusahaan Shanti Puruhita

Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	Cris Kuntadi
Anggota	Suparman
Anggota	Agus Witjaksono

Sekretaris Perusahaan Banu Astrini

1. GENERAL (continued)

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees (continued)

Based on the Statement of Decree of the Minister of SOEs in lieu of the General Meeting of the Company's Shareholders No. SK-40/MBU/03/2016 dated March 1, 2016, SK-82/MBU/04/2016 dated April 22, 2016 and SK-101/MBU/05/2016 dated May 16, 2016, the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2016 are as follows:

Board of Commissioners

President/Independent Commissioner
Independent Commissioner Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Directors

President Director
Director
Director
Director
Director
Director

Audit Committee and Corporate Secretary

The Company's Audit Committee and Corporate Secretary as of December 31, 2017 are as follows:

Audit Committee

Head
Member

Corporate Secretary

The Company's Audit Committee and Corporate Secretary as of December 31, 2016 are as follows:

Audit Committee

Head
Member
Member

Corporate Secretary

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Karyawan

Total karyawan tetap Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebanyak 4.566 dan 4.354 karyawan (tidak diaudit).

d. Mata Uang Pelaporan

Mata uang pelaporan Kelompok Usaha adalah Rupiah, kecuali PPI, TPK Koja, NPCT1 dan JICT dalam Dolar Amerika Serikat.

e. Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian

Mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional.

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha, laporan keuangan PPI, TPK Koja, NPCT1 dan JICT dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan cara sebagai berikut:

- Aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan;
- Penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- Seluruh hasil dari selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya.

Mutasi akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Saldo awal	410.724.359	414.712.026
Efek penjabaran - neto	23.609.863	(3.987.667)
Saldo akhir	434.334.222	410.724.359

*Beginning balance
Effect due to translation - net*

Ending balance

1. GENERAL (continued)

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees (continued)

Employees

Total permanent employees of the Group as of December 31, 2017 and 2016 are 4,566 and 4,354 employees, respectively (unaudited).

d. Reporting Currency

The Group's reporting currency is Rupiah, except PPI, TPK Koja, NPCT1 and JICT which are in United States Dollar.

e. Translation into Presentation Currency

The presentation currency of the Group's consolidated financial statements is in Rupiah, which is also the functional currency.

In preparing the consolidated financial statements of the Group, financial statements of PPI, TPK Koja, NPCT1 and JICT were translated to Rupiah currency based on the following:

- Assets and liabilities were translated using the prevailing rates at reporting date;
- Income and expenses were translated using the average exchange rate; and
- All resulting exchange differences were recognized in other comprehensive income.

Movement for exchange differences due to financial statements translation account are as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 21 Februari 2018. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam Catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

1. GENERAL (continued)

f. Completion of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II and its subsidiaries as of December 31, 2017 and for the year then ended are completed and authorized for issuance on February 21, 2018. The Company's Directors who signed the Directors' statement are responsible for the fair preparation and presentation of such consolidated financial statements.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which comprises the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, have been prepared on an accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts that were measured by using a basis as disclosed in the relevant Notes.

The consolidated statements of cash flow was prepared using direct method and presents receipts and expenditures of cash and cash equivalents, which were classified into operating, investing and financing activities.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Kelompok Usaha seperti yang disebutkan pada Catatan 1.

Perusahaan memiliki kontrol atas entitas anak apabila Perusahaan memiliki dampak dari atau memiliki hak atas penerimaan/imbalance hasil variabel dari hubungannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk penerimaan tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Nonpengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak.
- menghentikan pengakuan nilai tercatat setiap KNP.
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas, bila ada.
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima.
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya.
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Group mentioned in Note 1.

The Company have control to entity when the Company have an impact to, or has right of, variable return from its involvement with the subsidiaries and has the ability to affect those returns through its power over the subsidiaries.

All material intercompany transactions and balances have been eliminated in the consolidated financial statements.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtained control and continue to be consolidated until the date such control ceases.

Losses of a subsidiary that is not fully owned by the Company are attributed to Non-controlling Interest (NCI) even if that will result in a deficit balance.

If it loses control over a subsidiary, the Group:

- derecognizes the assets (including *goodwill*) and liabilities of the subsidiaries.
- derecognizes the carrying amount of any NCI.
- derecognizes any cumulative translation differences recorded in equity.
- recognizes the fair value of the consideration received.
- recognizes the fair value of any investment retained.
- recognizes any surplus or deficit in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and
- reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh entitas induk yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Kelompok Usaha pada suatu entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Kelompok Usaha dan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah KNP disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Entitas Induk

c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" (Catatan 1d dan 1e).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian dan aset tak berwujud.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (nilai penuh):

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

NCI reflects the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries entity that not attributable directly or indirectly by the parent company which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.

Changes in the Group's ownership interest in a subsidiary that do not impact in loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's and non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. Any differences between the amount by which the NCI are adjusted and the fair value of consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Parent Company.

c. Foreign Currency Transactions and Balances

The Group applied PSAK No. 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" (Notes 1d and 1e).

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency and presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, except for foreign exchange difference that can be attributed to qualifying assets which are capitalized to construction in progress and intangible assets.

Below are the major exchange rates used for translation as of December 31, 2017 and 2016 (full amount):

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang
Asing (lanjutan)**

**c. Foreign Currency Transactions and
Balances (continued)**

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Dolar Amerika Serikat (USD) 1	13.548	13.436	United States Dollar (USD) 1
Euro Eropa (EUR) 1	16.174	14.162	European Euro (EUR) 1
Dolar Singapura (SGD) 1	10.134	9.299	Singapore Dollar (SGD) 1

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

d. Transactions with related parties

Kelompok Usaha memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi, seperti yang dijelaskan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

The Group has transactions with related parties, as defined in PSAK No. 7 (revised 2010), "Related Party Disclosures".

Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

The transactions are made based on terms agreed by the parties.

e. Kombinasi bisnis entitas sependengali

e. Business combinations entities under common control

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sependengali".

The Group applied PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combinations Entities Under Common Control".

Berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), entitas yang melepas bisnis maupun yang menerima bisnis mencatat selisih antara imbalan yang diterima/dialihkan dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas/jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis di ekuitas dan menyajikannya dalam akun "tambahan modal disetor".

Based on PSAK No. 38 (Revised 2012), the entity that disposed and received business records the difference between the consideration received/transferred and the carrying amount of the disposed business/carrying amount of any business combination transaction in equity in the "additional paid-in capital" account.

f. Kas dan Setara Kas

f. Cash and Cash Equivalents

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all investments with maturities of three months or less from the date of placement that were not used as collateral and are unrestricted.

Deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year are presented as short-term investments.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

g. Piutang Usaha dan Penyisihan Penurunan Nilai

Piutang usaha pada awalnya diukur sesuai dengan nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Pembentukan penyisihan penurunan nilai piutang ditentukan berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo dengan menggunakan metode roll rate. Berdasarkan keyakinan manajemen, metode pembentukan penyisihan penurunan nilai piutang tersebut tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo dengan menggunakan basis individual. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih.

h. Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan identifikasi khusus. Persediaan terdiri dari suku cadang kapal dan *crane*, bahan bakar, alat tulis kantor, obat dan alat-alat medis.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan.

i. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka dibebankan pada operasi sesuai dengan masa manfaatnya.

j. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh perusahaan dimana Kelompok Usaha memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendali. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas dan pada awalnya diakui sebesar harga perolehan. Investasi pada entitas asosiasi tersebut termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi dikurangi rugi penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Trade Receivables and Allowance for Losses

Trade receivables are initially measured at fair value and subsequently measured at amortized cost, net of allowance for impairment. Allowance for impairment losses is determined based on management's evaluation on the collectability of the balances using roll rate method. Based on the management beliefs, the impairment method will not have a significant difference compared to management evaluation on the collectability of the balances using individual basis. Trade receivables are written off in the period when the receivables cannot be collected.

h. Inventory

Inventory was recorded using the weighted average method and specific identification. Inventories consists of ship and crane spare part, fuels, office supplies, medicine and medical instruments.

Allowance for inventory obsolescence is defined based on analysis of inventory condition on the date of reporting of financial position.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are charged to operations over the periods benefited.

j. Investment in Associates

Associates entities over which the Group has significant influence but not control. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting and are initially recognized at cost. The Group's investment in associates include goodwill identified on acquisition, net of impairment loss.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

j. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Bagian Kelompok Usaha atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca-akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lainnya pasca-akuisisi diakui didalam penghasilan komprehensif lainnya. Mutasi penghasilan komprehensif pasca-akuisisi disesuaikan terhadap nilai tercatat investasinya, jika bagian Kelompok Usaha atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan.

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Kelompok Usaha memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi. Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul dari investasi pada entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kelompok Usaha menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal Kelompok Usaha tidak lagi memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi dan mencatat investasinya sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang mana hilangnya pengaruh signifikan tersebut tidak mengakibatkan entitas asosiasi menjadi entitas anak atau pengaturan bersama sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama". Ketika kehilangan pengaruh signifikan, maka Kelompok Usaha mengukur setiap investasi yang tersisa pada entitas asosiasi pada nilai wajar. Kelompok Usaha mengakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian setiap selisih antara:

- (a) nilai wajar investasi yang tersisa dan hasil pelepasan sebagian kepemilikan pada entitas asosiasi; dengan
- (b) jumlah tercatat investasi dalam tanggal ketika hilangnya pengaruh signifikan.

Ketika investasi dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dan dicatat sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), maka nilai wajar investasi ketika dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sebagai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Investment in Associates (continued)

The Group's share of their associates post acquisition profits or losses is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. Their share of post acquisition movement in other comprehensive income is recognized as other comprehensive income. The cumulative post-acquisition movements are adjusted against the carrying amount of the investment, when the Group's share of losses in an associate exceeds its interest in the associates, including any unsecured receivable.

The Group does not recognize for the losses unless they have incurred obligation or made payments on behalf of the associates. Diluted gains and losses arising in investments in associates are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The Group discontinue the use of the equity method from the date when Group ceases to have significant influence over an associate and records for the investment in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014), "Financial Instrument: Recognition and Measurement", from that date, provided the associate does not become a subsidiary or a joint arrangement as defined in PSAK No. 66, "Joint Arrangement". On the loss of significant influence, the Group shall measure at fair value any investment the investor retains in the former associate. The Group shall recognize in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income any difference between:

- (a) the fair value of any retained investment and any proceeds from disposing of the part of the interest in the associate; and*
- (b) the carrying amount of the investment at the date when significant influence is lost.*

When an investment ceases to be an associate and is recorded for in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014), the fair value of the investment at the date when it ceases to be an associate shall be regarded as its fair value on initial recognition as a financial asset in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

k. Properti Investasi

Properti investasi merupakan properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai Kelompok Usaha untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi tersebut.

Perusahaan telah memilih model biaya untuk mencatat properti investasinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi yang berupa bangunan fasilitas pelabuhan (10 - 50 tahun) dan jalan dan bangunan (10 - 40 tahun).

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Investment Properties

Investment properties represents properties (land or building - or part of a building - or both) held by the Group to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and any impairment in value, if any. The carrying amount includes the cost of replacement of an existing investment property in the year such costs are incurred, if the recognition criteria are met and does not include the cost of daily use of the investment property.

The Company has chosen the cost model to record for its investment properties.

Depreciation is computed using the straight-line basis over the estimated useful lives of investment properties which consist of building and port facilities (10 - 50 years) and road and building (10 - 40 years).

Investment properties are derecognized when either it has been disposed of or when it is permanently withdrawn from use and no future benefit is expected from its disposal. Any gains or losses on the retirement or disposal of investment properties are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the period of retirement or disposal.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Aset tetap

I. Fixed assets

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

All fixed assets are initially recognized at cost which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for the assets to be capable of operating in the manner intended by management.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

After to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets start when it is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful live of the assets as follows:

<u>Jenis Aset</u>	<u>Tahun/Years</u>	<u>Type of Assets</u>
Bangunan fasilitas pelabuhan	10 - 50	Building and port facilities
Kapal	5 - 20	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	5 - 20	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	10 - 25	Port facility installation
Jalan dan bangunan	10 - 40	Road and building
Peralatan	4 - 25	Equipment
Kendaraan	5	Vehicles
Emplasemen	3 - 25	Emplacement

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year in which the asset is derecognized.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

I. Aset tetap (lanjutan)

Pada akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi dan disesuaikan secara prospektif jika terjadi perubahan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas, dalam hal ini disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

Biaya perbaikan yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba pada saat terjadinya.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Aset kerjasama operasi merupakan kegiatan kerjasama yang meliputi pemanfaatan aset dari para pihak atas suatu kegiatan operasi yang didasarkan pada perjanjian kontraktual. Aset kerjasama operasi dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Fixed assets (continued)

At the end of reporting period, the residual values, useful lives and methods of depreciation of assets are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of reporting period.

Land is stated at cost and not depreciated.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration and the benefits from the site dismantlement, removal and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

The cost of major repairs is recognized as the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the profit or loss as incurred.

Major spare parts and stand-by equipments are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

Joint operation assets are joint activities that include utilization of the assets from the parties for operational activities that is based on contractual agreements. Joint operation assets are stated at cost less accumulated depreciation and are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of similar fixed assets.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

m. Sewa

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau mengandung sewa adalah berdasarkan substansi dari perjanjian tersebut pada penetapan awal. Perjanjian dievaluasi apakah pemenuhannya tergantung kepada penggunaan aset atau aset-aset tertentu secara spesifik atau perjanjian mengalihkan hak untuk menggunakan aset atau aset-aset, walaupun hak tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian.

Kelompok Usaha sebagai lessee

Sewa pembiayaan yang mengalihkan kepada Kelompok Usaha secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar dari aset sewaan atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa dipisahkan antara beban keuangan dan pengurangan liabilitas sewa, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Beban keuangan diakui sebagai beban pendanaan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Sebuah aset sewaan disusutkan selama masa manfaat dari aset tersebut. Tetapi, jika tidak terdapat kepastian memadai bahwa Kelompok Usaha akan memperoleh kepemilikan diakhir masa sewa, maka aset disusutkan selama mana yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat aset dan masa sewa.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian secara garis lurus selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Lease

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date. The arrangement is assessed for whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets or the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

Group as a lessee

A finance lease that transfers to the Group substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item is capitalized at the commencement of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognized as financing cost in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Operating lease payments are recognized as an operating expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis over the lease term.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Kelompok Usaha sebagai lessor

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasional jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto tersebut.

Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan.

n. Pengaturan bersama

Kelompok Usaha merupakan pihak dalam pengaturan bersama apabila terdapat pengaturan kontraktual yang memberikan pengendalian bersama atas aktivitas relevan kepada Kelompok Usaha dan minimal satu pihak lainnya. Pengendalian bersama diuji dengan prinsip yang sama dengan penilaian pengendalian atas anak perusahaan.

Kelompok Usaha mengklasifikasikan kepentingannya dalam pengaturan bersama sebagai berikut:

- Ventura bersama: ketika Kelompok Usaha memiliki hak hanya pada net aset dari pengaturan bersama
- Operasi bersama: ketika Kelompok Usaha memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas yang terkait dengan pengaturan bersama.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Lease (continued)

Group as a lessor

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership. Leases are classified as operating leases if the lease does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

In a finance lease, the lessor recognizes finance lease assets such as receivables in the consolidated statements of financial position at an amount equal to the net lease investment.

The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the lessor's net investment in the finance lease.

n. Joint arrangements

The Group is a party to a joint arrangement when there is a contractual arrangement that confers joint control over the relevant activities of the arrangement to the Group and at least one other party. Joint control is assessed under the same principles as control over subsidiaries.

The Group classifies its interests in joint arrangements as either:

- Joint ventures: where the Group has rights to only the net assets of the joint arrangement
- Joint operations: where the Group has both the rights to assets and obligations for the liabilities of the joint arrangement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

n. Pengaturan bersama (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian klasifikasi kepentingan dalam pengaturan bersama, Kelompok Usaha mempertimbangkan hal-hal berikut:

- struktur pengaturan bersama
- bentuk hukum pengaturan bersama apabila dibentuk melalui kendaraan terpisah
- persyaratan pengaturan kontraktual
- ketika relevan, fakta dan keadaan lain (termasuk semua perjanjian kontraktual lainnya).

Kelompok Usaha mencatat kepentingannya dalam operasi bersama dengan mengakui hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban dalam ketentuan kontraktual.

o. Aset Takberwujud

Aset takberwujud Kelompok Usaha terdiri dari aset hak konsesi, piranti lunak dan biaya ditangguhkan.

Aset takberwujud diakui jika Kelompok Usaha kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Aset takberwujud diamortisasi selama umur manfaat ekonomi aset dan dievaluasi apabila terdapat indikasi adanya penurunan nilai untuk aset takberwujud. Periode dan metode amortisasi untuk aset takberwujud direviu setidaknya setiap akhir tahun tutup buku.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat; i) dilepaskan atau ii) ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Joint arrangements (continued)

In assessing the classification of interests in joint arrangements, the Group considers:

- *The structure of the joint arrangement*
- *The legal form of joint arrangements structured through a separate vehicle*
- *The contractual terms of the joint arrangement agreement*
- *Any other facts and circumstances (including any other contractual arrangements).*

The Group accounts for its interests joint operations by recognising its share of assets, liabilities, revenues and expenses in accordance with its contractually conferred rights and obligations.

o. Intangible Assets

Intangible assets of the Group consist of concession rights asset, software and deferred charges.

Intangible assets are recognized if the Group will obtain useful economic benefit from the intangible assets and the cost of assets can be reliably measured.

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and impairment loss, if any.

An intangible asset is amortized over the asset's useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset are reviewed at least at each financial year end.

An intangible asset shall be derecognized; i) on disposal; or ii) when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi

Kelompok Usaha telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22).

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Kelompok Usaha membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan terminal Kalibaru yang akan diamortisasi selama periode aset diharapkan dapat digunakan oleh Perusahaan sejak tanggal pengoperasian terminal. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi terminal Kalibaru diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Concession Asset

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22).

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group records for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are Kalibaru terminal concession rights which are amortized over the period of assets are expected to use from the date of operation of the Kalibaru terminal. During the construction period, the accumulated Kalibaru terminal construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ("OP") tanpa syarat.

Aset konsesi yang diberikan kepada Kelompok Usaha dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/OP. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/OP pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selain itu, Kelompok Usaha mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" (PSAK 34) dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Kelompok Usaha menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Kelompok Usaha diakui pada nilai wajar.

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan aset konsesi - Terminal Kalibaru yang meliputi biaya pembangunan dermaga, pengadaan tanah dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Concession Asset (continued)

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ("OP") for no consideration.

Concession asset which granted to the Group are transferrable with approval from the Government/OP. These concession assets will be transferred to the Government/OP at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

In addition, the Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" (PSAK 34) and PSAK 23, "Revenue", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

Construction contract comprehends all cost directly attributable to the construction of concession assets - Kalibaru Terminal which includes cost of port development, land acquisition and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required, plus the cost of borrowing directly used for financing the construction of concession asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Kelompok Usaha mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset takberwujud dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Aset konsesi diamortisasi selama periode aset diharapkan dapat digunakan oleh Perusahaan dengan menggunakan metode garis lurus.

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya-biaya sehubungan dengan perolehan sistem perangkat lunak yang mempunyai masa manfaat 4-5 tahun, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

p. Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 26 (Revisi 2011), "Biaya Pinjaman".

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Kelompok Usaha sehubungan dengan pinjaman dana.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Concession Asset (continued)

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract.

Construction cost is the value of the construction contract.

The concession assets that amortized over the period of assets are expected to use using straight line method.

Software

Software represents expenses relating to systems software cost, which benefits extend over a period of 4-5 years, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method.

p. Capitalization of Borrowing Cost

The Group implemented PSAK No. 26 (Revised 2011), "Borrowing Costs".

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction and production of the qualifying assets are capitalized as a part of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

p. Kapitalisasi Biaya Pinjaman (lanjutan)

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai maksudnya.

q. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka atas pemakaian lahan dan bangunan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak lancar atas pendapatan diterima di muka disajikan sebagai bagian dari "liabilitas jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

r. Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran.

Berikut merupakan kriteria pengakuan pendapatan yang harus dipenuhi sehingga pengakuan dapat diakui:

- Pendapatan jasa kapal, jasa terminal petikemas, jasa barang, jasa terminal dan logistik diakui pada saat transaksi jasa telah selesai dilakukan.
- Pendapatan pelayanan kesehatan diakui pada saat jasa telah diberikan atau saat barang medis telah diserahkan kepada pasien.
- Pengakuan atas pendapatan jasa jaringan, konsultasi dan pemeliharaan diakui pada saat jasa tersebut telah diserahkan kepada pelanggan. Pendapatan dari penjualan software diakui pada saat resiko dan hak kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pelanggan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**p. Capitalization of Borrowing Cost
(continued)**

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are completed for their intended use.

q. Unearned Revenues

Unearned revenues from usage of land and buildings are amortized over the usage term using the straight-line method. The non-current portion of unearned revenues is shown as part of "long term liabilities" in the consolidated statements of financial position.

r. Revenue and Expenses

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivables.

The criteria of revenue recognition are as follows:

- *Revenue from ship services, container services, goods services, terminal services and logistic are recognized when the transactions have been performed.*
- *Revenue from medical services is recognized when the services rendered or when the medical items are have been delivered to the patients.*
- *Revenue from network services, consulting and maintenance services are recognized when services have been rendered to the customers. Revenue from software sales is recognized when the significant risk and rewards of ownership have been transferred to the customer.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

- Pendapatan jasa pengerukan diakui berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan aktual. Persentase pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan tetapi belum ditagihkan dicatat sebagai pendapatan masih akan diterima. Selisih lebih antara pembayaran yang diterima dengan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka.
- Pendapatan atas kegiatan pelatihan diakui pada saat kegiatan telah dilaksanakan.
- Pendapatan sewa tanah dan bangunan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.
- Pendapatan dividen diakui pada saat hak Kelompok Usaha untuk menerima pembayaran dividen ditetapkan.
- Pendapatan konstruksi
Kelompok Usaha mengakui aset takberwujud atas jasa konstruksi dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Pada fase konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan basis kontrak biaya-plus.

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

Beban konstruksi diakui sejak kegiatan konstruksi dimulai sampai dengan proses pembangunan aset selesai dan siap untuk digunakan.

Kelompok Usaha mencatat pendapatan dan beban konstruksi bersamaan dengan pengakuan aset takberwujud pada tahap konstruksi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Revenue and Expenses (continued)

- Revenue from dredging services is recognized based on actual percentage of work completion. Percentage of work that has been completed based on memorandum of work completion but not yet been billed are recorded as accrued income. Excess of payments received from customers over value of work that has been completed the are recorded as unearned revenue.
- Revenue from training services is recognized when the activities are completed.
- Land and building rental revenue is recognized on a straight line basis over the term of the lease contracts.
- Dividend revenue is recognized when the Group's right to receive the dividend payment is established.
- Construction revenues
The Group recognizes intangible assets of construction services in which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. In the construction period, the Group recorded intangible assets and recognize revenues and costs of construction by using cost-plus contract basis.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

Construction cost are recognized during construction stage up to construction activity was finished and asset ready to use.

The Group accounted for construction revenue and construction cost at the same time of recognition of intangible asset during construction phase.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Perpajakan

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Kelompok Usaha memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penghasilan sewa tanah dan bangunan sebagai pos tersendiri.

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasi dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan, kecuali untuk aset tertentu seperti tanah yang pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kelompok Usaha juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Taxation

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subjected to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to revised PSAK No. 46 as mentioned above, final tax is no longer governed by PSAK No. 46. Therefore, the Group has decided to present all of the final tax arising from land and building rent revenue as separate line item.

The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset, except for certain asset such as land, which realization is taxed with final tax on gross value of transaction.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Corporate Income Tax - Current" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. The Group also presented interest/penalty, if any, as part of "Corporate Income Tax - Current".

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if filed an objection, when the result of the objection is determined.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Kelompok Usaha mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Taxation (continued)

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Group reassesses unrecognized deferred tax assets. The Group recognizes a previous unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to the items that previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statements of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

t. Imbalan Kerja

Imbalan pascakerja

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (Program Pensiun) untuk semua karyawan tetapnya yang telah memenuhi kriteria dan liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai yang ditentukan berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku. Liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai tersebut dihitung dengan membandingkan imbalan yang akan diterima oleh karyawan pada usia normal pensiun dari Program Pensiun dengan imbalan sesuai dengan KKB, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi pemberi kerja dan hasil pengembangannya. Jika bagian pemberi kerja pada imbalan Program Pensiun kurang dari imbalan yang diharuskan oleh KKB, Perusahaan akan mencadangkan kekurangan tersebut.

Perusahaan memberikan imbalan kerja lainnya, seperti imbalan kesehatan dan uang penghargaan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Estimasi biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Beban untuk imbalan kerja berdasarkan KKB/UU/imbalan kesehatan pascakerja ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Laba atau rugi aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi total 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (*present value of the defined benefit obligation*) pada tanggal tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Employee Benefits

Post-employment benefits

The Company has a defined contribution retirement plan (Pension Plan) covering all of its qualified permanent employees and an unfunded employee benefit liability determined in accordance with the existing Collective Labor Agreement (CLA). The unfunded employee benefit liability is calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the Pension Plan with the benefit as stipulated in the CLA, after deducting the accumulated employer contribution and the related investment results. If the employer-funded portion of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by the CLA, the Company reserves for such shortfall.

The Company also provides other post-employment benefits, such as healthcare benefits and service pay to their retirees. The entitlement to these benefits are usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The estimation costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to defined benefit pension plans.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end of the reporting period less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and prior service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

The costs of providing employee benefits under the CLA/Law/post-retirement healthcare benefits plan are determined using the projected-unit-credit method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

t. Employee Benefits (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Keuntungan atau kerugian yang melebihi ketentuan 10% diakui selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang terjadi ketika Perusahaan memperkenalkan program imbalan pasti atau terjadinya perubahan atas imbalan yang terhutang dari program yang berlaku saat ini harus diamortisasi selama periode sampai imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan (*vested*).

These gains or losses in excess of the 10% threshold are amortized on a straight-line basis over the average of remaining working period of the employees estimates. Further, past service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk cuti besar yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan. Perkiraan beban ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. Kewajiban ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Other long term employment benefits included the long services leave benefit which is determined in compliance with the Company's Regulation. The expected costs of these benefits are calculated and recognized over the year of employment, using the method which is applied in calculating obligation for post-employment benefits. These obligations are calculated on a minimum once a year by an independent actuary. Other long term employment benefits that are vested, are recognized as expense immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Program iuran pasti

Program iuran pasti merupakan program imbalan pascakerja, dimana entitas membayar iuran tetap kepada suatu entitas terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum ataupun konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Kewajiban untuk membayar iuran secara regular merupakan biaya imbalan kerja karyawan untuk periode dimana jasa diberikan oleh pekerja.

Defined contribution plans

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan in which the entity pays fixed contributions into a separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for the regular contributions constitute employee benefit costs for the period during which services are rendered by employees.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Instrumen Keuangan

u. Financial Instruments

i) Aset keuangan

i) Financial assets

Pengakuan awal

Initial recognition

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika dibolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan.

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments and available-for-sale financial assets, as appropriate. The Group determines the classification of the financial assets upon initial recognition and, if allowed and appropriate, will re-evaluate this designation at the end of each financial year.

Semua aset keuangan diakui pertama kali pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali apabila aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Financial assets are recognized initially at fair value plus direct attributable transaction costs, except if the financial assets are recorded at fair value through profit or loss.

Aset keuangan Kelompok Usaha mencakup kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset tidak lancar lainnya diklasifikasikan sebagai "Pinjaman yang diberikan dan Piutang".

The financial assets of the Group, which include cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, accrued revenues and other non-current assets, are all classified as "Loans and Receivables".

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- (a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi

- (a) *Financial assets at fair value through profit or loss*

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi termasuk aset keuangan untuk dijual dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

u. Financial Instruments (continued)

i) Aset keuangan (lanjutan)

i) Financial assets (continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)

Subsequent measurement (continued)

- (a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi (lanjutan)

- (a) *Financial assets at fair value through profit or loss (continued)*

Aset derivatif diklasifikasikan sebagai kelompok untuk dijual kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan Kelompok Usaha pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui sebagai laba atau rugi.

Derivative assets are classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at fair value through profit or loss are presented in the Group's statements of financial position at fair value with gains or losses recognized as profit or loss.

Kelompok Usaha memiliki investasi jangka pendek dalam kategori ini.

The Group has short-term investment classified under this category.

- (b) Pinjaman yang diberikan dan piutang

- (b) *Loan and receivables*

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan dan kerugian terkait diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or defined payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are recorded at amortized cost using the effective interest rate method, and gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Kelompok Usaha memiliki kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset tidak lancar lainnya dalam kategori ini.

The Group has cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, accrued revenue and other non-current assets are classified under this category.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

u. Financial Instruments (continued)

i) Aset keuangan (lanjutan)

i) Financial assets (continued)

**(c) Aset keuangan tersedia untuk dijual
(lanjutan)**

**(c) Available-For-Sale ("AFS") financial
Assets**

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif akan direklasifikasi sebagai laba atau rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

AFS financial assets are nonderivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the three preceding categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in the shareholders' equity until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in equity will be reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment.

Perusahaan memiliki investasi penyertaan saham - tersedia untuk dijual.

The Company has long-term investment - investment share - available-for-sale.

ii) Liabilitas keuangan

ii) Financial liabilities

Pengakuan awal

Initial recognition

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, liabilitas keuangan yang dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi atau sebagai derivatif yang dirancang sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang lebih sesuai. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial liabilities at fair value through the profit or loss, financial liabilities measured at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Group determines the classification of financial liabilities upon initial recognition. Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, included direct attributable transaction costs.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha mencakup utang usaha, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya, sewa pembiayaan, utang obligasi serta liabilitas jangka panjang lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian harus diakui sebagai laba atau rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasinya.

iii) Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

ii) Financial liabilities (continued)

Initial recognition (continued)

The financial liabilities of the Group, which include trade payables, accrued expenses, other current liabilities, finance lease, bonds payable and other long-term liabilities, are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Subsequent measurement

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Gains and losses are recognized as profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

iii) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a current enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

iv) Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang secara aktif diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tanpa adanya pengurangan atas biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar (*arm's-length market transactions*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya.

v) Biaya perolehan yang diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan ini mencakup seluruh premi atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi serta komisi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

vi) Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Kelompok Usaha terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

iv) Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is determined based on to quoted market prices or dealer price quotation (bid price for long position and ask price for short position), without any deduction for transaction costs. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques include recent arm's-length market transactions, referring to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flows analysis, or other valuation models.

v) Amortized cost of financial instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method deducted by allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

vi) Impairment of financial assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**vi) Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan)**

Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

vi) Impairment of financial assets (continued)

If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**vi) Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan)**

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba atau rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan untuk pengukuran rugi penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Kelompok Usaha. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai. Pemulihan tidak akan menghasilkan nilai tercatat dari aset keuangan melebihi biaya perolehan yang diamortisasi, jika penurunan nilai tidak diakui pada saat penurunan nilai tersebut dipulihkan. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

**vi) Impairment of financial assets
(continued)**

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized as profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Loans and receivables, together with the associated allowances, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Group. If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. The reversal shall not result in a carrying amount of the financial assets that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized as profit or loss.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

vii) Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (2) Kelompok Usaha memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu diantara (a) Kelompok Usaha secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Kelompok Usaha secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

Apabila Kelompok Usaha mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, atau tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

vii) Derecognition of financial assets and liabilities

Financial assets

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired, or (2) the Group have transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Where the Group has transferred their rights to receive cash flows from a financial asset or have entered into a pass-through arrangement, or has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset but has transferred control of the financial asset, a new financial asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**vii) Penghentian pengakuan aset dan
liabilitas keuangan (lanjutan)**

Aset keuangan (lanjutan)

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

Liabilitas keuangan

Dalam hal ini, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Kelompok Usaha yang ditahan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung, dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui sebagai laba atau rugi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

**vii) Derecognition of financial assets and
liabilities (continued)**

Financial assets (continued)

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Group could be required to repay.

Financial liabilities

In this case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed, and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized as profit or loss.

A financial liability is derecognized when the contractual obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized as profit or loss.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

v. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yaitu 1.444.029 saham.

w. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

x. Informasi Segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk atau jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Item-item segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the income for the year attributable to the owners of the parent entity by the weighted-average number of shares outstanding during the year, which is 1,444,029 shares.

w. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

x. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products or services (business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

y. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

z. Penerapan standar akuntansi baru

Efektif tanggal 1 Januari 2017, Grup menerapkan beberapa standar akuntansi baru yang relevan terhadap Grup berikut ini:

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang "Prakarsa Pengungkapan".
- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016), "Laporan Keuangan Interim".
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), "Imbalan Kerja".
- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".
- ISAK No. 31, "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No.13: Properti Investasi".

Penerapan ini tidak memberikan dampak yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

y. Impairment of Non-financial Assets

Group assesses at reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when impairment testing for an asset is required, Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

z. Adoption of new accounting standards

Effective January 1, 2017, the Group adopted several new accounting standards which are relevant to the Group as follows:

- *Amendments to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements" regarding "Disclosure Initiative".*
- *PSAK No. 3 (Improvement 2016), "Interim Financial Reporting".*
- *PSAK No. 24 (Improvement 2016), "Employee Benefit".*
- *PSAK No. 60 (Improvement 2016), "Financial Instrument: Disclosure".*
- *ISAK No. 31, "Interpretation of SFAS 13: Investment Property".*

The adaption has no significant impact on the financial reporting and disclosure in the consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif**

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pada saat pengakuan awal entitas dapat memilih untuk mengukur investasinya pada nilai wajar atas dasar investasi-per-investasi.

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara International Accounting Standards Board dan Financial Accounting Standards Board, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective**

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current consolidated financial statements are disclosed below. Group intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

- PSAK 15 (2017 Improvement): Investments in Associates and Joint Ventures, effective January 1, 2018 with earlier application is permitted.

This improvement Clarifies that at initial recognition an entity may elect to measure its investee at fair value on the basis of an investment-by-investment.

- PSAK 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

This PSAK provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce a more general requirements based on management's judgement.

- PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

This PSAK is a single standards that a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to have analyzing before recognizing the revenue.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

- PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (underlying assets) bernilai-rendah.

- Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

- Amandemen PSAK 13 - Properti Investasi : Pengalihan Properti Investasi, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mencerminkan prinsip bahwa perubahan penggunaan aset mencakup penilaian atas apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

- PSAK 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted, but not before an entity applies PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers.

This PSAK establish the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease; there are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.

- Amendments to PSAK 2: Statement of Cash Flows on the Disclosures Initiative, effective January 1, 2018 with earlier application is permitted.

This amendments requires entities to provide disclosures that enable the financial statements users to evaluate the changes in liabilities arising from financing activities, including changes from cash flow and non-cash.

- Amendments to PSAK 13 - Investment Property : Transfer of Investment Property, effective January 1, 2018 with earlier application is permitted.

This amendments reflects the principle that asset usage changes include an assessment of whether the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

Kelompok usaha sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain.

Estimasi dan asumsi tersebut dibuat berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

- Amendments to PSAK 46: Income Taxes on the Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses, effective January 1, 2018 with earlier application is permitted.

This amendments clarifies that to determine whether the taxable income will be available so that the deductible temporary differences can be utilized; estimates of the most likely future taxable income can include recovery of certain assets of the entity exceeds its carrying amount.

The Group has presently evaluated and has not yet determined the effects of these accounting standards on its consolidated financial statements.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS**

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgements and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources.

These estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgements and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari setiap entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi sebagian besar pendapatan, biaya dan pendanaan masing-masing entitas.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan ditetapkan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (2014) dipenuhi. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti dijelaskan pada Catatan 2u.

Penyisihan penurunan nilai piutang

Kelompok Usaha mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan, kualitas jaminan yang diterima dan status kredit dari pelanggan berdasarkan Catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan penurunan nilai piutang.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements

The following judgements are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements.

Determination of functional currency

The functional currency of each entity within the Group is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that mainly influence the revenues, costs and financing of each of the respective entities.

Classification of financial assets and financial liabilities

Classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with accounting policies disclosed in Note 2u.

The allowance of impairment of receivables

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group use judgement, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer, quality of collateral received and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expect to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Penyisihan penurunan nilai piutang (lanjutan)

Bila Kelompok Usaha memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Kelompok Usaha menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang.

Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 6.

Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

OP memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak OP dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku (Catatan 44a). Pada akhir masa konsesi jasa, Kelompok Usaha harus menyerahkan terminal Kalibaru kepada OP bebas dari setiap bentuk pembebanan, termasuk tanah reklamasi, aset tidak bergerak dan aset bergerak yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian terminal Kalibaru.

Kelompok Usaha berpendapat bahwa Perjanjian Konsesi memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

The allowance of impairment of receivables (continued)

If the Group determine that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed trade receivables, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such trade receivables by being indicative of the customers' ability to pay all amounts due.

Future cash flows in a group of trade receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for the trade receivables with credit risk characteristics similar to those in the group. Further details are disclosed in Note 6.

Service concession arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

OP granted the Group the rights to the Company, including the right to implement the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of implementing the project without limiting the right of OP in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law (Note 44a). Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the Kalibaru Terminal free of any form of charges, including reclamation land, non-removable assets and movable assets therein directly related to, and in connection with, the operation of the Kalibaru Terminal.

The Group has made judgement that the Concession Agreement qualifies under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Kelompok Usaha diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Kelompok Usaha mengakui pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi masing-masing sebesar Rp1.392.135.797 dan Rp2.623.090.159.

Kelompok Usaha mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 34. Kelompok Usaha mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima tanpa marjin.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

Service concession arrangement (continued)

The Group is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the year in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. For the years ended December 31, 2016 and 2015, the Group recognized construction revenue amounting to Rp1,392,135,797 and Rp2,623,090,159, respectively.

The Group recognizes construction revenue of concession asset and construction costs of concession asset in accordance with PSAK 34. The Group measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received without margin.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 42.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Kelompok Usaha diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 21. Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Fair value of financial assets and financial liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation methods used.

The fair value of financial assets and financial liabilities is disclosed in Note 42.

Estimate useful lives of fixed assets

The useful life of each of the item of the Group's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

Estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 21. There is no change in the estimated useful lives of fixed assets during the year.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Kelompok Usaha.

Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2k, 2l, 12, 13, 14, 15 dan 16.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya belum dapat dipastikan dalam kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 21.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba fiskal pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2s dan 21.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

Further details are disclosed in Notes 2k, 2l, 12, 13, 14, 15 and 16.

Income tax

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of taxable income. Further details are disclosed in Note 21.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Notes 2s and 21.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan kerja karyawan

Penentuan provisi dan liabilitas imbalan kerja karyawan dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebesar Rp1.806.109.326 dan Rp1.554.159.311 (Catatan 26).

4. KAS DAN SETARA KAS

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
Kas	5.204.210	5.484.300	Cash on hand
Bank	5.068.282.916	2.521.247.984	Cash in banks
Deposito berjangka	9.133.843.206	11.941.143.394	Time deposits
Total kas dan setara kas	<u>14.207.330.332</u>	<u>14.467.875.678</u>	Total cash and cash equivalents

a. Kas

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
Rupiah	5.204.210	5.351.781	Rupiah
Dolar AS	-	132.519	US Dollar
Total Kas	<u>5.204.210</u>	<u>5.484.300</u>	Total Cash on hand

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Employee benefits

The determination of the employee benefits provision and liability is dependent on the selection of certain assumptions used by an actuary in calculating such amounts. Actual results that differ from the Management's assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the management's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of employee benefits liability. As of December 31, 2017 and 2016, employee benefits liability amounted to Rp1,806,109,326 and Rp1,554,159,311 (Note 26).

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

a. Cash on hand

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

b. Bank

b. Cash in banks

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
Rupiah:			Rupiah:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.015.460.840	305.403.040	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	57.752.003	28.980.436	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Permata Tbk	35.634.909	33.967.543	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	34.063.289	81.407.537	PT Bank Central Asia Tbk
Citibank, N.A.	8.880.069	6.049.835	Citibank, N.A.
PT Bank Victoria International Tbk	3.782.727	4.266.271	PT Bank Victoria International Tbk
PT OCBC NISP Tbk	1.285.643	-	PT OCBC NISP Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	879.754	1.787.730	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung
PT Bank BCA Syariah	760.458	311.885	PT Bank BCA Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	361.517	3.329.003	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Lain-lain	1.633.424	1.545.985	Others
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.320.332.887	310.880.360	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	922.815.724	456.881.563	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	107.463.906	24.182.427	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	42.617.879	141.152.665	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah	8.806.935	7.913.493	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Syariah Mandiri	3.426.562	3.857.341	PT Bank Syariah Mandiri
Subtotal	<u>3.565.958.526</u>	<u>1.411.917.114</u>	Sub-total
Dolar AS:			US Dollar:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk	23.438.035	278.632.884	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	18.366.236	640.694.463	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	15.644.295	3.895.669	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Permata Tbk	4.063.049	4.903.773	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	4.016.459	10.671.376	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	1.168.608	376.045	PT Bank Bukopin Tbk
Lain-lain	55.500	110.251	Others
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.251.298.488	28.119.405	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	153.404.369	122.538.457	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	29.960.840	18.053.679	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Subtotal	<u>1.501.415.879</u>	<u>1.107.996.002</u>	Sub-total
Euro Eropa:			European Euro:
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	908.511	1.334.868	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total bank	<u>5.068.282.916</u>	<u>2.521.247.984</u>	Total cash in banks

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

c. Deposito berjangka

c. Time deposits

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
Rupiah:			Rupiah:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Bukopin Tbk	698.500.000	387.500.000	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	475.670.648	207.697.022	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank DKI	375.000.000	200.000.000	PT Bank DKI
PT Bank CIMB Niaga Syariah	60.000.000	-	PT Bank CIMB Niaga Syariah
PT Bank CIMB Niaga Tbk	50.000.000	307.000.000	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	15.102.945	2.500.000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank QNB Indonesia Tbk	13.500.000	17.500.000	PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	4.000.000	4.000.000	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Mega Tbk	3.000.000	8.000.000	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	3.000.000	4.500.000	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.000.000	3.000.000	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank BCA Syariah	2.000.000	6.000.000	PT Bank BCA Syariah
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	555.000.000	443.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	361.781.994	427.277.366	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	489.011.918	239.618.201	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.000.000	87.500.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	15.000.000	10.000.000	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BNI Syariah	4.000.000	-	PT Bank BNI Syariah
Subtotal	<u>3.147.567.505</u>	<u>2.355.092.589</u>	Sub-total
Dolar AS:			US Dollar:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Maybank Indonesia	1.287.060.000	-	PT Bank Maybank Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	501.276.000	873.340.000	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank UOB Indonesia	187.149.362	-	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Bukopin Tbk	118.131.351	198.390.265	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	90.246.000	70.740.540	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	738.980.000	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata Tbk	-	268.720.000	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	-	76.081.350	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.271.032.273	1.764.482.700	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.083.840.000	4.381.916.270	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	806.160.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Subtotal	<u>5.538.734.986</u>	<u>9.178.811.125</u>	Sub-total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

c. Deposito berjangka (lanjutan)

c. Time deposits (continued)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Dolar Singapura: Pihak berelasi (Catatan 40) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	447.540.715	407.239.680	Singapore Dollar: Related parties (Note 40) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total deposito berjangka	9.133.843.206	11.941.143.394	Total time deposits

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Rupiah	4,50% - 9,50%	4,50% - 9,50%	Rupiah
Dolar AS	0,50% - 2,26%	0,50% - 2,00%	US Dollar
Dolar Singapura	1,00%	1,00%	Singapore Dollar

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

5. SHORT-TERM INVESTMENTS

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Deposito berjangka			Time deposits
Rupiah:			Rupiah:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank DKI	80.000.000	250.000.000	PT Bank DKI
PT Bank Bukopin Tbk	-	300.000.000	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	-	2.000.000	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	64.518.592	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.000.000	70.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dolar AS:			US Dollar:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	5.000.000	134.360.000	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.793.440.000	4.030.800.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.682.504.000	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Total deposito berjangka	6.645.462.592	4.787.160.000	Total time deposits
Negotiable certificate of deposits (catatan 16)	200.000.000	-	Negotiable certificate of deposits (note 16)
Efek yang diperdagangkan	77.007.997	-	Marketable securities
Aset keuangan tersedia untuk dijual	76.612.109	-	Available-for sale financial assets
Total investasi jangka pendek	6.999.082.698	4.787.160.000	Total short-term investments

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

5. INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan)

Deposito berjangka merupakan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta tidak dijadikan jaminan.

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

**Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,**

	2017	2016	
Rupiah	7,25% - 8,00%	7,00% - 8,00%	Rupiah
Dolar AS	1,00% - 1,97%	1,00% - 1,97%	US Dollar

Efek yang diperdagangkan dan aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan instrumen keuangan dalam bentuk saham yang dibeli melalui PT Syailendra Gold, manajer investasi.

5. SHORT-TERM INVESTMENTS (continued)

Time deposits represent deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year and were not used as collateral.

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

Marketable securities and available-for-sale financial assets represent financial instrument in shares of stock purchased through PT Syailendra Gold, investment manager.

6. PIUTANG USAHA

a. Berdasarkan pelanggan

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Pihak ketiga			Third parties
Swasta	866.936.844	688.072.340	Private
Perorangan	6.493.936	7.207.995	Individuals
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(324.276.663)	(291.275.957)	Allowance for impairment
Pihak ketiga - neto	549.154.117	404.004.378	Third parties - net
Pihak berelasi (Catatan 40)			Related parties (Note 40)
Badan Usaha Milik Negara	184.116.726	116.394.243	State Owned Enterprise
Tentara Nasional Indonesia	16.802.609	12.523.634	Indonesian Armed Forces
Instansi pemerintah	1.191.792	3.646.663	Government institutions
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(52.511.567)	(52.297.053)	Allowance for impairment
Pihak berelasi - neto	149.599.560	80.267.487	Related parties - net
Piutang usaha - neto	698.753.677	484.271.865	Trade receivables - net

6. TRADE RECEIVABLES

a. By customer

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Rupiah	982.217.917	710.892.350	Rupiah
Dolar AS	93.246.518	116.881.434	US Dollar
Dolar Singapura	77.472	71.091	Singapore Dollar
Total	1.075.541.907	827.844.875	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(376.788.230)	(343.573.010)	Less: Allowance for impairment
Neto	698.753.677	484.271.865	Net

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

b. By currency

c. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Saldo awal	343.573.010	319.089.240	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	33.215.220	24.483.770	Provision for the year
Saldo akhir	376.788.230	343.573.010	Ending balance

c. The movements in the allowance for impairment of receivables is as follows:

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on a review of the status of each individual receivable accounts at the end of the reporting period, the Group's management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Pihak ketiga			Third parties
Swasta	73.046.665	66.109.822	Private
Perorangan	833.015	1.572.985	Individuals
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(24.113.917)	(36.003.744)	Less: Allowance for impairment
Pihak ketiga - neto	49.765.763	31.679.063	Third parties - net
Pihak berelasi (Catatan 40)	775.968.744	132.506.003	Related parties (Note 40)
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(37.656.398)	(24.062.522)	Less: Allowance for impairment
Pihak berelasi - neto	738.312.346	108.443.481	Related parties - net
Piutang lain-lain - neto	788.078.109	140.122.544	Other receivables - net

7. OTHER RECEIVABLES

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

7. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Saldo awal	60.066.266	59.111.030	<i>Beginning balance</i>
Penyisihan tahun berjalan	1.704.049	955.236	<i>Provision for the year</i>
Saldo akhir	61.770.315	60.066.266	<i>Ending balance</i>

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan masing-masing piutang pada akhir periode pelaporan, manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

7. OTHER RECEIVABLES (continued)

The movement in the allowance for impairment of other receivable are as follows:

Based on review of the status of each individual other receivable accounts at the end of the reporting period, the Group's management believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover possible losses from uncollectible other receivables.

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

8. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Uang muka			Advances
Operasional	45.998.814	58.144.384	<i>Operational</i>
Lain-lain	4.121.206	5.379.622	<i>Others</i>
Subtotal	50.120.020	63.524.006	<i>Sub-total</i>
Beban dibayar di muka			Prepaid expenses
Pegawai	41.305.877	34.524.746	<i>Personnel</i>
Asuransi	14.655.536	20.482.391	<i>Insurance</i>
Sewa	11.940.325	5.887.777	<i>Rental</i>
Umum	5.962.152	12.030.412	<i>General</i>
Lain-lain	20.192.692	17.341.766	<i>Others</i>
Subtotal	94.056.582	90.267.092	<i>Sub-total</i>
Total	144.176.602	153.791.098	<i>Total</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

9. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Pihak ketiga		
Pelayanan jasa terminal	81.937.762	9.948.331
Pelayanan kesehatan	76.966.424	12.307.047
Pelayanan terminal petikemas	63.532.454	29.533.029
Jasa logistik	18.559.505	26.580.016
Pelayanan tanah, bangunan, air, dan listrik	16.986.979	65.081.819
Pelayanan jasa kapal	11.450.354	22.857.995
Pelayanan jasa barang	10.979.478	10.083.489
Pengusahaan peralatan	7.477.702	9.554.768
Lain-lain	16.035.643	15.608.017
Subtotal	303.926.301	201.554.511
Pihak berelasi (Catatan 40)	26.573.499	63.312.642
Total	330.499.800	264.867.153

9. ACCRUED REVENUES

<i>Third parties</i>
<i>Terminal services</i>
<i>Medical services</i>
<i>Container terminal services</i>
<i>Logistic services</i>
<i>Land, building, water and electrical services</i>
<i>Vessel services</i>
<i>Cargo services</i>
<i>Equipment services</i>
<i>Others</i>
<i>Sub-total</i>
<i>Related parties (Note 40)</i>
Total

10. PERSEDIAAN

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Suku cadang	42.052.260	33.441.310
Obat, bahan, dan alat medis	11.350.279	7.303.522
Alat tulis dan barang cetakan	2.502.036	2.569.380
Bahan bakar	1.645.712	3.468.063
Perlengkapan kapal	387.327	304.083
Lain-lain	2.454.458	2.770.980
Total	60.392.072	49.857.338
Dikurangi: Penyisihan persediaan usang	(3.911.120)	(615.836)
Neto	56.480.952	49.241.502

10. INVENTORIES

<i>Spareparts</i>
<i>Medicines, materials and equipment</i>
<i>Stationaries and printings</i>
<i>Fuels</i>
<i>Vessel equipments</i>
<i>Others</i>
<i>Total</i>
<i>Less: Allowance for inventory obsolescence</i>
Net

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movements are the allowance for inventory obsolescence is as follows:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Saldo awal	615.836	632.291
Penyisihan tahun berjalan	3.290.147	-
Efek penjabaran mata uang asing	5.137	(16.455)
Saldo akhir	3.911.120	615.836

<i>Beginning balance</i>
<i>Provision for the year</i>
<i>Effect of foreign exchange translation</i>
Ending balance

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

11. INVESTMENT IN ASSOCIATES

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
JICT (Catatan 45b, 45c, 45d dan 45e)	1.322.446.813	1.432.285.329	JICT (Notes 45b, 45c, 45d and 45e)
CTP (dahulu MTDX)	128.193.297	126.140.171	CTP (formerly MTDX)
NPCT1 (Catatan 44d)	69.710.190	26.027.572	NPCT1 (Catatan 44d)
TPI (Catatan 1b)	34.538.554	35.517.515	TPI (Catatan 1b)
Total	1.554.888.854	1.619.970.587	Total

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The movements of investments in associates are as follows:

31 Desember/December 31, 2017						
Metode ekuitas	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Nilai tercatat/ Carrying value	Equity method
Dimiliki melalui Perusahaan						Owned through the Company
JICT	48,90%	108.289.248	895.609.140	318.548.425	1.322.446.813	JICT
TPI	25,00%	37.500.000	(2.961.446)	-	34.538.554	TPI
Dimiliki melalui API						Owned through API
CTP (dahulu MTDX)	45,00%	118.500.200	9.693.097	-	128.193.297	CTP (formerly MTDX)
Dimiliki melalui IPC TPK						Owned through IPC TPK
NPCT1	51,00%	173.770.056	(130.818.750)	26.758.884	69.710.190	NPCT1
Total		438.059.504	771.522.041	345.307.309	1.554.888.854	Total
31 Desember/December 31, 2016						
Metode ekuitas	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Nilai tercatat/ Carrying value	Equity method
Dimiliki melalui Perusahaan						Owned through the Company
JICT	48,90%	108.289.248	959.357.240	364.638.841	1.432.285.329	JICT
TPI	25,00%	37.500.000	(1.982.485)	-	35.517.515	TPI
Dimiliki melalui API						Owned through API
CTP (dahulu MTDX)	45,00%	118.500.200	7.639.971	-	126.140.171	CTP (formerly MTDX)
Dimiliki melalui IPC TPK						Owned through IPC TPK
NPCT1	51,00%	173.770.056	(174.419.874)	26.677.390	26.027.572	NPCT1
Total		438.059.504	790.594.852	391.316.231	1.619.970.587	Total

12. PROPERTI INVESTASI

12. INVESTMENT PROPERTIES

	31 Desember/ December 31, 2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2017	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	46.236.254	-	-	(1.224.656)	45.011.598	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	650.710.444	-	-	-	650.710.444	Port facilities
Jalan dan bangunan	14.868.567	-	-	-	14.868.567	Roads and buildings
Total	711.815.265	-	-	(1.224.656)	710.590.609	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

12. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

12. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

	31 Desember/ December 31, 2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2017	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(286.203.312)	(19.758.899)	-	-	(305.962.211)	Port facilities
Jalan dan bangunan	(9.789.162)	(497.216)	-	-	(10.286.378)	Roads and buildings
Total	(295.992.474)	(20.256.115)	-	-	(316.248.589)	Total
Nilai buku neto	415.822.791				394.342.020	Net book value
	31 Desember/ December 31, 2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2016	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	46.236.254	-	-	-	46.236.254	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	628.380.883	-	-	22.329.561	650.710.444	Port facilities
Jalan dan bangunan	14.868.567	-	-	-	14.868.567	Roads and buildings
Total	689.485.704	-	-	22.329.561	711.815.265	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(246.475.726)	(24.002.406)	-	(15.725.180)	(286.203.312)	Port facilities
Jalan dan bangunan	(7.179.056)	(2.610.106)	-	-	(9.789.162)	Roads and buildings
Total	(253.654.782)	(26.612.512)	-	(15.725.180)	(295.992.474)	Total
Nilai buku neto	435.830.922				415.822.791	Net book value

Beban penyusutan properti investasi dicatat sebagai beban operasi.

Depreciation expenses of investment properties are recorded as operating expenses.

Nilai wajar properti investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp36.904.599.300 dan Rp29.523.679.440.

The fair value of investment properties for the years ended December 31, 2017 and 2016 are calculated amounting to Rp36,904,599,300 and Rp29,523,679,440, respectively.

13. ASET TETAP

13. FIXED ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2017	
Harga perolehan						Acquisition Costs
Tanah	1.418.115.362	210.112.768	-	99.804.298	1.728.032.428	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	5.236.526.645	-	(149.919)	216.771.099	5.453.147.825	Port facilities
Kapal	1.675.090.747	40.136.942	(138.019.606)	379.933	1.577.588.016	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	2.495.247.230	55.603.884	(18.389.984)	54.331.660	2.586.792.790	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	478.128.278	7.536.820	(48.887)	362.751.535	848.367.746	Port installation
Jalan dan bangunan	1.543.746.696	4.619.008	(1.571.060)	359.643.259	1.906.437.903	Roads and buildings
Peralatan	459.344.683	48.824.749	(1.543.973)	56.352.795	562.978.254	Equipment
Kendaraan	57.537.915	14.489.373	(242.678)	295.176	72.079.786	Vehicles
Emplasemen	31.648.309	807.250	-	5.790.267	38.245.826	Emplacement
Subtotal	13.395.385.865	382.130.794	(159.966.107)	1.156.120.022	14.773.670.574	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	575.573.364	566.507.919	-	(603.537.547)	538.543.736	Construction in progress
Total	13.970.959.229	948.638.713	(159.966.107)	552.582.475	15.312.214.310	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(1.019.784.175)	(163.850.002)	-	6.188.410	(1.177.445.767)	Port facilities
Kapal	(751.784.299)	(70.017.138)	121.666.327	-	(700.135.110)	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	(910.344.683)	(174.529.872)	13.693.130	(6.517.126)	(1.077.698.551)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(132.190.484)	(43.961.603)	43.998	(62.472)	(176.170.561)	Port installation
Jalan dan bangunan	(310.189.895)	(75.036.022)	107.596	(3.050.371)	(388.168.692)	Roads and buildings
Peralatan	(338.571.004)	(48.972.511)	1.315.340	(3.252.133)	(389.480.308)	Equipment
Kendaraan	(37.839.570)	(3.539.242)	-	-	(41.378.812)	Vehicles
Emplasemen	(14.539.668)	(2.252.283)	-	(29.280)	(16.821.231)	Emplacement
Total	(3.515.243.778)	(582.158.673)	136.826.391	(6.722.972)	(3.967.299.032)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(19.074.031)	-	9.349	-	(19.064.682)	Less: Allowance for impairment
Nilai buku neto	10.436.641.420				11.325.850.596	Net book value

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

13. FIXED ASSETS (continued)

	31 Desember/ December 31, 2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2016	
Harga perolehan						Acquisition Costs
Tanah	1.409.869.636	7.695.000	-	550.726	1.418.115.362	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	4.874.992.774	47.633.848	-	313.900.023	5.236.526.645	Port facilities
Kapal	1.640.334.506	53.072.395	(38.586.366)	20.270.212	1.675.090.747	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	2.427.608.476	21.957.240	-	45.681.514	2.495.247.230	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	437.711.557	6.586.503	-	33.830.218	478.128.278	Port installation
Jalan dan bangunan	1.376.735.584	57.883.082	-	109.128.030	1.543.746.696	Roads and buildings
Peralatan	364.333.338	32.376.510	(1.730.368)	64.365.203	459.344.683	Equipment
Kendaraan	57.129.033	193.882	-	215.000	57.537.915	Vehicles
Emplasemen	28.361.379	-	-	3.286.930	31.648.309	Emplacement
Subtotal	12.617.076.283	227.398.460	(40.316.734)	591.227.856	13.395.385.865	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	708.224.691	427.341.906	-	(559.993.233)	575.573.364	Construction in progress
Total	13.325.300.974	654.740.366	(40.316.734)	31.234.623	13.970.959.229	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(864.078.002)	(153.970.634)	-	(1.735.539)	(1.019.784.175)	Port facilities
Kapal	(727.257.321)	(63.113.343)	38.586.365	-	(751.784.299)	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	(744.157.862)	(166.186.821)	-	-	(910.344.683)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(110.484.590)	(21.705.894)	-	-	(132.190.484)	Port installation
Jalan dan bangunan	(261.500.536)	(48.689.359)	-	-	(310.189.895)	Roads and buildings
Peralatan	(291.628.483)	(43.202.971)	1.311.856	(5.051.406)	(338.571.004)	Equipment
Kendaraan	(33.478.466)	(4.361.104)	-	-	(37.839.570)	Vehicles
Emplasemen	(13.093.783)	(1.445.885)	-	-	(14.539.668)	Emplacement
Total	(3.045.679.043)	(502.676.011)	39.898.221	(6.786.945)	(3.515.243.778)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(4.241.316)	(14.832.715)	-	-	(19.074.031)	Less: Allowance for impairment
Nilai buku neto	10.275.380.615				10.436.641.420	Net book value

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan dalam beban operasi.

Depreciation expense of fixed assets is allocated to operating expenses.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Kelompok Usaha mengasuransikan aset tetap terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya pada PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Fistlight Indonesia, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Purna Artanugraha, PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Wahana Tata, PT Berdikari Insurance, PT Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Mitra Maparya, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT IBS Insurance Broking Service dan PT Raets Marine dengan total nilai pertanggungan seluruhnya masing-masing sebesar Rp4.688.158.490 dan USD522.000.000 pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp4.516.292.569 dan USD20.500.000 pada tanggal 31 Desember 2016. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang diasuransikan.

As of December 31, 2017 and 2016, the Group insured its fixed assets against losses from fire and other insurable risks to PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Fistlight Indonesia, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Purna Artanugraha, PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Wahana Tata, PT Berdikari Insurance, PT Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Mitra Maparya, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT IBS Insurance Broking Service and PT Raets Marine with total insurance coverage amounting to Rp4,688,158,490 and USD522,000,000 as of December 31, 2017 and Rp4,516,292,569 and USD20,500,000 as of December 31, 2016. In management's opinion, the above insurance coverage is adequate to cover any possible losses that may arise from such risks.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Reklasifikasi pada tahun 2017 termasuk reklasifikasi dari akun aset takberwujud ke aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp599.903.446 dan nilai buku sebesar Rp593.180.473, reklasifikasi tanah dari akun properti investasi ke akun aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp1.224.656 serta reklasifikasi peralatan dari akun aset tetap dalam penyelesaian ke akun aset tidak berwujud dengan nilai perolehan sebesar Rp14.840.979.

Reklasifikasi pada tahun 2016 termasuk reklasifikasi peralatan kantor berupa perangkat komputer dari akun aset takberwujud ke aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp18.651.347 dan nilai buku sebesar Rp13.599.941, reklasifikasi bangunan fasilitas pelabuhan dari aset tetap ke akun properti investasi dengan nilai perolehan sebesar Rp22.329.561 dan nilai buku sebesar Rp6.604.381 serta reklasifikasi bangunan fasilitas pelabuhan dari akun aset lain-lain ke aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp34.912.837 dan nilai buku sebesar Rp17.452.118.

Penghapusan Aset Tetap

Perusahaan

Pada tahun 2017, Perusahaan menghapusbukukan aset tetap tertentu berdasarkan SK Direksi No. HK.568/22/12/1/PI.II-16 tanggal 29 Desember 2015, SK Direksi No. KU.02.08/13/9/2/MAT/UT/PI.II-17 pada tanggal 13 September 2017, dan SK Direksi No. HK.01/10/1/1/MAT/UT/PI.II-18 serta telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN berdasarkan surat No. S-536/MBU/09/2016 tanggal 8 September 2016, S-330/MBU/06/2017 tanggal 2 Juni 2017, dan S-647/MBU/11/2017 tanggal 14 November 2017.

Total harga perolehan aset tetap yang dihapuskan pada tahun 2017 sebesar Rp18.515.265 dengan nilai buku sebesar Rp7.361.572.

Atas penghapusan dan penjualan aset tetap yang telah dilakukan di 2017, Perusahaan mencatat laba penjualan aset tetap sebesar Rp26.650.

13. FIXED ASSETS (continued)

Reclassification in 2017 include reclassification from intangible assets account to fixed assets account with acquisition cost amounting to Rp599,903,446 and book value amounting to Rp593,180,473, land reclassification from investment properties account to fixed assets account with acquisition cost amounting to Rp1,224,656 and equipment reclassification from construction in progress account to intangible assets account with acquisition cost amounted to Rp14,840,979.

Reclassification in 2016 included office equipment reclassification in the form of computer hardware from intangible assets account to fixed assets account with acquisition cost amounting to Rp18,651,347 and book value amounting to Rp13,599,941, port facilities reclassification from fixed assets account to investment properties account with acquisition cost amounting to Rp22,329,561 and book value amounting to Rp6,604,381 and port facilities reclassification from other assets account to fixed assets account with acquisition cost amounting to Rp34,912,837 and book value amounting to Rp17,452,118.

Write-off of Fixed Assets

The Company

In 2017, the Company has written-off certain fixed assets based on SK Direksi No. HK.568/22/12/1/PI.II-16 dated December 29, 2015, SK Direksi No. KU.02.08/13/9/2/MAT/UT/PI.II-17 dated September 13, 2017, and SK Direksi No. HK.01/10/1/1/MAT/UT/PI.II-18 and has been approved by the Minister of State Owned Enterprises based on letter No. S-536/MBU/09/2016 dated September 8, 2016, No. S-330/MBU/06/2017 dated June 2, 2017, and No. S-647/MBU/11/2017 dated November 14, 2017.

Total acquisition cost of fixed assets written-off in 2017 amounted to Rp18,515,265, with book value amounting to Rp7,361,572.

Due to write-off and sales of fixed asset which were already performed in 2017, the Company recorded gain on sale of fixed assets amounting to Rp26,650.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Penghapusan Aset Tetap (lanjutan)

MTI (lanjutan)

Berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor: RL-036/PLII.17/2017 tanggal 13 Juni 2017, MTI menghapusbukkan aset alat fasilitas pelabuhan berupa Forklift Mitshubishi DP 25 ND 4 unit dan Reach Truck Forklift Crown 2 unit akibat barang tersebut rusak atau usang.

Atas penghapusan dan penjualan aset tetap yang telah dilakukan di tahun 2017, MTI mencatat laba penjualan aset tetap sebesar Rp31.425 pada tahun 2017.

Total harga perolehan aset tetap yang dihapuskan pada tahun 2017 sebesar Rp1.574.727 dengan nilai buku sebesar Rp34.075.

Rukindo

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KD.065/KU.201/IX/DIRUT-2017 tanggal 4 September 2017 Rukindo menghapusbukkan aset tetap tertentu yaitu aset kapal berupa penghapusan KK Natuna dan pencatatan pembukuan hasil modifikasi KK Natuna menjadi Split Barge (SB).

Total harga perolehan aset tetap yang dihapuskan pada tahun 2017 sebesar Rp11.788.960, dengan nilai buku sebesar Rp1.

Aset dalam Penyelesaian

Aset dalam penyelesaian terdiri dari:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Bangunan fasilitas pelabuhan	219.275.045	279.125.166	Port facilities
Kapal	107.436.690	93.063.247	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	89.493.317	43.615.381	Port equipment
Peralatan	50.689.984	44.713.787	Equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	40.942.260	60.454.966	Port installation
Jalan dan bangunan	30.706.440	53.641.213	Roads and buildings
Emplasemen	-	959.604	Emplacement
Total	538.543.736	575.573.364	Total

Biaya perolehan aset dalam penyelesaian tersebut di atas termasuk beban pinjaman yang dikapitalisasi sebesar Rp7.252.241 dan Rp3.344.168 masing-masing pada tahun 2017 dan 2016.

13. FIXED ASSETS (continued)

Write-off of Fixed Assets (continued)

MTI (continued)

Based on Salinan Risalah Lelang No: RL-036/PLII.17/2017 dated June 13, 2017, MTI has written-off Port Facility Tools Assets which consists of Forklift Mitshubishi DP 25 ND (4 units) and Reach Truck Forklift Crown (2 units) because the tools are damaged or obsolete.

Due to write-off and sales of fixed asset which performed in 2017, MTI recorded gain on sale of fixed assets amounting to Rp31,425 in 2017.

Total acquisition cost of fixed assets written-off in 2017 amounting to Rp1,574,727 with book value amounting to Rp34,075.

Rukindo

Based on Keputusan Direksi No. KD.065/KU.201/IX/DIRUT-2017 dated September 4, 2017, Rukindo has written-off certain fixed assets, namely KK Natuna and recorded of KK Natuna being modified into Split Bridge (SB).

Total acquisition cost of fixed assets written-off in 2017 amounting to Rp11,788,960 with book value amounting to Rp1.

Construction in Progress

Construction in progress consists of:

Cost of construction in progress include capitalized borrowing cost amounting to Rp7,252,241 and Rp3,344,168 in 2017 and 2016, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam Penyelesaian (lanjutan)

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ Percentage of Completion
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	5% - 87%
Pekerjaan pembangunan kapal	85%
Pekerjaan pembangunan gedung kantor	14,25%
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	11,72% - 57,91%

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ Percentage of Completion
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	49% - 93%
Pekerjaan pembangunan kapal	85%
Pekerjaan pembangunan gedung kantor	30%
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	30%

13. FIXED ASSETS (continued)

Construction in Progress (continued)

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of December 31, 2017 are as follows:

Target penyelesaian/ Target of completion	Type of assets
2018	Elevation, reinforcement and dredging of dock project
2018	Construction of ship
2018	Construction of office building
2018	Construction of yard

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of December 31, 2016 are as follows:

Target penyelesaian/ Target of completion	Type of assets
2017	Elevation, reinforcement and dredging of dock project
2017	Construction of ship
2017	Construction of office building
2017	Construction of yard

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET KERJASAMA OPERASI

Aset kerjasama operasi merupakan aset yang diserahkan untuk dikelola oleh TPK Koja dan MKO MTKI masing-masing berdasarkan perjanjian kontraktual dengan PT Hutchison Ports Indonesia (Catatan 45a) dan PT Maspion Industrial Estate (Catatan 45o), sebagai berikut:

14. JOINT OPERATION ASSETS

Jointly controlled assets represent assets that are transferred to be managed by TPK Koja dan MKO MTKI based on contractual agreement with PT Hutchison Ports Indonesia (Note 45a) and PT Maspion Industrial Estate (Note 45o), respectively, as follow:

	31 Desember/ December 31, 2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2017	
Harga perolehan						Acquisition cost
Bangunan fasilitas pelabuhan	764.768.859	-	-	-	764.768.859	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	86.424.760	-	-	-	86.424.760	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	5.898.284	-	-	-	5.898.284	Port installation
Jalan dan bangunan	602.861	-	-	-	602.861	Roads and buildings
Peralatan	609.224	-	-	-	609.224	Equipment
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	Emplacement
Total	862.834.508	-	-	-	862.834.508	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(299.927.345)	(19.741.673)	-	-	(319.669.018)	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	(25.406.447)	(7.639.700)	-	-	(33.046.147)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(1.196.832)	(594.615)	-	-	(1.791.447)	Port installation
Jalan dan bangunan	(56.894)	(56.894)	-	-	(113.788)	Roads and buildings
Peralatan	(149.260)	(149.260)	-	-	(298.520)	Equipment
Emplasemen	(177.596)	(177.596)	-	-	(355.192)	Emplacement
Total	(326.914.374)	(28.359.738)	-	-	(355.274.112)	Total
Nilai buku neto	535.920.134				507.560.396	Net book value
	31 Desember/ December 31, 2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2016	
Harga perolehan						Acquisition cost
Bangunan fasilitas pelabuhan	760.088.321	4.680.538	-	-	764.768.859	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	86.424.760	-	-	-	86.424.760	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	5.746.427	151.857	-	-	5.898.284	Port installation
Jalan dan bangunan	-	602.861	-	-	602.861	Roads and buildings
Peralatan	-	609.224	-	-	609.224	Equipment
Emplasemen	-	4.530.520	-	-	4.530.520	Emplacement
Total	852.259.508	10.575.000	-	-	862.834.508	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(280.185.905)	(19.741.440)	-	-	(299.927.345)	Port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	(17.766.749)	(7.639.698)	-	-	(25.406.447)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(602.219)	(594.613)	-	-	(1.196.832)	Port installation
Jalan dan bangunan	-	(56.894)	-	-	(56.894)	Roads and buildings
Peralatan	-	(149.260)	-	-	(149.260)	Equipment
Emplasemen	-	(177.596)	-	-	(177.596)	Emplacement
Total	(298.554.873)	(28.359.501)	-	-	(326.914.374)	Total
Nilai buku neto	553.704.635				535.920.134	Net book value

15. ASET TAKBERWUJUD

15. INTANGIBLE ASSETS

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Aset hak konsesi	8.300.923.917	8.544.531.977	Concession rights assets
Piranti lunak	257.213.127	222.941.434	Software application
Aset takberwujud lainnya	20.241.980	20.188.981	Other intangible assets
Subtotal	8.578.379.024	8.787.662.392	Sub-total
Akumulasi amortisasi dan penyisihan penurunan nilai	(281.943.658)	(170.621.978)	Accumulated amortization allowance for impairment
Neto	8.296.435.366	8.617.040.414	Net

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Aset hak konsesi

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok kepada Perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Perjanjian Konsesi No. PP.001/1/1/OP.TPK-12 dan No. HK.566/15/11/PI.II-12 tanggal 31 Agustus 2012 (Catatan 44a), dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2017	
Biaya perolehan	8.544.531.977	356.295.386		(599.903.446)	8.300.923.917	Cost
Akumulasi amortisasi	(18.516.939)	(80.832.337)	-	6.722.972	(92.626.304)	Accumulated amortization
Nilai tercatat	8.526.015.038				8.208.297.613	Carrying amount
	31 Desember/ December 31, 2015	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2016	
Biaya perolehan	7.073.243.000	1.471.288.977	-	-	8.544.531.977	Cost
Akumulasi amortisasi	-	(18.516.939)	-	-	(18.516.939)	Accumulated amortization
Nilai tercatat	7.073.243.000				8.526.015.038	Carrying amount

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, masing-masing persentase rata-rata penyelesaian pembangunan terminal Kalibaru masih dalam konstruksi sebesar 70,41% dan 67,82%.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam aset hak konsesi pembangunan terminal Kalibaru untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp36.551.093 dan Rp79.153.179.

Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset hak konsesi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi *Port Wide Solution* untuk pelayanan *car terminal*, *container terminal* dan pergudangan beserta *Annual Technical Support (ATS)* dan *change request*, aplikasi piranti lunak yang berlisensi yang digunakan untuk proses pertukaran data secara elektronik (*electronic data interchange*), aplikasi bidang operasional, ERP (sistem informasi keuangan, personalia, teknik), pengembangan *Port Community System/Inaportnet*, aplikasi *dash board system* untuk menyajikan informasi mengenai performansi operasional, integrasi antar sistem, integrasi *autogate* dan *VGM* untuk sistem operasi terminal.

15. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Concession rights assets

Concession rights assets represent assets which were constructed based on the right granted by Main Port Authority Office of Tanjung Priok to the Company to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok based on Concession Agreement No. PP.001/1/1/OP.TPK-12 and No. HK.566/15/11/PI.II-12 dated August 31, 2012 (Note 44a), with details as follows:

As of December 31, 2017 and 2016, the average percentage completion of construction of Kalibaru terminal under construction is 70,41% and 67.82%, respectively.

Borrowing costs capitalized for the concession assets of Kalibaru terminal for the year ended December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp36,551,093 and Rp79,153,179.

The Group's management believes that there was no impairment in the value of concession rights assets as of December 31, 2017 and 2016.

Software

Software application represents cost incurred for the development of Port Wide Solution application for the development of Port Wide Solution application for car terminal services, container terminal services and warehouse and Annual Technical Support (ATS) and change request, licensed software application used for electronic data interchange, operational application, ERP (finance, human resources, technical information system), development of Port Community System/Inaportnet, dash board system application to present information regarding operational performance, system integration, autogate integration and VGM for terminal operating system.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

16. ASET LAIN-LAIN

	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Pajak final dibayar di muka (Catatan 21g)	321.623.875
Jaminan pelaksanaan	37.000.000
Piutang pemulihan investasi	21.620.188
Uang jaminan	17.902.531
<i>Negotiable certificate of deposits</i> (Catatan 40)	-
Aset lain-lain - neto	76.794.094
Total	474.940.688

16. OTHER ASSETS

	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
	-	<i>Prepaid final tax (Note 21g)</i>
	37.000.000	<i>Performance bond</i>
	37.707.410	<i>Investment recovery receivables</i>
	19.092.643	<i>Security deposits</i>
	200.000.000	<i>Negotiable certificate of deposits</i> (Note 40)
	66.083.311	<i>Other assets - net</i>
Total	359.883.364	Total

Negotiable certificate of deposits merupakan deposito pada Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia dengan jangka waktu 18 bulan yang jatuh tempo pada bulan Maret 2018. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, diskonto yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp5.025.546 dan Rp19.118.525 dicatat sebagai bagian dari akun "pendapatan diterima di muka jangka panjang" (Catatan 24).

Negotiable certificate of deposits represents deposits in Bank Mandiri and Bank Negara Indonesia with period of 18 months which will be due on March 2018. As of December 31, 2017 and 2016, unamortized discount amounted to Rp5,025,546 and Rp19,118,525, respectively are recorded as part of "long-term unearned revenue" (Note 24).

Piutang pemulihan investasi adalah piutang atas laba neto TPK Koja yang belum didistribusikan ke Perusahaan.

Investment recovery receivables represents receivables from net income of TPK Koja which has not been distributed to the Company.

Jaminan pelaksanaan merupakan bank garansi kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sehubungan dengan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru (Catatan 44a).

Performance bond represents bank guarantee to the Port Authority Tanjung Priok in relation to the development of Kalibaru terminal (Note 44a).

Uang jaminan diantaranya merupakan jaminan listrik di Tanjung Priok, bank garansi, telepon, jaringan internet dan mesin fotokopi.

Security deposits represents among others electricity deposits at Tanjung Priok, bank guarantee, deposits for telephone, internet connection and photocopy machine.

Aset lain-lain - lain-lain - neto terutama merupakan biaya yang ditangguhkan dari pengerukan kolam, peralatan *vessel traffic service*, perbaikan kapal keruk dan biaya konsultasi kegiatan *Basic Ship Management Fleet*.

Other assets - others - net mainly represents dredging, vessel traffic service equipment, dredges repairment and consultant fee of Basic Ship Management Fleet.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. UTANG USAHA

a. Berdasarkan pemasok

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Pihak ketiga Swasta	367.571.206	401.719.610	Third parties Private
Pihak berelasi (Catatan 40) Badan Usaha Milik Negara	999.183.968	944.037.756	Related parties (Note 40) State Owned Enterprise
Total	1.366.755.174	1.345.757.366	Total

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Rupiah	1.362.185.171	1.094.681.093	Rupiah
Dolar AS	4.570.003	251.076.273	US Dollar
Total	1.366.755.174	1.345.757.366	Total

17. TRADE PAYABLES

a. By supplier

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Third parties Private	367.571.206	401.719.610	
Related parties (Note 40) State Owned Enterprise	999.183.968	944.037.756	
Total	1.366.755.174	1.345.757.366	Total

b. By currency

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Rupiah	1.362.185.171	1.094.681.093	Rupiah
US Dollar	4.570.003	251.076.273	US Dollar
Total	1.366.755.174	1.345.757.366	Total

**18. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA
PENDEK**

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Uang untuk diperhitungkan Swasta	19.398.795	44.145.830	Advances from customers Private
Badan Usaha Milik Negara (Catatan 40h)	3.720.117	4.315.562	State Owned Enterprise (Note 40h)
Lain-lain	3.016.173	2.174.606	Others
Subtotal	26.135.085	50.635.998	Sub-total
Sewa kuartalan (Catatan 44h dan 45a)	287.725.000	120.210.878	Quarterly rent (Notes 44h and 45a)
Pelayanan jasa pengusaha tanah, bangunan, air dan listrik	85.010.861	20.378.019	Land, building, water and electricity service
Lain-lain	5.231.733	11.446.060	Others
Subtotal	377.967.594	152.034.957	Sub-total
Bagian lancar pendapatan diterima di muka jangka panjang (Catatan 24)	374.604.109	254.739.214	Current portion of long-term unearned revenue (Note 24)
Total	778.706.786	457.410.169	Total

Uang untuk diperhitungkan merupakan penerimaan uang di muka dari pelanggan yang akan memperoleh pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik dari Kelompok Usaha.

Advances from customers represents advances received from customers who will receive ship services, goods services, container services and logistic services from the Group.

Pendapatan diterima di muka - pelayanan jasa pengusaha tanah, bangunan, air dan listrik terutama merupakan pendapatan sehubungan dengan penggunaan tanah HPL Perusahaan.

Unearned revenues - land, building, water and electricity services mainly represents revenue derived from usage of Company's Right to Manage (HPL) land.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. BEBAN AKRUAL

	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Pegawai Umum	595.409.909
PPh 4(2) final (catatan 21g)	514.816.570
Kerjasama mitra usaha	359.022.000
Bunga	273.821.237
Pemeliharaan	152.838.375
Bahan bakar dan bahan habis pakai	65.022.565
Biaya konsesi	42.979.035
Provisi atas pembangunan aset Pemda DKI	15.941.339
Lain-lain	39.089.633
	109.081.832
Total	2.168.022.495

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban akrual untuk biaya bonus dan tantiem.

Beban akrual - PPh 4(2) final merupakan cadangan pembayaran pajak final atas ketetapan pajak kurang bayar tahun fiskal 2015 (Catatan 21g).

Beban akrual - kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi atas kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan serta beban pegawai nonorganik.

Beban akrual - umum terutama merupakan akrual beban pembelian dan pembangunan aset tetap.

Beban akrual - biaya konsesi merupakan biaya konsesi yang harus dibayarkan kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan Perjanjian Konsesi tanggal 11 November 2015 (Catatan 45m).

Provisi atas pembangunan aset Pemda DKI merupakan kewajiban Perusahaan untuk membangun dermaga dan stadion olahraga berdasarkan Memorandum of Understanding tanggal 26 May 1995 antara Gubernur DKI Jakarta dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub) dan Surat dari Menhub kepada Perusahaan No. PL.407/3/1Phb.96 tanggal 21 November 1996 mengenai pengalihan kewajiban pembangunan kepada Perusahaan.

20. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Pihak ketiga	148.274.403
Pihak berelasi (Catatan 40)	113.281.524
Total	261.555.927

19. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
	364.752.580	Employee
	137.023.715	General
	-	Final income tax article (note 21g)
	193.544.093	Partnership
	151.574.875	Interest
	71.474.388	Maintenance
	35.547.630	Fuels and supplies
	52.288.551	Concession fee
	39.089.633	Provision for construction of Pemda
	102.858.048	DKI assets
		Others
Total	1.148.153.513	Total

Accrued expenses - employees mainly represents accrued expenses for employee's bonus and directors' tantiem.

Accrued expense - final income tax article 4(2) represents provision for final tax payment in relation to tax assessment for fiscal year 2015 (Note 21g).

Accrued expenses - the partnership expenses mainly represents the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

Accrued expenses - general mainly represents accrued expenses for purchase and construction of fixed assets.

Accrued expenses - concession fee represents concession fee to be paid to Port Authority in accordance with Concession Agreement dated November 11, 2015 (Note 45m).

Provision of construction of Pemda DKI assets represents the Company's obligation to construct dock and sport stadium under the Memorandum of Understanding dated May 26, 1995 between Governor of DKI Jakarta with Minister of Transportation of the Republic of Indonesia (Menhub) and the letter from Menhub to the Company No. PL.407/3/1Phb.96 dated November 21, 1996 regarding the transfer of construction liability to the Company.

20. OTHER CURRENT LIABILITIES

	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
	183.421.670	Third parties
	96.993.402	Related parties (Note 40)
Total	280.415.072	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**20. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA
(lanjutan)**

20. OTHER CURRENT LIABILITIES (continued)

Rincian liabilitas jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Details of other current liabilities as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
Uang titipan dari pelanggan			<i>Deposit from customers</i>
<u>Pihak ketiga</u>			<u><i>Third parties</i></u>
Swasta	113.815.273	109.841.694	<i>Private</i>
Lain-lain	34.459.130	53.699.958	<i>Others</i>
<u>Pihak berelasi</u>			<u><i>Related parties</i></u>
Badan Usaha Milik Negara (Catatan 40i)	16.659.416	17.735.932	<i>State Owned Enterprise (Note 40i)</i>
Subtotal	<u>164.933.819</u>	<u>181.277.584</u>	<i>Sub-total</i>
Pihak ketiga	17.364.633	19.880.018	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi (Catatan 40j)			<i>Related parties (Note 40j)</i>
JICT (Catatan 45f)	38.980.725	38.980.720	<i>JICT (Note 45f)</i>
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (DKB)	31.666.118	31.666.118	<i>PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (DKB)</i>
Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	8.610.632	8.610.632	<i>Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)</i>
Subtotal	<u>96.622.108</u>	<u>99.137.488</u>	<i>Sub-total</i>
Total	<u>261.555.927</u>	<u>280.415.072</u>	Total

Uang titipan - swasta terutama merupakan sisa uang pengguna jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik yang belum dibayarkan kembali kepada pelanggan atau akan diperhitungkan dengan pelayanan berikutnya.

Deposit from customers - private mainly represents remaining deposits from customers for ship services, goods services, container services and logistic services which have not been settled to customer or will be taken into account with subsequent services.

Uang titipan - lain-lain terutama merupakan uang titipan yang berasal dari gaji bulanan pegawai untuk iuran jamsostek, asuransi dan koperasi pegawai.

Deposit from customers - others mainly represents deposit from employee monthly salary for jamsostek contribution, insurance and employee co-operative.

Liabilitas jangka pendek lainnya - pihak ketiga terutama merupakan utang yang timbul dari penerimaan uang jaminan penyediaan listrik dan cadangan klaim pelayanan kesehatan.

Other current liabilities - third party mainly represents payables from deposits received for electricity provision and claim reserves for health services.

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada DKB merupakan kekurangan pembayaran kompensasi atas pemindahan dan pengosongan Galangan III DKB ke Pulau Batam berdasarkan Surat Perjanjian No.HK.566/27/11/Pl.II-11 dan No.024/Kontr/I/DKB/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

Other current liabilities to DKB represents a shortage of payment of compensation to DKB for the removal and emptying of Galangan III in Batam Island based on Letter Agreement No.HK.566/27/11/Pl.II-11 and No.024/Kontr/I/DKB/2011 dated August 15, 2011.

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada DP4 merupakan kewajiban pembayaran pokok angsuran dan denda atas program pensiun Rukindo.

Other current liabilities to the DP4 represents an obligation on the principal installments and penalties for pension program of Rukindo.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN

21. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Perusahaan			<i>The Company</i>
Pajak Pertambahan Nilai	260.028.618	89.289.876	<i>Value Added Tax</i>
Pajak penghasilan pasal 19 - Penilaian kembali aktiva tetap (Catatan 21h)	-	162.202.982	<i>Income taxes article 19 - Revaluation of fixed assets (Note 21h)</i>
Pajak penghasilan lainnya	7.408.526	5.327.620	<i>Other income taxes</i>
Subtotal	267.437.144	256.820.478	<i>Sub-total</i>
Entitas anak			<i>Subsidiaries</i>
Pajak Pertambahan Nilai	234.477.380	170.319.812	<i>Value Added Tax</i>
Pajak penghasilan lainnya	55.322.455	5.772.885	<i>Other income taxes</i>
Subtotal	289.799.835	176.092.697	<i>Sub-total</i>
Total	557.236.979	432.913.175	Total

Taksiran tagihan restitusi pajak

Estimated claims for tax refund

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Perusahaan			<i>The Company</i>
Pajak Pertambahan Nilai 2015	-	-	<i>Value Added Tax 2015</i>
Pajak penghasilan			<i>Income tax</i>
2012	-	3.604.845	<i>2012</i>
2013	10.819.128	10.819.128	<i>2013</i>
2014	-	-	<i>2014</i>
2015	381.563.183	381.563.183	<i>2015</i>
2016	162.202.769	162.202.769	<i>2016</i>
2017	152.765.842	-	
Subtotal	707.350.922	558.189.925	<i>Sub-total</i>
Entitas anak			<i>Subsidiaries</i>
Pajak Pertambahan Nilai			<i>Value Added Tax</i>
2015	-	6.057.068	<i>2015</i>
2016	1.938.178	2.702.299	<i>2016</i>
2017	55.805.513	-	<i>2017</i>
Pajak penghasilan			<i>Income tax</i>
2015	-	39.668.789	<i>2015</i>
2016	51.036.946	62.343.205	<i>2016</i>
2017	23.655.197	-	<i>2017</i>
Subtotal	132.435.834	110.771.361	<i>Sub-total</i>
Total	839.786.756	668.961.286	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Perusahaan			The Company
Pajak Pertambahan Nilai	242.891.067	67.812.520	Value Added Tax
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 4(2)	1.763.970	3.892.268	Article 4(2)
Pasal 21	35.670.113	14.238.446	Article 21
Pasal 22	149.655	272.974	Article 22
Pasal 23	2.827.206	4.899.252	Article 23
Pasal 25	9.750.759	9.750.759	Article 25
Lainnya	232.365	1.638.468	Others
Subtotal	293.285.135	102.504.687	Sub-total
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak Pertambahan Nilai	28.066.349	17.782.613	Value Added Tax
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 4(2)	7.957.221	12.862.956	Article 4(2)
Pasal 21	32.584.984	16.552.497	Article 21
Pasal 23	10.267.297	6.998.683	Article 23
Pasal 25	18.925.251	19.639.316	Article 25
Pasal 29	46.144.257	16.588.380	Article 29
Lainnya	4.689.505	2.648.000	Others
Subtotal	148.634.864	93.072.445	Sub-total
Total	441.919.999	195.577.132	Total

c. Pajak penghasilan badan

c. Corporate income tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi pajak pada tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before corporate income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated tax loss in 2017 and 2016 are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.473.582.232	1.787.118.539	Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi:			Less:
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	872.875.833	812.616.869	Income before corporate income tax of subsidiaries
Pendapatan kena pajak final	2.794.415.508	2.035.584.940	Income subject to final tax
Rugi sebelum pajak penghasilan badan - Perusahaan	(1.193.709.109)	(1.061.083.270)	Loss before corporate income tax expenses - the Company

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2017	2016
<u>Beda temporer:</u>		
Penyisihan imbalan kerja karyawan	34.955.657	39.381.829
Penyisihan penurunan nilai piutang	17.336.042	1.867.344
Amortisasi aset lain-lain	(143.615)	(34.522.812)
Penyusutan aset tetap	(158.527.508)	(186.230.511)
<u>Beda permanen:</u>		
Beban bunga	360.367.032	626.669.833
Beban umum	139.837.727	85.663.145
Beban kesejahteraan karyawan	137.087.228	63.742.886
Beban promosi	44.989.477	27.451.336
Beban administrasi	23.653.355	20.654.403
Bagian laba entitas asosiasi	(33.427.601)	(215.165.602)
Lainnya	124.229.410	213.024.472
Subtotal	690.357.204	642.536.323
Taksiran rugi pajak	(503.351.904)	(418.546.947)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan badan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan badan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2017	2016
Laba sebelum pajak penghasilan Badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.473.582.232	1.787.118.539
Dikurangi: Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	872.875.833	812.616.869
Pendapatan kena pajak final	2.794.415.508	2.035.584.940
Rugi sebelum pajak penghasilan badan - Perusahaan	(1.193.709.108)	(1.061.083.270)
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	(298.427.277)	(265.270.818)
Dampak perbedaan permanen: Beban bunga	90.091.758	156.667.458
Beban umum	34.959.432	21.415.786
Beban kesejahteraan karyawan	34.271.807	15.935.721
Beban promosi	11.247.369	6.862.834
Beban administrasi	5.913.339	5.163.601
Bagian laba entitas asosiasi	(8.356.900)	(53.791.400)
Lainnya	31.057.353	53.256.118
Perusahaan	(99.243.119)	(59.760.700)
Entitas anak	367.098.332	309.664.468
Beban pajak penghasilan badan	267.855.213	249.903.768

21. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax (continued)

<u>Temporary differences:</u>	
Provision for employee benefits	
Provision for impairment of receivables	
Amortization of other assets	
Depreciation of fixed assets	
<u>Permanent differences:</u>	
Interest expenses	
General expenses	
Employees social welfare expenses	
Promotion expenses	
Administration expenses	
Income portion from associates	
Others	
Sub-total	
Estimated tax loss	

Reconciliation between corporate income tax expenses and the theoretical tax amount on profit before corporate income tax using the applicable tax rate is as follows:

Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income	
Less:	
Income before corporate income tax of subsidiaries	
Income subject to final tax	
Loss before corporate income tax expenses - the Company	
Income tax calculated at applicable rate	
Effect of permanent differences:	
Interest expenses	
General expenses	
Employees social welfare expenses	
Promotion expenses	
Administration expenses	
Income portion from associates	
Others	
The Company	
Subsidiaries	
Corporate income tax expense	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

c. Corporate income tax (continued)

Perhitungan taksiran rugi pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 di atas akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2017.

The above calculation of estimated fiscal loss for the year ended December 31, 2017 will be used as a basis in filling the 2017 annual corporate income tax return.

d. Rincian beban pajak penghasilan dan final adalah sebagai berikut:

d. The details of Income tax expenses and final tax expenses are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Beban pajak final			Final tax expense
Perusahaan	260.054.566	216.744.083	The Company
Entitas anak	85.168.378	36.434.465	Subsidiaries
Subtotal	345.222.944	253.178.548	Sub-total
Beban pajak penghasilan badan Kini			Corporate income tax expense Current
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	291.831.888	237.965.664	Subsidiaries
Subtotal	291.831.888	237.965.664	Sub-total
Tanggungan			Deferred
Perusahaan	(17.127.068)	13.985.473	The Company
Entitas anak	(6.849.607)	(2.047.369)	Subsidiaries
Subtotal	(23.976.675)	11.938.104	Sub-total
Total	267.855.213	249.903.768	Total

e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

e. The calculation of current income tax expense - current year and estimated overpayment and underpayment of corporate income tax are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Taksiran penghasilan kena pajak			Estimated taxable income
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	1.167.327.552	951.862.656	Subsidiaries
Jumlah taksiran penghasilan kena pajak	1.167.327.552	951.862.656	Total estimated taxable income
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan			Corporate income tax expense - current
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	291.831.888	237.965.664	Subsidiaries
Jumlah beban pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	291.831.888	237.965.664	Corporate income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

- e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

- e. The calculation of current income tax expense - current year and estimated overpayment and underpayment of corporate income tax are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka			<i>Less prepaid income tax</i>
Perusahaan	152.765.842	162.202.769	<i>The Company</i>
Entitas anak	55.322.455	283.720.489	<i>Subsidiaries</i>
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka	208.088.297	445.923.258	<i>Total prepaid income tax</i>
Taksiran hutang pajak penghasilan - Pasal 29			<i>Estimated income tax payable - Article 29</i>
Perusahaan	-	-	<i>The Company</i>
Entitas anak	46.144.257	16.588.380	<i>Subsidiaries</i>
Total	46.144.257	16.588.380	Total
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan			<i>Estimated claims for tax refund</i>
Perusahaan	152.765.842	162.202.769	<i>The Company</i>
Entitas anak	23.655.197	62.343.205	<i>Subsidiaries</i>
Total	176.421.039	224.545.974	Total

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam Kelompok Usaha menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, entities within the Group calculate and pay tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

f. Pajak tangguhan

f. Deferred taxes

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017/Year Ended December 31, 2017						
Dibebankan pada/Charged to						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive income	Ekuitas/ Equity	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset Pajak Tangguhan						Deferred Tax Assets
Entitas anak	37.017.244	6.947.784	170.250	509.256	44.644.534	Subsidiaries
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
Perusahaan						The Company
Penyusutan	(622.282.269)	(16.655.469)	-	-	(638.937.738)	Depreciation
Amortisasi	(3.092.456)	(2.933.946)	-	-	(6.026.402)	Amortization
Penyisihan penurunan nilai piutang	69.212.356	4.334.010	-	-	73.546.366	Provision for impairment of receivables
Penyisihan imbalan kerja karyawan	241.692.952	32.382.472	39.036.775	-	313.112.199	Provision for employee benefits
Subtotal	(314.469.417)	17.127.067	39.036.775	-	(258.305.575)	Sub-total
Entitas anak	(42.404.563)	(696.700)	(6.773)	114.127	(42.993.909)	Subsidiaries
Total	(356.873.980)	16.430.367	39.030.002	114.127	(301.299.484)	Total
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016/Year Ended December 31, 2016						
Dibebankan pada/Charged to						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive income	Ekuitas/ Equity	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset Pajak Tangguhan						Deferred Tax Assets
Entitas anak	15.271.329	4.680.172	5.174.143	11.891.600	37.017.244	Subsidiaries
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
Perusahaan						The Company
Penyusutan	(563.964.713)	(46.557.628)	-	(11.759.928)	(622.282.269)	Depreciation
Amortisasi	569.072	(8.630.703)	-	4.969.175	(3.092.456)	Amortization
Penyisihan penurunan nilai piutang	71.015.102	466.836	-	(2.269.582)	69.212.356	Provision for impairment of receivables
Penyisihan imbalan kerja karyawan	147.421.453	9.845.457	44.475.143	39.950.899	241.692.952	Provision for employee benefits
Subtotal	(344.959.086)	(44.876.038)	44.475.143	30.890.564	(314.469.417)	Sub-total
Entitas anak	(45.001.350)	(2.632.803)	171.780	5.057.810	(42.404.563)	Subsidiaries
Total	(389.960.436)	(47.508.841)	44.646.923	35.948.374	(356.873.980)	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak

Perusahaan

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2014

Pada tanggal 14 April 2016, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2014 sebesar Rp69.931.880. Pada tanggal 17 Mei 2016, Perusahaan menerima pengembalian sebesar Rp69.916.265 atas lebih bayar tersebut, setelah dikompensasikan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) tahun 2012 sebesar Rp15.615.

Pada tanggal 22 April 2016, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2014 sebesar Rp115.722.921 dari yang dilaporkan di surat pemberitahuan pajak sebesar Rp116.163.369. Perusahaan menyetujui ketetapan pajak lebih bayar atas PPN tersebut dan mengakui selisih atas perbedaannya sebesar Rp440.448 sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Pada tanggal 21 Mei 2016, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN tahun 2014 sebesar Rp3.966.482 dan diakui sebagai bagian dari beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2015

Pada tanggal 20 April 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pajak penghasilan badan tahun 2015 sebesar Rp805.287.733.

Pada tanggal 18 Juli 2017, Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut.

Sebagai hasil keberatan Perusahaan tersebut pada tanggal 22 Desember 2017 diterbitkan SKPKB kedua sebesar Rp614.304.124.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan sedang dalam proses pengajuan banding ke pengadilan pajak.

21. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter

The Company

Tax assessment for fiscal year 2014

On April 14, 2016, the Company received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on corporate income tax for 2014 amounting to Rp69,931,880. On May 17, 2016, the Company received a refund amounting to Rp69,916,265 on such overpayment, after being compensated with Tax Collection Letters ("STP") for 2012 amounting to Rp15,615.

On April 22, 2016, the Company received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on Value Added Tax ("PPN") for 2014 amounting to Rp115,722,921 against the overpayment reported in tax return of Rp116,163,369 as reported in the tax return. The Company accepted this overpayment assessment for PPN and recognized the differences of Rp440,448 as expense in the current statements of profit or loss and other comprehensive income.

On May 21, 2016, the Company received an Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") on VAT for fiscal year 2014 amounted to Rp3,966,482 and recognized as part of expense, in the current statements of profit or loss and other comprehensive income.

Tax assessment for fiscal year 2015

On April 20, 2017, the Company received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on corporate income tax for 2015 amounting to Rp805,287,733.

On July 18, 2017, the Company has filled an objection to the DJP for the SKPKB.

As a result of the Company's objection on December 22, 2017, the Company received a second SKPKB amounted to Rp614,304,124.

Until the date of the completion of this consolidated financial statement, the Company is still in the process of filing an appeal to tax court.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

IPC TPK

Pada tanggal 24 Mei 2017, IPC TPK menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan badan tahun 2015 sebesar Rp3.063.854 dengan rincian jumlah pajak penghasilan terutang Rp2.438.761, koreksi atas restitusi pajak tahun 2015 yang dilaporkan sebesar Rp152.302 dan sanksi pajak Rp777.395. Selisih atas hasil pemeriksaan pajak tersebut sebesar Rp317.627 telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahun berjalan. IPC TPK telah melunasi tagihan pajak tersebut pada tanggal 16 Juni 2017.

Pada tanggal 24 Mei 2017, IPC TPK menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN tahun 2015 berupa pokok dan bunga sebesar Rp2.199.153 dari yang dilaporkan pada surat pemberitahuan pajak tahun 2014 sebesar Rp1.060.000. Selisih atas hasil pemeriksaan pajak tersebut sebesar Rp1.139.153 telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahun berjalan. IPC TPK telah membayar tagihan pajak tersebut sebesar Rp1.518.468 pada tanggal 16 Juni 2017. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, IPC TPK masih dalam proses pengajuan keberatan atas SKPKB tersebut.

MTI

Pada tanggal 25 April 2016, MTI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas PPh 23 dan PPh 25 tahun 2014 sebesar Rp10.691.727 dari yang dilaporkan pada surat pemberitahuan pajak tahun 2014 sebesar Rp20.888.914. Pada tanggal 26 Mei 2016, MTI telah menerima pengembalian lebih bayar tersebut. Pada tanggal 22 Juli 2016, MTI mengajukan keberatan atas sisa lebih bayar tersebut berdasarkan Surat No. KU.192/22/7/I/MTI.2016. Pada tanggal 11 Juli 2017, MTI menerima surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00640/KEB/WPJ.19/2017 yang berisi tambahan lebih bayar yang akan dikembalikan kepada MTI sebesar Rp11.861. Pada tanggal 10 Oktober 2017, MTI mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut berdasarkan Surat No. KU.192/10/10/I/mti-2017.

21. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

IPC TPK

On May 24, 2017, the Company received Tax Assessment Letter of Underpayment (SKPKB) for corporate income tax of 2015 amounting to Rp3,063,854 with details of income tax payable amounting to Rp2,438,761, correction on 2015 reported tax refund amounting to Rp152,302 and tax penalty amounting to Rp777,395. The difference resulting from the tax audit amounting to Rp317,627 has been charged to the current year statement of income and income. IPC TPK has settled the tax bill on June 16, 2017.

On May 24, 2017, IPC TPK received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on PPN for 2015 in the form of principal and interest amounting to Rp2,199,153 against underpayment reporting amounting to Rp1,060,000. The difference resulting from the tax audit amounting to Rp 1,139,153 has been charged to the current year statement of income and income. IPC TPK has paid the tax bill amounting to Rp1,518,468 on June 16, 2017. Until the completion date of the consolidated financial statements, IPC TPK on process filled the objection.

MTI

On April 25, 2016, MTI received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") on income tax article 23 and 25 for 2014 amounting to Rp10,691,727 against the overpayment reported in tax return of Rp20,888,914. On May 26, 2016, MTI has received the overpayment. On July 22, 2016, MTI filled an objection on the remaining overpayment based on MTI's letter No. KU.192/22/7/I/MTI.2016. On July 11, 2017, MTI received the Decree of the Director General of Taxation No. KEP-00640/KEB/WPJ.19/2017 which contains additional overpayment to be returned to MTI amounting Rp11,861. On October 10, 2017, MTI appealed against the Decree of the Director General of Taxation based on Company's letter No. KU.192/10/10/I/mti-2017.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

MTI (lanjutan)

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, MTI belum menerima hasil keputusan atas banding tersebut.

Pada tanggal 9 Mei 2017, MTI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN tahun 2013 berupa pokok dan bunga sebesar Rp2.795.914. Pada tanggal 7 Agustus 2017, Perusahaan mengajukan keberatan atas sisa kurang tersebut berdasarkan Surat No. KU.192/7/8/1/mti-2017. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, MTI belum menerima hasil keputusan atas keberatan tersebut.

Pada tanggal 9 Mei 2017, MTI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan tahun 2013 berupa pokok dan bunga sebesar Rp37.746.806 dan telah dibayar sebesar Rp4.485.294 pada tanggal 7 Agustus 2017 dan telah dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain MTI. Pada tanggal 7 Agustus 2017, Perusahaan mengajukan keberatan atas sisa kurang tersebut berdasarkan Surat No. KU.192/7/8/2/mti-2017. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, MTI belum menerima hasil keputusan atas keberatan tersebut.

Pada tanggal 20 Juni 2017, MTI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan tahun 2015 sebesar Rp2.792.602 dari yang dilaporkan pada surat pemberitahuan pajak tahun 2015 dengan posisi lebih bayar sebesar Rp14.570.141. Pada tanggal 19 September 2017, MTI mengajukan keberatan atas sisa lebih bayar tersebut berdasarkan Surat No. 192/15/9/13/mti-2017. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, MTI belum menerima hasil keputusan atas keberatan tersebut.

21. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

MTI (continued)

Until the completion date of the consolidated financial statements, MTI has not yet received the decision on the appealed.

On May 9, 2017, MTI received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on PPN for 2013 in the form of principal and interest amounting to Rp2,795,914. On August 7, 2017, MTI filled an objection on the remaining underpayment based on MTI's letter No. KU.192/7/8/1/mti-17. Until the completion date of the financial statements, MTI has not yet received the decision on the objection.

On May 9, 2017, MTI received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on corporate income tax for 2013 in the form of principal and interest amounting to Rp37,746,806 and have been paid by MTI amounting to Rp4,485,295 on August 7, 2017 and was recorded as part of "Current Tax Expense" in MTI's statement of profit or loss and other comprehensive income. On August 7, 2017, MTI filled an objection on the remaining underpayment based on MTI's letter No. KU.192/7/8/2/mti-17. Until the completion date of the financial statements, MTI has not yet received the decision on the objection.

On June 20, 2017, MTI received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on corporate income tax for 2015 amounting to Rp2,792,602 against the overpayment reported in tax return of Rp14,570,141. On September 19, 2017, MTI filled an objection on the remaining underpayment based on MTI's letter No. 192/15/9/13/mti-17. Until the completion date of the financial statements, MTI has not yet received the decision on the objection.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

PTP

Pada tanggal 15 Juni 2017, PTP menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Kantor pajak untuk masa pajak Januari - Desember 2014 untuk Pajak Penghasilan Badan dengan jumlah sebesar Rp432.695.390 (nilai penuh) dan telah dibayar oleh PTP pada tanggal 14 Juli 2017 dan telah dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PTP.

Pada tanggal 15 Juni 2017, PTP menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Kantor pajak untuk masa pajak Januari - Desember 2014 untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan jumlah sebesar Rp1.418.167.354 (nilai penuh) dan telah dibayar oleh PTP pada tanggal 14 Juli 2017 dan telah dicatat sebagai bagian dari "Beban Operasi Lainnya" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

PMLI

Pada tanggal 18 Juli 2017, PMLI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penghasilan pasal 23 tahun 2015 sebesar Rp3.005.937. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, PMLI masih dalam proses pengajuan keberatan atas SKPKB tersebut.

Pada tanggal 18 Juli 2017, PMLI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2015 sebesar Rp323.115. Pada tanggal 25 Oktober 2017, PMLI telah menerima pengembalian lebih bayar sebesar Rp193.165 setelah dikompensasikan dengan utang pajak penghasilan pasal 21, 23, 26 dan PPN sebesar Rp129.949.

21. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

PTP

On June 15, 2017, PTP received Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) from the Tax Office for fiscal period January - December 2014 for Corporate Income Tax amounting to Rp432,695,390 (full amount) and has been paid by PTP on July 14, 2017 and was recorded as part of "Current Tax Expense" in the PTP's statements of profit or loss and other comprehensive income.

On June 15, 2017, PTO received Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) from the Tax Office for fiscal period January - December 2014 for Income Tax Article 23 amounting to Rp1,418,167,354 (full amount) and has been paid by the Company on July 14, 2017 and was recorded as part of "Other Operating Expenses" in statements of profit or loss and other comprehensive income.

PMLI

On July 18, 2017, PMLI received an Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") on Value Added Tax ("VAT") and income tax article 23 for fiscal year 2015 amounting to Rp3,005,937. Until the date of the completion of this consolidated financial statement, PMLI is still in the process of filing an objection letter for SKPKB.

On July 18, 2017, PMLI received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPKB") on Corporate Income Tax ("CIT") for fiscal year 2015 amounting to Rp323,115. On October 25, 2017, PMLI has received this overpayment assessment amounting to Rp193,165 after being compensated with income tax payable of articles 21, 23, 26 dan VAT amounting to Rp129,949.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Insentif Pajak

Pada bulan Desember 2015, Perusahaan memanfaatkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V dalam bentuk insentif pajak untuk penilaian kembali aktiva tetap sebagaimana diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 191/PMK.010/2015 jo PMK No. 233/PMK.03/2015. Sesuai dengan PMK tersebut, Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dalam jangka waktu sejak berlakunya PMK tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Perlakuan khusus tersebut berupa PPh yang bersifat final berkisar 3%-6% atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula.

Pada tanggal 18 Desember 2015, Perusahaan telah mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan hasil perkiraan penilaian kembali sendiri dan telah melunasi PPh Final terkait sebesar Rp162.202.982. Sesuai PMK, nilai aktiva tetap hasil perkiraan penilaian kembali sendiri harus dilakukan penilaian kembali dan ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik ("KJPP") atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, paling lambat tanggal 31 Desember 2016. Setelah meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan, DJP dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima lengkap dapat menerbitkan surat keputusan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap. Perusahaan mencatat dan menyajikan pembayaran PPh Final tersebut sebagai Pajak Dibayar di Muka.

Berdasarkan surat dari DJP tanggal 21 Februari 2017, permohonan penilaian kembali aktiva tetap Perusahaan dianggap batal.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dari DJP tanggal 29 Mei 2017, PPh final yang telah dibayarkan oleh Perusahaan sebesar Rp162.202.982 akan dikompensasikan dengan utang pajak Perusahaan. Pada bulan Desember 2017, PPh final tersebut telah terkompensasi seluruhnya dengan utang pajak Perusahaan.

21. TAXATION (continued)

h. Tax incentives

In December 2015, the Company took advantage of the Economic Policy Package V in the form of tax incentives for fixed assets revaluation as stipulated in the Ministry of Finance Regulation ("PMK") No. 191/PMK.010.2015 jo PMK No. 233/PMK.03/2015. In accordance with the PMK, the Company is allowed to revalue its fixed assets for tax purposes and will obtain special treatment when the application of the revaluation is submitted to Directorate General of Taxation ("DGT") during the period between the effective date of PMK and December 31, 2016. The special treatment is final income tax ranging from 3%-6% on the excess of the revaluation amount of fixed assets over its original net book value.

On December 18, 2015, the Company filed an application for fixed assets revaluation using self-assessed revaluation amount and has paid the related final income tax amounting to Rp162,202,982. Based on the PMK, the self-assessed revaluation amount should be conducted by a public independent appraiser (KJPP) or valuation specialist, which is registered with the Government, before December 31, 2016. Upon verification of the completeness and accuracy of the application, DGT may issue approval letter within 30 days after the receipt of the complete application. The Company recorded and presented the final income tax paid as Prepaid Taxes.

Based on letter from DJP dated February 21, 2017, the Company's application for fixed assets revaluation was considered cancelled.

Based on Payment Instruction Letter for Tax Overpayment (SPMKP) from DJP dated May 29, 2017, the final income tax which had been paid by the Company amounted to Rp162,202,982 will be compensated with the Company's tax payable. On December 2017, the whole final income tax have been compensated with the Company's tax payable.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. UTANG BANK JANGKA PANJANG

22. LONG-TERM BANK LOANS

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Pihak berelasi (Catatan 40k) PT Bank BNI Syariah	1.860.603	3.585.573	Related party (Note 40k) PT Bank BNI Syariah
Bagian lancar utang bank jangka panjang	(1.860.603)	(1.724.970)	Current maturities of long-term bank loans
Total bagian jangka panjang	-	1.860.603	Total long-term portion

PT Bank BNI Syariah

PT Bank BNI Syariah

RSP

Pada tanggal 29 September 2010, RSP memperoleh fasilitas pembiayaan Murabahah dari PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah) dengan jumlah maksimum sebesar Rp19.401.817. Fasilitas ini dikenakan nisbah bagi hasil sebesar 54% dan denda sebesar 5,00% per tahun atas pembiayaan yang belum dilunasi.

RSP

On September 29, 2010, RSP obtained a Murabahah financing facility from PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah) with a maximum facility of Rp19,401,817. This facility bears profit sharing ratio of 54% and penalty fee of 5.00% per annum from the outstanding financing.

Pinjaman tersebut akan diangsur setiap bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2018. Fasilitas tersebut digunakan untuk merenovasi bangunan rumah sakit di Jakarta.

The loan will be paid in monthly installments and will mature on September 28, 2018. This facility is used to renovate the hospital building in Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo terhutang atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp1.860.603 dan Rp3.585.573.

As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding loan balance amounted to Rp1,860,603 and Rp3,585,573, respectively.

23. UTANG OBLIGASI

23. BONDS PAYABLE

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Senior Notes penerbitan tahun 2015 USD1.100.000.000	14.902.800.000	14.779.600.000	Senior Notes issued in 2015 USD1,100,000,000
USD500.000.000	6.774.000.000	6.718.000.000	USD500,000,000
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi	(225.580.023)	(238.764.571)	Less: Unamortized discount
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(74.887.477)	(80.323.161)	Unamortized transaction cost
Utang obligasi - neto	21.376.332.500	21.178.512.268	Bonds payable - net

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

23. BONDS PAYABLE (continued)

Obligasi/Bonds	Pokok Utang/Debt Principal	Penerbit/ Issuer	Tempat Pencatatan/Listed	Tanggal Terbit/Issue Date	Jatuh Tempo/ Due Date	Periode Pembayaran Bunga/Interest Payment Period	Tingkat Bunga per Tahun/ Interest Rate per Annum
Senior Notes due 2025	USD1.100.000.000	Perusahaan/ the Company	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ May 5, 2015	5 Mei 2025/ May 5, 2025	Setengah tahunan/Semi- Annually	4,250%
Senior Notes due 2045	USD500.000.000	Perusahaan/ the Company	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ May 5, 2015	5 Mei 2045/ May 5, 2045	Setengah tahunan/Semi- Annually	5,375%

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus.

The obligation is not guaranteed by any special collateral.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Inc., PT Bahana Securities dan PT Danareksa Sekuritas. Sedangkan yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah The Bank of New York Mellon Corporation.

Acting as the joint bookrunners are Australia and New Zealand Banking Group Limited, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Inc., PT Bahana Securities and PT Danareksa Sekuritas. Whereas, acting as the trustee is The Bank of New York Mellon Corporation.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi telah dipergunakan untuk melunasi pinjaman sindikasi dan akan digunakan untuk rencana ekspansi Perusahaan serta tujuan umum Perusahaan.

Proceeds from the bond offering were used to refinance syndicated loan and will be used for Company's expansion plan and general Corporate purposes.

Pada tanggal 31 Desember 2017, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh Moody's Investors Service, Inc., Standard and Poor's Ratings Group dan Fitch Ratings Ltd. masing-masing adalah Baa3, BB+ dan BBB-.

On December 31, 2017, the Company's bond rating by Moody's Investors Service, Inc., Standard and Poor's Ratings Group and Fitch Ratings Ltd. are Baa3, BB+ and BBB-, respectively.

Berdasarkan *Offering Circular*, Perusahaan tidak diperbolehkan menjaminkan seluruh atau sebagian aset, dan memastikan entitas anaknya untuk tidak menjaminkan seluruh atau sebagian asetnya.

Based on the Offering Circular, the Company is not allowed to lien all or any part of its assets, and ensure that its subsidiaries do not lien all or any part of their assets.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PANJANG

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Premium JICT (Catatan 45e)	2.564.139.271	2.683.401.563
Sewa diterima di muka - NPCT1 (Catatan 44h)	880.201.883	846.468.000
Premium TPK Koja (Catatan 45a)	596.311.458	624.046.875
Sewa tanah dan/atau bangunan: PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Catatan 45j)	700.300.382	664.837.936
PT Jakarta Tank Terminal (Catatan 45k)	39.429.389	73.461.047
PT Tunas Baru Lampung	26.378.403	27.878.596
PT Intiboga Sejahtera	7.529.445	9.082.908
PT Karyatara Cemara Indah	485.000	14.868.946
PT Wilmar Nabati Indonesia	-	12.993.750
Lain-lain	50.984.001	33.245.577
Pendapatan bunga diterima di muka <i>negotiable certificate of deposit</i>	5.025.978	19.118.525
Total	4.870.785.210	5.009.403.723
Bagian lancar (Catatan 18)	(374.604.109)	(254.739.214)
Total bagian jangka panjang	4.496.181.101	4.754.664.509

24. LONG-TERM UNEARNED REVENUE

JICT Premium (Note 45e)
Advance rental fee - NPCT1 (Note 44h)
TPK Koja Premium (Note 45a)
Land rental and/or building: PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Note 45j)
PT Jakarta Tank Terminal (Note 45k)
PT Tunas Baru Lampung
PT Intiboga Sejahtera
PT Karyatara Cemara Indah
PT Wilmar Nabati Indonesia
Others
Unearned interest income from <i>negotiable certificate of deposit</i>
Total
Current portion (Note 18)
Total long-term portion

25. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
<u>Pihak ketiga</u> Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura	219.299.877	221.112.329
<u>Pihak berelasi (Catatan 40i)</u> PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	40.595.467	39.100.734
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	13.531.822	13.033.578
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	-	10.913.578
Subtotal	54.127.289	63.047.890
Total	273.427.166	284.160.219
Bagian lancar	(54.127.289)	(63.047.890)
Bagian jangka panjang	219.299.877	221.112.329

25. OTHER LONG-TERM LIABILITIES

<u>Third party</u> Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapore
<u>Related parties (Note 40i)</u> PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Subtotal
Total
Current portion
Long-term portion

Utang kepada Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., merupakan pinjaman sebesar USD15.096.000 yang diperoleh dan digunakan untuk setoran modal IPC TPK di NPCT1 berikut bunga terutang (Catatan 44e).

Payable to Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., represents loan amounting to USD15,096,000 which was obtained and used by IPC TPK for acquisition of share capital in NPCT1 including the interest payable (Note 44e).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**25. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA
(lanjutan)**

Utang kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) merupakan pinjaman modal kerja yang diberikan kepada Rukindo sesuai Perjanjian No. 22 tanggal 13 Agustus 2007. Pinjaman ini berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga 6,50% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan 3 unit kapal keruk yang terdiri dari KK Natuna, KK Timor dan KK Halmahera.

Berdasarkan Surat No KU.104/1/5/Dirut-2017 perihal Laporan penyelesaian pinjaman modal kepada PT Pelabuhan Indonesia I dan permasalahan bangunan di Belawan tanggal 29 September 2017, Rukindo mempunyai kewajiban kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sampai dengan bulan Agustus 2017 sebesar Rp11.099.383 yang terdiri dari Hutang Pokok sebesar Rp4.550.000 dan Hutang bunga dan denda sebesar Rp6.549.383. Berdasarkan hasil kesepakatan Rukindo hanya membayar hutang pokok sebesar Rp4.550.000, sedangkan hutang bunga dan denda dihapuskan. Atas penghapusan utang bunga dan denda tersebut, Rukindo mencatat laba sebesar Rp6.549.383.

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Kelompok Usaha mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen, PT Sentra Jasa Aktuaria, PT Towers Watson Purbajaga, PT Padma Radya Aktuaria, dan PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Berikut adalah asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam laporan aktuaris independen:

	2017	2016
Tingkat diskonto	7,00% - 7,20%	8,43% - 9,00%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	7,00% - 10,00%	7,00% - 10,00%
Tingkat mortalitas	TMI 2011	TMI 2011
Tingkat cacat tetap (dari tabel mortalitas)	1% - 10%	1% - 10%
Tingkat pengunduran diri	1,00% - 5,00%	1,00% - 5,00%
Usia pensiun normal	55 - 56 tahun/years	55 - 56 tahun/years

25. OTHER LONG-TERM LIABILITIES (continued)

Liabilities to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) represent working capital loan to Rukindo under the Letter of Agreement No. 22 dated August 13, 2007. This agreement is valid for 5 (five) years and bears an annual interest rate of 6.50%. These loans are secured by 3 unit of dredgers consisting of KK Natuna, KK Timor and KK Halmahera.

Based on Letter No KU.104/1/5/Dirut-2017 regarding capital loan report to PT Pelabuhan Indonesia I and building issues in Belawan dated September 29, 2017, Rukindo has a liability to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) until August, 2017 amounting to Rp11,099,383 consisting of principal of Rp4,550,000 and interest payable and penalties of amounting to Rp6,549,383. Based on the agreement, Rukindo will only pay the principal amount Rp4,550,000 while the interest payable and penalties are eliminated. On the write-off of interest and penalty, Rukindo recorded gain amounting to Rp6,549,383.

26. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

As of December 31, 2017 and 2016, the Group recorded employee benefits liabilities based on actuarial computations performed by independent actuaries, PT Sentra Jasa Aktuaria, PT Towers Watson Purbajaga, PT Padma Radya Aktuaria, dan PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa, using the "Projected Unit Credit" method.

The basic assumptions used by the independent actuaries are as follows:

Discount rate
Salary increase projection rate
Mortality rate
Permanent disability rate (from mortality table)
Level resignation
Normal pension age

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Perusahaan		
Program pensiun	114.148.670	88.990.604
Program penghargaan masa bhakti	670.427.967	562.494.329
Program kesehatan pensiunan	698.738.087	643.980.938
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	27.223.534	30.785.350
Subtotal	1.510.538.258	1.326.251.221
Entitas anak		
Program pensiun, penghargaan masa bhakti dan imbalan pasca-kerja lainnya	295.571.068	227.908.090
Total	1.806.109.326	1.554.159.311

a. Program Pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan pensiun untuk karyawan tetap yang dipekerjakan pada tahun 2001 dan sebelumnya dan dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4).

Liabilitas imbalan kerja dan pencadangan biaya imbalan kerja atas program pensiun ini adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Nilai kini liabilitas	528.186.379	531.330.645
Nilai wajar aset program	(414.037.709)	(442.340.041)
Defisit program	114.148.670	88.990.604
Dampak batas atas aset	-	-
Liabilitas yang diakui	114.148.670	88.990.604

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,	
	2017	2016
Biaya jasa kini	5.346.879	4.825.087
Biaya bunga	7.564.201	1.352.566
Beban yang diakui	12.911.080	6.177.653

26. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

The employee benefit liabilities are as follows:

The Company
Pension program
Gratuity and compensation benefits
Pension healthcare program
Other long-term employee benefits
Sub-total
Subsidiaries
Pension program, gratuity and compensation benefits and other post-benefits program
Total

a. Pension Program

The Company has a pension benefit plan covering permanent employees hired in and before 2001 and managed by Dana Pensiun Pelabuhan dan Pengerukan (DP4).

Employee benefits liabilities and employee benefits expenses for the pension program are as follows:

Present value of liabilities
Fair value of plan assets
Deficit in plan
Effect of asset ceiling
Recognized liabilities
Current service cost
Interest cost
Recognized expense

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

26. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

a. Program Pensiun (lanjutan)

a. Pension Program (continued)

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2017	2016	
Liabilitas awal tahun	88.990.604	15.028.513
Beban yang diakui dalam laba rugi	12.911.080	6.177.653
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	48.985.289	70.430.568
luran pemberi kerja	(36.738.303)	(2.646.130)
Liabilitas akhir tahun	114.148.670	88.990.604
Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2017	2016	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	531.330.645	518.572.305
Biaya jasa kini	5.346.879	4.825.087
Biaya bunga	45.163.105	46.671.508
luran peserta program	1.102.185	1.016.960
Ekspektasi pembayaran imbalan	(88.194.506)	(74.876.100)
Keuntungan aktuarial	33.438.071	35.120.885
Nilai kini liabilitas akhir tahun	528.186.379	531.330.645
Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
2017	2016	
Nilai wajar aset program awal tahun	442.340.041	503.543.792
Imbal hasil ekspektasian aset program	37.598.904	45.318.941
luran pemberi kerja	36.738.303	2.646.130
luran peserta program	1.102.185	1.016.960
Imbalan yang dibayarkan	(88.194.506)	(74.876.100)
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(15.547.218)	(35.309.682)
Nilai wajar aset program akhir tahun	414.037.709	442.340.041

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2017 and 2016 is as follows:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Jatuh tempo <= 1 tahun	22.433.371	11.346.973	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	39.140.147	36.629.464	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	255.635.418	286.070.546	Maturity > 5 years
Total	317.208.936	334.046.983	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun (lanjutan)

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2017 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	(18.410.182)	23.160.209	<i>Present value of liabilities</i>
Biaya jasa kini	(837.542)	1.057.621	<i>Current service cost</i>

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2017 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	9.000.392	(8.254.552)	<i>Present value of liabilities</i>
Biaya jasa kini	429.374	(392.542)	<i>Current service cost</i>

b. Penghargaan masa bhakti

Manfaat yang diperhitungkan dalam penghargaan masa bhakti mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Dana Pensiun. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan dengan definisi gaji yang meliputi gaji merit dan tunjangan perumahan. Program ini tidak didanai.

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Nilai kini liabilitas	670.427.967	562.494.329	<i>Present value of liabilities</i>
Nilai wajar aset program	-	-	<i>Fair value of plan assets</i>
Liabilitas yang diakui	670.427.967	562.494.329	<i>Recognized liabilities</i>

26. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

a. Pension Program (continued)

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2017:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	(18.410.182)	23.160.209	<i>Present value of liabilities</i>
Biaya jasa kini	(837.542)	1.057.621	<i>Current service cost</i>

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2017:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	9.000.392	(8.254.552)	<i>Present value of liabilities</i>
Biaya jasa kini	429.374	(392.542)	<i>Current service cost</i>

b. Gratuity and compensation benefits

Benefits that are calculated in the gratuity and compensation benefits refer to the Collective Labor Agreement and the Regulations of the Pension Fund. Participants are all permanent employees of the company with the salary definition including merit pay and housing allowance. This program is not funded.

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Biaya jasa kini	55.648.979	42.837.737	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	47.812.018	40.126.780	<i>Interest cost</i>
Keuntungan aktuarial	(31.452)	-	<i>Actuarial gain</i>
Beban imbalan kerja lain	-	81.262	<i>Other employee benefit cost</i>
Beban yang diakui	103.429.545	83.045.779	<i>Recognized expense</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

26. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

b. Penghargaan masa bhakti (lanjutan)

b. Gratuity and compensation benefits (continued)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Liabilitas awal tahun	562.494.329	445.853.111	Liabilities at beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	103.429.545	83.045.779	Expense recognized in profit or loss
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	45.588.942	89.373.030	Expense (income) recognized in the other comprehensive income
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(41.084.849)	(55.777.591)	Current year benefit payment
Liabilitas akhir tahun	670.427.967	562.494.329	Liabilities at end of year

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	562.494.329	445.853.111	Present value of liabilities - beginning of year
Biaya jasa kini	50.976.205	40.914.660	Current service cost
Biaya bunga	47.812.018	40.126.780	Interest cost
Ekspektasi pembayaran imbalan	(41.084.849)	(55.777.591)	Expected benefit payments
Kerugian aktuarial	45.557.491	89.454.291	Actuarial loss
Biaya jasa lalu	4.672.773	1.923.078	Past service cost
Nilai kini liabilitas akhir tahun	670.427.967	562.494.329	Present value of liabilities - end of year

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2017 and 2016 is as follows:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Jatuh tempo <= 1 tahun	37.374.774	39.403.168	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	145.968.847	136.895.976	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	5.120.358.662	5.151.759.431	Maturity > 5 years
Total	5.303.702.283	5.328.058.575	Total

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2017 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2017:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	(59.098.529)	69.203.799	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	(6.287.614)	7.640.418	Current service cost

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Penghargaan masa bhakti (lanjutan)

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2017 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	67.073.673	(58.341.625)	<i>Present value of liabilities</i>
Biaya jasa kini	7.402.555	(6.203.970)	<i>Current service cost</i>

c. Program kesehatan pensiunan

Perusahaan memberikan imbalan kerja berupa program kesehatan pensiunan dan keluarga (termasuk anak dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang maksimal berumur 25 tahun). Program tersebut berupa bantuan pengobatan dari Perusahaan dalam jumlah tertentu dan telah terdaftar di Perusahaan. Program ini tidak didanai.

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Nilai kini liabilitas	698.738.087	643.980.938	<i>Present value of liabilities</i>
Nilai wajar aset program	-	-	<i>Fair value of plan assets</i>
Liabilitas yang diakui	698.738.087	643.980.938	Recognized liabilities

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Biaya jasa kini	9.546.420	6.819.010	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	54.738.380	56.542.254	<i>Interest cost</i>
Beban yang diakui	64.284.800	63.361.264	Recognized expense

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Liabilitas awal tahun	643.980.938	628.247.262	<i>Liabilities at beginning of year</i>
Beban yang diakui dalam laba rugi	64.284.800	63.361.264	<i>Expense recognized in profit or loss</i>
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	61.572.867	20.701.426	<i>Expense (income) recognized in the other comprehensive income</i>
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(71.100.518)	(68.329.014)	<i>Current year benefit payment</i>
Liabilitas akhir tahun	698.738.087	643.980.938	Liabilities at end of year

26. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

b. Gratuity and compensation benefits (continued)

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2017:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	67.073.673	(58.341.625)	<i>Present value of liabilities</i>
Biaya jasa kini	7.402.555	(6.203.970)	<i>Current service cost</i>

c. Pension healthcare program

The Company also provides long term post-employment benefits in form of healthcare program for pensioners and family (including up to 3 (three) children with maximum age of 25 years). The program is in the form of medical assistance from the Company in certain amounts and after registering with the Company. This program is not funded.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

26. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

c. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

c. Pension healthcare program (continued)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	643.980.938	628.247.262	Present value of liabilities - beginning of year
Biaya jasa kini	9.546.420	6.819.010	Current service cost
Biaya bunga	54.738.380	56.542.254	Interest cost
Ekspektasi pembayaran imbalan	(71.100.518)	(68.329.014)	Expected benefit payments
Kerugian (keuntungan) aktuarial	61.572.867	20.701.426	Actuarial loss (gain)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	698.738.087	643.980.938	Present value of liabilities - end of year

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2017 dan 2016 is as follows:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Jatuh tempo <= 1 tahun	69.610.653	71.995.565	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	315.032.149	310.309.883	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	773.449.247	666.122.878	Maturity > 5 years
Total	1.158.092.049	1.048.428.326	Total

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	(52.627.610)	61.798.732	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	(1.633.486)	2.100.111	Current service cost

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya

d. Other long-term employee benefits

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa imbalan cuti besar merupakan manfaat yang diperhitungkan mengacu kepada Peraturan Perusahaan. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus dan diberikan bantuan cuti besar sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap. Program ini tidak didanai.

Other long-term permanent employee benefits are in the form of long service leave benefits that are calculated in reference to the Company's Regulation. Participants include all employees that have worked at least 6 (six) years of continuous service and given assistance amounting to 1 (one) time the regular income. This program is not funded.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

26. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

d. Other long-term employee benefits (continued)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Nilai kini liabilitas	27.223.534	30.785.350	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	-	-	Fair value of plan assets
Liabilitas yang diakui	27.223.534	30.785.350	Recognized liabilities

**Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,**

	2017	2016	
Biaya jasa kini	5.027.578	4.616.972	Current service cost
Biaya bunga	2.616.755	1.998.291	Interest cost
Keuntungan aktuarial	9.848.026	-	Actuarial gain
Beban imbalan kerja lain	(7.097.181)	2.544.691	Other employee benefit cost
Beban yang diakui	10.395.178	9.159.954	Recognized expense

**Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,**

	2017	2016	
Liabilitas awal tahun	30.785.350	22.203.232	Liabilities at beginning of year
Beban (penghasilan) yang diakui dalam laba rugi	10.395.177	9.159.954	Expense (income) recognized in profit or loss
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(13.956.993)	(577.836)	Current year benefit payment
Liabilitas akhir tahun	27.223.534	30.785.350	Liabilities at end of year

**Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,**

	2017	2016	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	30.785.350	22.203.232	Present value of liabilities - beginning of year
Biaya jasa kini	5.027.578	4.616.972	Current service cost
Biaya jasa lalu	(7.097.181)	-	Past service cost
Biaya bunga	2.616.755	1.998.291	Interest cost
Ekspektasi pembayaran imbalan	(13.956.993)	(577.836)	Expected benefit payments
Keuntungan aktuarial	9.848.026	2.544.691	Actuarial loss
Nilai kini liabilitas akhir tahun	27.223.535	30.785.350	Present value of liabilities - end of year

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Jatuh tempo <= 1 tahun	3.447.206	6.528.612
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	28.601.437	19.864.923
Jatuh tempo > 5 tahun	163.083.816	168.298.743
Total	195.132.459	194.692.278

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2017 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase
Nilai kini liabilitas	(1.628.880)
Biaya jasa kini	(296.929)

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2017 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase
Nilai kini liabilitas	1.827.277
Biaya jasa kini	333.175

e. Program pensiun iuran pasti

Kelompok Usaha menyediakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sejak tahun 2002. Iuran program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

26. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

d. Other long-term employee benefits (continued)

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2017 and 2016 is as follows:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Jatuh tempo <= 1 tahun	3.447.206	6.528.612	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	28.601.437	19.864.923	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	163.083.816	168.298.743	Maturity > 5 years
Total	195.132.459	194.692.278	Total

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2017:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	(1.628.880)	1.845.473	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	(296.929)	672.986	Current service cost

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2017:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	1.827.277	(1.643.324)	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	333.175	(299.562)	Current service cost

e. Defined contribution plan

The Group provides a defined contribution pension plan for employees hired with permanent status since 2002. The contribution plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah:

Pemegang saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nominal/ Amount	Shareholders
Negara Republik Indonesia	1.444.029	100,00%	1.444.029.000	Republic of Indonesia

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang telah diaktakan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 dari Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., modal dasar Perusahaan sebesar Rp4.000.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.009.958.000 atau sebanyak 1.009.958 saham.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan sebagai berikut:

- 1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp7.652.976.
- 2) Penambahan penyertaan modal negara tersebut berasal dari pengalihan barang milik negara Kementerian Perhubungan berupa dermaga beton hasil kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan Sintete-Sambas, Kalimantan Barat, yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2011 tersebut di atas, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang tertuang dalam Risalah RUPSLB No. RIS-269/MBU/S/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan keputusan sebagai berikut:

- 1) menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (*portepel*) sebesar 7.653 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham sebesar Rp7.653.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

27. SHARE CAPITAL

The Shareholders of the Company as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

Based on General Meeting of Shareholders' held on August 15, 2008 that was notarized through Notarial Deed No. 2 of Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., the Company's authorized capital amounted to Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp1,009,958,000 divided into 1,009,958 shares.

Based on the Regulation of Government of The Republic of Indonesia No.58 Year 2011 dated December 22, 2011 about Additional of Share Capital of The Republic of Indonesia in the Company as follows:

- 1) The additional share capital of the government amounted to Rp7,652,976.
- 2) Additional share capital by the government came from the transfer of concrete jetty owned by Ministry of Transportation as a result of port development activities in Sintete-Sambas, West Kalimantan, provided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (State Revenue (expenditure) budget) in 2005.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 Year 2011, the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company was conducted as stipulated in the Minutes of Meeting No. RIS-269/MBU/S/2012 dated July 18, 2012 with decision as follows:

- 1) approved the disbursement/placement of shares that were still in *portepel* of 7,653 shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share amounting to Rp7,653,000, which was fully taken by the Republic of Indonesia.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. MODAL SAHAM (lanjutan)

- 2) menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan sebesar Rp7.653.000 melalui:
- a) sebesar Rp7.652.976 merupakan penambahan penyertaan modal negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan;
 - b) sebesar Rp24 berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana suratnya nomor 020/LA-PL.II/V/12 tanggal 25 Mei 2012.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 03 tanggal 2 Agustus 2013, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000 yang berasal dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada Rukindo dalam rangka restrukturisasi Rukindo.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp1.017.611.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.

28. MODAL DONASI

Pada tahun 1997, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa tanah dan gedung CDC dari Yayasan Sekar Laut masing-masing sebesar Rp1.820.092 dan Rp23.957.447.

Pada tahun 2009, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa gedung stasiun pandu dari Pemerintah Daerah Cilegon sebesar Rp1.048.443.

27. SHARE CAPITAL (continued)

- 2) approved additional paid-in capital of the Company owned by the Republic of Indonesia amounting to Rp7,653,000 through:
- a) Rp7,652,976 as additional share capital of the government as stated in Government Regulation No. 58 Year 2011 regarding Additional Capital contribution by the Government of the Republic of Indonesia into the Company's share capital;
 - b) Rp24 taken from the Company's reserve capitalization as stated in the 2011 financial statements audited by KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan through letter No. 020/LA-PL.II/V/12 dated May 25, 2012.

Based on the Deed of Minister of SOEs of the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as notarized in the Notarial Deed No. 03 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 2, 2013, the Government of the Republic of Indonesia which in this case was represented by the Minister of SOEs increased its investment in the Company by Rp426,418,000 which was derived from the transfer of the entire share capital owned by the Republic of Indonesia in Rukindo for restructuring of Rukindo.

With the additional capital contribution by the Republic of Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company changed from Rp1,017,611,000 to Rp1,444,029,000.

28. DONATED CAPITAL

In 1997, the Company received donated capital in the form of land and CDC building from Yayasan Sekar Laut amounting to Rp1,820,092 and Rp23,957,447.

In 2009, the Company received donated capital in form of pilotage station building from the Local Government of Cilegon amounting to Rp1,048,443.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

29. NON-CONTROLLING INTERESTS

	Aset Neto/Net Assets		Laba (Rugi) Neto/ Net Income (Loss)		
	31 Desember/ December 31,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2017	2016	2017	2016	
JAI	425.255.065	35.663	12.025	14.074	JAI
EDII	52.588.551	48.611.571	18.459.497	17.661.762	EDII
ILCS	43.178.878	41.986.993	1.370.241	2.046.506	ILCS
EPI	42.696.265	38.092.295	5.731.392	5.638.599	EPI
MTI	5.780.912	5.936.487	224.824	439.517	MTI
API	1.384.887	748.509	(144.056)	(118.300)	API
RSP	817.908	400.205	113.586	41.960	RSP
PTP	57.699	44.231	40.134	34.077	PTP
IKT	22.733	18.558	13.044	9.846	IKT
PII	1.660	-	766	-	PII
JPPI	(857)	1.647	9	(1.798)	JPPI
Rukindo	(4.448)	(17)	190	1	Rukindo
PMLI	(3.666)	(746)	971	(1.379)	PMLI
PPI	(6.125)	(10.982)	6.993	2.583	PPI
IPC TPK	(11.459)	(12.890)	3.898	(12.452)	IPC TPK
Total	571.758.003	135.851.524	25.833.514	25.754.996	Total

30. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

30. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE

- a. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 02 tanggal 8 Mei 2017 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain:
- penggunaan laba netto konsolidasian Perusahaan tahun buku 2016 sebagai berikut:
 - pembagian dividen tunai sebesar 30% dari laba netto atau sebesar Rp453.437.933.
 - penetapan cadangan sebesar 70% dari laba netto atau sebesar Rp1.058.021.842.

Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 6 Juni 2017.

- a. Based on the General Meeting of Shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 2 on May 8, 2017 of Nanda Fauz Iwan, S.H., the shareholders approved, among others:

- utilization of 2016 consolidated net income of the Company as follows:
 - distribution of cash dividends 30% of net income or amounted to Rp453,437,933.
 - reserve 70% of net income or amounted to Rp1,058,021,842.

The Company has paid the above mentioned dividend on June 6, 2017.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM (lanjutan)

- b. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 7 tanggal 17 Mei 2016 dari Notaris Dewi Sugina Mulyani, S.H., pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain:
- penggunaan laba neto konsolidasian Perusahaan tahun buku 2015 sebagai berikut:
 - Pembagian dividen tunai sebesar 28% dari laba neto atau sebesar Rp371.934.000.
 - Penetapan cadangan sebesar 72% dari laba neto atau sebesar Rp956.401.292.
 - penetapan besaran dana untuk program kemitraan dan bina lingkungan tahun buku 2016 dihitung ekuivalen $\pm 2\%$ dari laba neto tahun 2015, yang sumber dananya dari beban Perusahaan serta sisa saldo dana PKBL dari rangkaian tahun sebelumnya.

Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 15 Juni 2016.

**30. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE
(continued)**

- b. Based on the General Meeting of Shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 7 on May 17, 2016 of Dewi Sugina Mulyani, S.H., the shareholders approved, among others:
- utilization of 2015 consolidated net income of the Company as follows:
 - Distribution of cash dividends 28% of net income or amounted to Rp371,934,000.
 - Reserve 72% of net income or amounted to Rp956,401,292.
 - determination of fund for partnership and social environment development ("PKBL") program year 2016 equivalent $\pm 2\%$ from 2015 net income, which source of fund from the Company's expense and the remaining balance of PKBL fund from previous years.

The Company has paid the above mentioned dividend on June 15, 2016.

31. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

31. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(473.163.054)	(314.567.780)	Remeasurement of defined benefit plans
Pos yang akan direklasifikasi akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	391.851.724	368.242.144	Exchange difference due to financial statements translation
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	8.945.498	-	Changes in fair value of available-for-sale financial assets
Total	(72.365.832)	53.674.364	Total

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan merupakan penjabaran laporan keuangan PPI, JICT, NPCT1 dan TPK Koja yang mata uang fungsionalnya adalah Dolar Amerika Serikat.

Exchange difference due to financial statements translation represents translation of financial statements of PPI, JICT, NPCT1 and TPK Koja which functional currency is United States Dollar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR

32. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	(317.597.475)	(317.597.475)	<i>Difference in value of business combination transaction of entities under common control</i>
<p>Pada tanggal 2 Agustus 2013, Perusahaan menerima pengalihan seluruh saham Rukindo milik Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan nilai pengalihan sebesar Rp426.418.000 (Catatan 27). Atas pengalihan tersebut, Perusahaan memiliki 100% saham Rukindo.</p> <p>Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:</p>			
Aset neto Rukindo pada tanggal pengalihan		108.820.525	<i>Net assets of Rukindo as of transfer date</i>
Nilai pengalihan		426.418.000	<i>Transfer amount</i>
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali		(317.597.475)	<i>Difference in value of business combination transaction of entity under common control</i>

33. PENDAPATAN OPERASI

33. OPERATING REVENUES

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
Pelayanan jasa terminal	2.847.950.697	2.414.954.847	<i>Terminal services</i>
Pelayanan terminal petikemas	2.847.131.118	2.377.756.674	<i>Container services</i>
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	2.799.589.016	1.909.978.903	<i>Land, building, water and electricity services</i>
Pelayanan jasa kapal	1.195.489.590	1.121.302.566	<i>Vessel services</i>
Pelayanan kesehatan	335.466.647	300.326.349	<i>Medical services</i>
Jasa logistik	298.668.383	218.266.187	<i>Logistic services</i>
Pelayanan jaringan dan konsultasi sistem informasi	193.870.458	173.891.053	<i>Network services and consultant of information system</i>
Pengusahaan peralatan	168.490.895	158.673.492	<i>Equipment services</i>
Pelayanan jasa barang	131.748.755	137.146.079	<i>Cargo services</i>
Pendapatan pas pelabuhan	71.867.487	75.590.618	<i>Port entry fee</i>
Pendapatan kebersihan	9.875.661	13.307.812	<i>Cleaning services</i>
Lain-lain	13.818.693	24.870.190	<i>Others</i>
Total	<u>10.913.967.400</u>	<u>8.926.064.770</u>	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan terminal Kalibaru. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

34. CONSTRUCTION REVENUES AND EXPENSES

Construction revenue is the compensation of the service recognized by the Company for construction of Kalibaru terminal. Construction revenue is measured using cost method, which all cost directly attributable to the acquiring cost of the assets.

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Pendapatan konstruksi Terminal Kalibaru	319.744.293	1.392.135.797	Construction revenues Kalibaru terminal
Beban konstruksi Terminal Kalibaru	(319.744.293)	(1.392.135.797)	Construction expenses Kalibaru terminal

35. BEBAN OPERASI

35. OPERATING EXPENSES

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Kerja sama mitra usaha	2.620.350.428	2.073.070.868	Partnership
Pegawai Umum	2.024.354.644	1.754.151.820	Employee General
Penyusutan dan amortisasi	1.115.790.747	915.366.136	Depreciation and amortization
Bahan bakar dan bahan habis pakai	769.787.855	637.003.976	Fuels and supplies
Pemeliharaan	693.717.483	720.895.080	Maintenance
Administrasi kantor	274.442.520	139.210.785	Office administration
Asuransi	102.576.791	110.804.240	Insurance
Lain-lain	55.174.310	59.376.049	Others
	112.087	1.583.031	
Total	7.656.306.865	6.411.461.985	Total

Kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi seperti perusahaan-perusahaan operator fasilitas pelabuhan yang menyediakan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan lift on dan lift off di pelabuhan serta beban pegawai nonorganik.

The partnership expenses mainly represent the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners such as port facilities' management companies for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

Beban umum terutama merupakan beban konsesi, beban jasa konsultan, imbalan kerja, perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan dan pemasaran.

General expenses mainly consist of concession fee, consultants, employee benefits, business travelling, education and training and marketing expenses.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

36. PENDAPATAN OPERASI LAINNYA - NETO

36. OTHER OPERATING INCOME - NET

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Amortisasi premium (Catatan 45a, 45b dan 45e)	146.997.708	146.997.708	Amortization of premium (Notes 45a, 45b and 45e)
Pendapatan denda	23.543.381	19.579.948	Income from penalties
Pendapatan atas pengalihan aset	880.270	106.922.490	Income from assets transfer
Beban pajak penghasilan final	(110.317.575)	(47.595.697)	Final income tax expense
Laba (rugi) selisih kurs - neto	(38.425.742)	26.972.461	Gain (loss) on foreign exchange - net
Beban denda	(24.691.803)	(7.085.917)	Expenses from penalties
Laba (rugi) penjualan aset tetap	(3.949.652)	2.583.001	Gain (loss) on sale of fixed assets
Lain-lain - neto	17.373.434	(39.714.209)	Others - net
Total	11.410.021	208.659.785	Total

37. PENDAPATAN KEUANGAN

37. FINANCE INCOME

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Pendapatan bunga deposito	469.651.024	244.826.776	Interest income from deposits
Pendapatan jasa giro	65.138.304	42.799.006	Interest income on current account
Total	534.789.328	287.625.782	Total

38. BEBAN KEUANGAN

38. FINANCE COSTS

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Beban bunga dan amortisasi diskonto dan biaya transaksi	1.061.854.580	1.042.329.932	Interest expenses and amortization of discount and transaction cost
Beban administrasi	2.281.980	1.055.709	Administration expenses
Total	1.064.136.560	1.043.385.641	Total

39. BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI

39. EQUITY IN INCOME OF ASSOCIATES

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
JICT	34.406.563	215.801.641	JICT
NPCT1	43.601.125	(141.620.960)	NPCT1
CTP (dahulu MTDX)	2.053.125	(750.226)	CTP (formerly MTDX)
TPI	(978.961)	(636.079)	TPI
Total	79.081.852	72.794.376	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

40. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Kelompok Usaha dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengendalian dengan Kelompok Usaha.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

Sifat hubungan berelasi

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Negara Republik Indonesia	Jasa konsesi/ <i>Concession service</i>
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i>
	PT Bank BNI Syariah	Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i>
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Syariah Mandiri	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank BRI Syariah	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational</i>
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational</i>
	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational</i>

40. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group enters into transactions with related parties. Entities are considered to be related if, among these, the entity has the ability, directly or indirectly, to control or jointly control or have significant influence over the Group in making financial and operating decisions. Entities are also considered to be related if they are under common control with the Group.

The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of the Company. All entities that are owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and also entities where the Republic of Indonesia have significant influence are related parties.

Nature of relationship with related parties

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**40. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**40. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity		
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penjualan jasa/Sales
	PT Semen Padang	Penjualan jasa/Sales
	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Penjualan jasa/Sales
	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Dharma Lautan Nusantara	Penjualan jasa/Sales
	Tentara Nasional Indonesia	Penjualan jasa/Sales
	Instansi Pemerintah	Penjualan jasa/Sales
	BPJS Kesehatan	Penjualan jasa/Sales
	PT Indonesia Power	Penjualan jasa/Sales
	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Pupuk Indonesia Logistik	Penjualan jasa/Sales
	PT Graha Sarana Duta	Penjualan jasa/Sales
	PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT BNI Life Insurance	Penjualan jasa/Sales
	PT Bhandas Ghara Reksa (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Pertamina Trans Kontinental (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Adhi Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT Utama Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ Construction services

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**40. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**40. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	PT Nindya Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT BNI Life Insurance	Jasa pension/ Pension services
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan (DP4)	Jasa pension/ Pension services
	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Pinjaman/Loan
	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Pinjaman/Loan
	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Pinjaman/Loan
	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Pinjaman/Loan
Entitas asosiasi/Associate entities	JICT	Sewa dan Royalti/ Rental and Royalty
	TPI	Investasi/Investment
	CTP (dahulu/formerly MTDX)	Investasi/Investment
Operasi bersama/Joint operation	NPCT1	Investasi/Investment
	TPK Koja	Sewa dan Royalti Rental and Royalty

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**40. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**40. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi

Transactions with related parties

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows:

a. Kas dan setara kas (Catatan 4)

a. Cash and cash equivalent (Note 4)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017		31 Desember 2016/ December 31, 2016		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
Bank					Cash in banks
Rupiah					Rupiah
PT Bank Negara					PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk	1.320.332.887	2,81	310.880.360	0,71	Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	922.815.724	1,96	456.881.563	1,05	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat					PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk	107.463.906	0,23	24.182.427	0,06	Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	42.617.879	0,10	141.152.665	0,32	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah	8.806.935	0,02	7.913.493	0,02	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Syariah Mandiri	3.426.562	0,01	3.857.341	0,01	PT Bank Syariah Mandiri
Total	2.405.463.893	5,13	944.867.849	2,17	Total
Dólar AS					US Dollar
PT Bank Negara					PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk	1.251.298.488	2,66	28.119.405	0,06	Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	153.404.369	0,33	122.538.457	0,28	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat					PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk	29.960.840	0,07	18.053.679	0,04	Indonesia (Persero) Tbk
Total	1.434.663.697	3,06	168.711.541	0,38	Total
Euro					Euro
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	908.511	0,01	1.334.868	0,00	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	908.511	0,01	1.334.868	0,00	Total
Deposito					Time Deposits
Rupiah					Rupiah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	555.000.000	1,18	443.000.000	0,98	PT Bank Negara
PT Bank Rakyat					Indonesia (Persero) Tbk
Indonesia (Persero) Tbk	489.011.918	0,58	239.618.201	0,55	PT Bank Rakyat
PT Bank Negara					Indonesia (Persero) Tbk
Indonesia (Persero) Tbk	361.781.994	0,77	427.277.366	0,98	PT Bank Negara
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	84.500.000	0,18	87.500.000	0,20	Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	15.000.000	0,04	10.000.000	0,02	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah	4.000.000	0,01	-	-	PT Bank Syariah Mandiri
Total	1.509.293.912	2,76	1.207.395.567	2,73	Total
Dolar AS					US Dollar
PT Bank Rakyat					PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk	2.271.032.273	4,83	1.764.482.700	4,06	Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara					PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk	1.083.840.000	2,31	4.381.916.270	10,08	Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	806.160.000	1,85	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	3.354.872.273	7,14	6.952.558.970	15,99	Total
Dolar Singapura					Singapore Dollar
PT Bank Rakyat					PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk	447.540.715	0,96	407.239.680	0,94	Indonesia (Persero) Tbk
Total	447.540.715	0,96	407.239.680	0,94	Total

*) dari total aset

*) from total assets

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**40. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**40. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

b. Investasi jangka pendek (Catatan 5)

b. Short-term investment (Note 5)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017		31 Desember 2016/ December 31, 2016		
	Total/ Total	Persentase (%)/ Percentage (%)*)	Total/ Total	Persentase (%)/ Percentage (%)*)	
Deposito berjangka					Time deposits
Rupiah					Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	64.518.592	0,14	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.000.000	0,04	70.000.000	0,16	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dolar AS					US Dollar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.793.440.000	8,06	4.030.800.000	9,27	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.682.504.000	5,70	-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Total	6.560.462.592	13,94	4.100.800.000	9,43	Total
Negotiable certificate of deposits					Negotiable certificate of deposits
Rupiah					Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100.000.000	0,21	-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	100.000.000	0,21	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	200.000.000	0,42	-	-	Total

*) dari total aset

*) from total assets

c. Aset lain-lain (Catatan 16)

c. Other assets (Note 16)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017		31 Desember 2016/ December 31, 2016		
	Total/ Total	Persentase (%)/ Percentage (%)*)	Total/ Total	Persentase (%)/ Percentage (%)*)	
Negotiable certificate of deposits					Negotiable certificate of deposits
Rupiah					Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	100.000.000	0,23	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	100.000.000	0,23	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	-	-	200.000.000	0,46	Total

*) dari total aset

*) from total assets

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**40. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**40. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

d. Piutang usaha (Catatan 6)

d. Trade receivables (Note 6)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017		31 Desember 2016/ December 31, 2016		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
Badan Usaha Milik Negara					State Owned Enterprise
PT Pertamina (Persero)	40.775.356	0,09	23.651.523	0,05	PT Pertamina (Persero)
PT Semen Padang	36.048.133	0,08	8.477.704	0,02	PT Semen Padang
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	20.863.258	0,04	10.531.187	0,02	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	18.152.848	0,04	2.939.312	0,01	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	10.113.683	0,02	4.480.088	0,01	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
PT Djakarta Lloyd (Persero)	7.720.944	0,02	5.480.427	0,01	PT Djakarta Lloyd (Persero)
PT Dharma Lautan Nusantara	6.277.876	0,01	8.419.502	0,02	PT Dharma Lautan Nusantara
PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	6.008.460	0,01	5.501.924	0,01	PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)
BPJS Kesehatan	3.045.006	0,01	5.769.655	0,01	BPJS Kesehatan
PT Pertamina Trans Kontinental	2.280.298	0,01	3.123.967	0,01	PT Pertamina Trans Kontinental
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	823.151	0,00	565.132	0,00	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Indonesia Power	-	-	4.273.656	0,01	PT Indonesia Power
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	-	-	-	-	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	-	-	3.090.863	0,01	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-	-	1.951.341	0,00	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Lain-lain	32.007.713	0,07	26.777.880	0,06	Others
Tentara Nasional Indonesia	16.802.609	0,03	12.523.634	0,03	Indonesian Armed Forces
Instansi Pemerintah	1.191.792	0,00	3.646.663	0,01	Government Institutions
Subtotal	202.111.127	0,43	132.564.540	0,29	Sub-total
Dikurangi:					Less:
Penyisihan penurunan nilai	(52.511.567)	(0,11)	(52.297.053)	(0,12)	Allowance for impairment
Total	149.599.560	0,32	80.267.487	0,17	Total

*) dari total aset

*) from total assets

e. Piutang lain-lain (Catatan 7)

e. Other receivables (Note 7)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017		31 Desember 2016/ December 31, 2016		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
JICT	739.275.370	1,57	85.629.051	0,20	JICT
Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	11.989.210	0,03	11.989.210	0,03	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta
Tentara Nasional Indonesia NPCT1	2.770.893	0,01	836.335	0,00	Indonesia Armed Forces NPCT1
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	826.914	0,00	3.287.358	0,01	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	336.006	0,00	311.380	0,00	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	234.199	0,00	234.199	0,00	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Instansi Pemerintah	230.455	0,00	230.455	0,00	Government Institutions
KOJA	-	-	2.685.218	0,01	KOJA
PT Utama Karya (Persero)	-	-	14.031.524	0,03	PT Utama Karya (Persero)
Lain-lain	-	-	1.550.567	0,00	Others
Lain-lain	20.305.697	0,04	11.720.706	0,02	Others
Subtotal	775.968.744	1,65	132.506.003	0,30	Sub-total
Dikurangi:					Less:
Penyisihan penurunan nilai	(37.656.398)	(0,08)	(24.062.522)	(0,05)	Allowance for impairment
Total	738.312.346	1,57	108.443.481	0,25	Total

*) dari total aset

*) from total assets

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**40. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**40. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

f. Pendapatan masih akan diterima (Catatan 9)

f. Accrued revenues (Note 9)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017		31 Desember 2016/ December 31, 2016		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	16.641.880	0,04	22.879.772	0,05	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Pupuk Indonesia Logistik	6.575.159	0,01	-	0,00	PT Pupuk Indonesia Logistik
PT Graha Sarana Duta	1.554.160	0,00	-	0,00	PT Graha Sarana Duta
JICT	1.510.887	0,00	4.521.709	0,01	JICT
BPJS Kesehatan	-	0,00	34.647.977	0,08	BPJS Kesehatan
Lainnya	291.413	0,00	1.263.184	0,00	Others
Total	26.573.499	0,05	63.312.642	0,14	Total

*) dari total aset

g. Utang usaha (Catatan 17)

g. Trade payables (Note 17)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017		31 Desember 2016/ December 31, 2016		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	664.985.366	2,00	692.739.707	2,19	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Berdikari (Persero)	90.531.500	0,27	-	0,00	PT Berdikari (Persero)
PT Utama Karya (Persero)	66.557.485	0,20	83.937.345	0,27	PT Utama Karya (Persero)
PT Jakarta Internasional Container Terminal	63.655.103	0,19	-	0,00	PT Jakarta Internasional Container Terminal
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	31.355.278	0,09	54.782.497	0,17	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Adhi Karya (Persero)	5.812.695	0,02	26.145.551	0,08	PT Adhi Karya (Persero)
PT Timah Tbk	4.874.800	0,01	-	0,00	PT Timah Tbk
PT Pertamina (Persero)	2.249.120	0,01	643.629	0,00	PT Pertamina (Persero)
PT Waskita Karya (Persero)	2.006.520	0,01	34.882.373	0,11	PT Waskita Karya (Persero)
Lain-lain	67.156.101	0,20	50.906.654	0,16	Others
Total	999.183.968	3,00	944.037.756	2,98	Total

**) dari total liabilitas

h. Uang untuk diperhitungkan (Catatan 18)

h. Advances from customer (Note 18)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017		31 Desember 2016/ December 31, 2016		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	920.947	0,00	920.947	0,00	PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Pertamina (Persero)	569.859	0,00	569.859	0,00	PT Pertamina (Persero)
PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)	552.669	0,00	521.971	0,00	PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero)
PT. Pertamina Trans Kontinental	432.765	0,00	432.765	0,00	PT. Pertamina Trans Kontinental
PT. Semen Padang	343.705	0,00	343.555	0,00	PT. Semen Padang
PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero)	55.689	0,00	55.689	0,00	PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero)
Instansi Pemerintah	18.495	0,00	15.859	0,00	Government Institutions
Tentara Nasional Indonesia	8	0,00	1.553	0,00	Indonesian Armed Forces
Lain-lain	825.980	0,00	1.453.364	0,00	Others
Total	3.720.117	0,00	4.315.562	0,00	Total

**) dari total liabilitas

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**40. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

i. Uang titipan (Catatan 20)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT BNI Life Insurance	7.841.247	0,02
Instansi Pemerintah	1.182.890	0,00
PT Dharma Lautan Nusantara	1.131.091	0,00
PT. Semen Padang	15.904	0,00
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.994	0,00
Tentara Nasional Indonesia Lain-lain	- 6.486.290	- 0,01
Total	16.659.416	0,03

**) dari total liabilitas

j. Liabilitas jangka pendek lainnya dan liabilitas jangka panjang lainnya

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
Jangka pendek (Catatan 20)		
JICT	38.980.725	0,08
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) DP4	31.666.118 -	0,07 -
Total	70.646.843	0,15
Jangka panjang (Catatan 25)		
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	40.595.467	0,09
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	13.531.822	0,03
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	-	-
Total	54.127.289	0,12

**) dari total liabilitas

k. Utang bank jangka panjang (Catatan 22)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**
PT Bank BNI Syariah	1.860.603	0,01

**) dari total liabilitas

l. Remunerasi personal manajemen kunci

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang dibayar atau diakru untuk Dewan Komisaris dan Direksi Kelompok Usaha adalah sebesar Rp131.195.044 dan Rp119.048.348, masing-masing untuk tahun 2017 dan 2016.

**40. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

i. Deposits from customer (Note 20)

	31 Desember 2016/ December 31, 2016		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
9.381.936	0,03	PT BNI Life Insurance	
715.182	0,00	Government Institutions	
1.152.006	0,00	PT Dharma Lautan Nusantara	
508.882	0,00	PT. Semen Padang	
1.994	0,00	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	
13.760	0,00	Indonesian Armed Force	
5.962.172	0,02	Others	
17.735.932	0,05	Total	

**) from total liabilities

j. Other short-term liabilities and other long-term liabilities

	31 Desember 2016/ December 31, 2016		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
Short-term (Note 20)			
JICT	38.980.720	0,12	JICT
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) DP4	31.666.118 8.610.632	0,10 0,02	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) DP4
Total	79.257.470	0,24	Total
Long-term (Note 25)			
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	39.100.734	0,12	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	13.033.578	0,04	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	10.913.578	0,03	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Total	63.047.890	0,19	Total

**) from total liabilities

k. Long-term bank loan (Note 22)

	31 Desember 2016/ December 31, 2016		
	Total/ Total	Persentase (%)**/ Percentage (%)**	
3.585.573	0,01	PT Bank BNI Syariah	

**) from total liabilities

l. Key management personnel remuneration

Total salaries and other short-term benefits paid to or accrued for the Group's Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp131,195,044 and Rp119,048,348 for 2017 and 2016, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**41. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM
MATA UANG ASING**

**41. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

		31 Desember 2017/ December 31, 2017			
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ <i>In foreign currencies (full amount)</i>	Setara dalam Rupiah/ <i>Equivalent in Rupiah</i>		
Aset					Assets
Kas dan setara kas	USD	519.645.030	7.040.150.866		Cash and cash equivalents
	EUR	56.172	908.511		
	SGD	44.164.410	447.540.715		
Investasi jangka pendek	USD	478.369.058	6.480.944.000		Short-term investments
Piutang usaha	USD	6.420.159	86.980.311		Trade receivables
	SGD	7.645	77.472		
Piutang lain-lain	USD	320.728	4.345.217		Other receivables
Total aset			14.060.947.092		Total assets
Liabilitas					Liabilities
Utang obligasi	USD	1.577.822.003	21.376.332.500		Bonds payables
Utang usaha	USD	337.319	4.570.003		Trade payables
Liabilitas jangka pendek lainnya	USD	2.914.453	39.485.008		Other short-term liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.186.882	219.299.877		Other long-term liabilities
Total liabilitas			21.639.687.388		Total liabilities
Liabilitas neto			7.578.740.296		Net liabilities

		31 Desember 2016/ December 31, 2016			
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ <i>In foreign currencies (full amount)</i>	Setara dalam Rupiah/ <i>Equivalent in Rupiah</i>		
Aset					Assets
Kas dan setara kas	USD	765.625.160	10.286.939.646		Cash and cash equivalents
	EUR	94.260	1.334.868		
	SGD	43.794.322	407.239.680		
Investasi jangka pendek	USD	310.000.000	4.165.160.000		Short-term investments
Piutang usaha	USD	8.699.124	116.881.434		Trade receivables
	SGD	7.645	71.091		
Piutang lain-lain	USD	127.763	1.716.623		Other receivables
Total aset			14.979.343.342		Total assets
Liabilitas					Liabilities
Utang obligasi	USD	1.576.251.285	21.178.512.268		Bonds payables
Utang usaha	USD	18.686.632	251.076.273		Trade payables
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.456.708	221.112.329		Other long-term liabilities
Total liabilitas			21.650.700.870		Total liabilities
Liabilitas neto			6.671.357.528		Net liabilities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

42. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

		31 Desember 2017/ December 31, 2017			
		Nilai Tercatat/ Carrying Values	Nilai Wajar/ Fair Value		
Aset Keuangan				Financial Assets	
Kas dan setara kas		14.207.330.332	14.207.330.332	Cash and cash equivalents	
Investasi jangka pendek		6.999.082.698	6.999.082.698	Short-term investments	
Piutang usaha - neto		698.753.677	698.753.677	Trade receivables - net	
Piutang lain-lain - neto		788.078.109	788.078.109	Other receivables - net	
Pendapatan masih akan diterima		330.499.800	330.499.800	Accrued revenues	
Total		23.023.744.616	23.023.744.616	Total	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities	
Utang usaha		1.366.755.174	1.366.755.174	Trade payables	
Beban akrual		2.168.022.495	2.168.022.495	Accrued expenses	
Liabilitas jangka pendek lainnya		261.555.927	261.555.927	Other current liabilities	
Utang obligasi		21.376.332.500	21.376.332.500	Bonds payable	
Utang bank		1.860.603	1.860.603	Bank loans	
Liabilitas jangka panjang lainnya		219.299.877	219.299.877	Other non-current liabilities	
Total		25.393.826.576	25.393.826.576	Total	
		31 Desember 2016/ December 31, 2016			
		Nilai Tercatat/ Carrying Values	Nilai Wajar/ Fair Value		
Aset Keuangan				Financial Assets	
Kas dan setara kas		14.467.875.678	14.467.875.678	Cash and cash equivalents	
Investasi jangka pendek		4.787.160.000	4.787.160.000	Short-term investments	
Piutang usaha - neto		484.271.865	484.271.865	Trade receivables - net	
Piutang lain-lain - neto		140.122.544	140.122.544	Other receivables - net	
Pendapatan masih akan diterima		264.867.153	264.867.153	Accrued revenues	
Aset lain-lain		265.140.288	265.140.288	Other assets	
Total		20.409.437.528	20.409.437.528	Total	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities	
Utang usaha		1.345.757.366	1.345.757.366	Trade payables	
Beban akrual		1.148.153.513	1.148.153.513	Accrued expenses	
Liabilitas jangka pendek lainnya		280.415.071	280.415.071	Other current liabilities	
Utang obligasi		21.178.512.268	21.178.512.268	Bonds payable	
Utang bank		3.585.573	3.585.573	Bank loans	
Liabilitas sewa pembiayaan		635.202	635.202	Finance lease	
Liabilitas jangka panjang lainnya		284.160.219	284.160.219	Other non-current liabilities	
Total		24.241.219.212	24.241.219.212	Total	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**42. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek:

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang termasuk kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha - neto, piutang lain-lain - neto, pendapatan masih akan diterima, utang usaha, beban akrual dan liabilitas jangka pendek lainnya. Nilai wajar instrumen keuangan tersebut dianggap mendekati nilai tercatatnya.

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang:

Instrumen keuangan jangka panjang berasal dari aset lain-lain, utang bank, utang obligasi, liabilitas sewa pembiayaan dan liabilitas jangka panjang lainnya.

Nilai tercatat dari liabilitas bank jangka panjang dengan suku bunga mengambang kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena dinilai ulang secara berkala.

Selain instrumen keuangan yang disebutkan diatas, Kelompok Usaha tidak memiliki aset atau liabilitas lain yang diukur atau diungkapkan dengan nilai wajar, oleh karena itu penilaian nilai wajar berdasarkan PSAK 68 (pengukuran nilai wajar) tidak diperlukan.

**43. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN**

Kelompok Usaha terpengaruh terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga atas arus kas, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kelompok Usaha menerapkan manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Kelompok Usaha. Pengelolaan risiko tersebut memberikan keyakinan kepada Kelompok Usaha bahwa aktivitas keuangan dikelola secara pruden sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

Kelompok Usaha menerapkan kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

**42. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

The methods and assumptions used to estimate the fair value of financial instruments are as follow:

Short-term financial assets and liabilities:

Short-term financial instruments with maturities of one year or less includes cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables - net, other receivables - net, accrued revenues, trade payables, accrued expenses, and other current liabilities. The fair values of these financial instruments are approximately the same with their carrying amounts due to their short-term mature.

Long term financial assets and liabilities:

Long-term financial instruments are derived from other assets, bank loans, bonds payable, finance lease and other long-term liabilities.

The carrying value of long-term bank loans with floating interest rates are approximately at fair value as they are re-priced frequently.

Other than financial instruments item mentioned above, the Group does not have any other assets or liabilities measured or disclosed fair value, therefore fair value hierarchy under PSAK 68 (fair value measurements) is not considered necessary.

**43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES**

The Group is exposed to foreign exchange risk, interest rate risk of cashflow, credit risk and liquidity risk. The Group applies risk management for such risks by evaluating the financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Group. Such risk management provides assurance to the Group that prudent financial activities are managed according to appropriate policies and procedures and financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

The Group applies policies for managing each of these risks which is summarized below.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Kelompok Usaha. Eksposur Kelompok Usaha terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang obligasi dalam mata uang USD.

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing yang ada pada saat ini diungkapkan pada Catatan 41. Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 10% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

	(Kenaikan) penurunan nilai tukar mata uang/ (Increases) decreases on foreign exchange rates	Dampak/ Effect	
Perubahan kurs mata uang asing 2017	(+)-100bps (-)-100bps	(753.925.528) 753.925.528	<i>Fluctuation in the foreign exchange rates 2017</i>
Perubahan kurs mata uang asing 2016	(+)-100bps (-)-100bps	(643.346.330) 643.346.330	<i>Fluctuation in the foreign exchange rates 2016</i>

Risiko suku bunga atas arus kas

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

**43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Foreign currency risk

Foreign currency risk is a risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Group. Exposure of the Group against exchange rate fluctuations is mainly derived from debt arising from bonds payable denominated in USD.

The current exposure to the foreign currency risk is disclosed in Note 41. Sensitivity analysis of a 10% fluctuation in the foreign exchange rates to profit after tax with other variance considered as constant is as follow:

Cash flows interest rate risk

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Loans at variable rates are exposed to cash flows risk.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures. Measures taken by management in anticipation of interest rate risk is to evaluate by periodically comparing fixed rates to floating interest rates in line with relevant changes in interest rates in the market. Management also conducts a survey on banks to obtain an estimate of the relevant interest rates.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko suku bunga atas arus kas (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset dan liabilitas Group yang terekspos terhadap risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2017.

	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>		Total
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	
	Aset				
Kas dan setara kas	14.207.330.332	-	-	-	14.207.330.332
Investasi jangka pendek	-	-	6.845.462.592	-	6.845.462.592
Total	14.207.330.332	-	6.845.462.592	-	21.052.792.924

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Kelompok Usaha akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Kelompok Usaha mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Kelompok Usaha dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

Kelompok Usaha memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, investasi jangka pendek, piutang usaha dan piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset lain-lain.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Aset Keuangan		
Kas dan setara kas	14.207.330.332	14.467.875.678
Investasi jangka pendek	6.999.082.698	4.787.160.000
Piutang usaha - neto	698.753.677	484.271.865
Piutang lain-lain - neto	788.078.109	140.122.544
Pendapatan masih akan diterima	330.499.800	264.867.153
Aset lain-lain	-	265.140.288
Total	23.023.744.616	20.409.437.528

**43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Cash flows interest rate risk (continued)

The following table presents the carrying amount by maturity of the Group's assets and liabilities exposed to interest rate risk as of December 31, 2017.

Assets
Cash and cash equivalent
Short-term investments
Total

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

The Group manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, providing limits or ceiling to a third party who will engage in credit trade with the Group and monitoring the outstanding trade receivables on a regular basis.

The Group is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, short-term investments, trade and other receivables, accrued revenues and other assets.

Credit risk exposure relating to assets in the consolidated statements of financial position is as follow:

Financial Assets
Cash and cash equivalents
Short-term investments
Trade receivables - net
Other receivables - net
Accrued revenues
Other assets
Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi dimana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Mengingat bahwa kebutuhan dana kelompok usaha saat ini cukup signifikan sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, kelompok usaha terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional kelompok usaha.

Selain itu, kelompok usaha juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas pasar modal dan ekuitas utang.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas kelompok usaha berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

2017

	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Jumlah/ Total	
Utang usaha	1.366.755.174	-	-	-	1.366.755.174	Trade payables
Beban akrual	2.168.022.495	-	-	-	2.168.022.495	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	261.555.927	-	-	-	261.555.927	Other short-term liabilities
Utang obligasi	-	-	-	21.376.332.500	21.376.332.500	Bonds payable
Utang bank	1.860.603	-	-	-	1.860.603	Bank loans
Liabilitas jangka panjang lainnya	54.127.289	-	-	219.299.877	273.427.166	Other Long-term liabilities
Total	3.852.321.488	-	-	21.595.632.377	25.447.953.865	Total

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Kelompok Usaha adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

**43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk that occurs when short-term revenue cannot cover short-term expenditure.

Given that funding requirements of the Group are currently significant as a result of increased activity in development or expansion of business, in managing liquidity risk, the Group continues to monitor and maintain levels of adequacy of cash and cash equivalents to finance the operational needs of the Group.

In addition, the Group also regularly evaluates cash flow projections and actual cash to cope with the impact of fluctuations in cash flow, including the maturity schedule of long-term liabilities and continue to examine the condition of financial markets for placement and fund-raising initiatives, including bank loans, issuance of equity and debt securities.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments.

Capital management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Pengelolaan modal (lanjutan)

Kelompok Usaha mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Kelompok Usaha dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Struktur permodalan Kelompok Usaha terdiri dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (terdiri dari modal saham, modal donasi, tambahan modal disetor, dan saldo laba dan penghasilan komprehensif lainnya dan utang neto).

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

**a) Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Penugasan kepada Perusahaan untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok, pada tanggal 31 Agustus 2012, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pemberian Konsesi untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (Otoritas Pelabuhan) No. PP.001/1/1/OP.TPK-12 dan No. HK.566/15/11/Pl.II-12 (Perjanjian Konsesi) dimana Otoritas Pelabuhan memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak Otoritas Pelabuhan dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian Konsesi adalah sebagai berikut:

**43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Capital management (continued)

The Group manages its capital to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position to ensure optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The capital structure of the Group consists of equity attributable to owners of the Parent (consisting of share capital, additional paid-in capital, retained earnings and other comprehensive income and net payables).

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT**

**a) Concession Agreement - Tanjung Priok
Main Port Authority Office**

Based on Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 36 Tahun 2012 dated April 5, 2012 regarding Assignment to the Company to Build and Operate Kalibaru Terminal Tanjung Priok Port, on August 31, 2012, the Company entered into a Concession Agreement to Build and Operate Kalibaru Terminal Tanjung Priok Port with the Office of Tanjung Priok Main Port Authority (Port Authority) No. PP.001/1/1/OP.TPK-12 and No. HK.566/15/11/Pl.II-12 (Concession Agreement) in which the Port Authority granted rights to the Company, including the right to execute the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of executing the project without limiting the right of Port Authority in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law. Important conditions in the Concession Agreement are as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**a) Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok (lanjutan)**

**a) Concession Agreement - Tanjung Priok
Main Port Authority Office (continued)**

- Perjanjian Konsesi berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh para pihak.
- Berdasarkan Perjanjian Konsesi, Perusahaan diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru kepada Otoritas Pelabuhan berupa bank garansi sebesar Rp37.000.000 dan berlaku sampai dengan 15 Januari 2019. Jaminan pelaksanaan tersebut dicatat oleh Perusahaan sebagai bagian dari akun "Aset lain-lain" (Catatan 16).
- Perusahaan diwajibkan untuk membayar kepada Otoritas Pelabuhan berupa pendapatan konsesi sebesar 0,5% per tahun dari pendapatan kotor yang berasal dari operasi komersial terminal Kalibaru.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Konsesi, Perusahaan diharuskan untuk membangun:
 - Infrastruktur, termasuk pekerjaan pemecah gelombang, pekerjaan pengerukan, jalan akses, reklamasi dan dermaga.
 - Superstruktur, termasuk *container terminal equipment, product terminal equipment, electrical mechanical dan information communications technology.*
 - Kapal dan fasilitas pendukung lainnya.
- Perusahaan berhak mengadakan kerjasama kemitraan, sewa dan perjanjian serupa lainnya dengan kontraktor, mitra kerjasama dan anak perusahaan yang didirikan serta pihak ketiga lainnya.
- Tarif awal yang akan diterapkan dalam area konsesi ditetapkan oleh Perusahaan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

- *Concession Agreement is valid for 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the required technical documents, financial documents, and performance bonds by the parties.*
- *Under the Concession Agreement, the Company is required to submit a performance bond for development of Kalibaru terminal to the Port Authority in the form of bank guarantee amounting to Rp37,000,000 and is valid until January 15, 2019. The performance bond is recorded by the Company as part of "Other assets" (Note 16).*
- *The Company is required to pay to Port Authority, in form of concession revenues, 0.5% per annum of the gross revenue derived from the commercial operations in Kalibaru terminal.*
- *In accordance with the conditions of the Concession Agreement, the Company is required to build:*
 - *Infrastructure, including breakwater works, dredging works, access roads, reclamation and piers.*
 - *Superstructure, including container terminal equipment, product terminal equipment, electrical mechanical and information communications technology.*
 - *vessels and other supporting facilities.*
- *The Company has the rights to enter into partnership cooperation, rental and similar agreements with contractors, partners and subsidiaries established as well as with other third parties.*
- *The initial rate applied in the concession area is set by the Company based on the type, structure and classification of rates set by the Minister.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**a) Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok (lanjutan)**

**a) Concession Agreement - Tanjung Priok
Main Port Authority Office (continued)**

- Penyesuaian tarif yang diterapkan dalam area konsesi dapat dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- Perusahaan akan berkonsultasi dengan Otoritas Pelabuhan sehubungan dengan tarif sebelum diterapkan kepada pengguna jasa agar dapat memberikan kesempatan bagi Otoritas Pelabuhan untuk memberikan masukan.
- Perusahaan berhak atas kebijakannya sendiri untuk mengenakan dan memungut tarif area konsesi di dalam area konsesi.
- Perusahaan dapat memberikan wewenang kepada mitra kerjasama sehubungan dengan tarif area konsesi, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh Perusahaan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Pada akhir jangka waktu konsesi, Otoritas Pelabuhan akan mengadakan kerjasama pemanfaatan dan pengoperasian dengan Perusahaan selama 25 tahun yang akan dimulai segera setelah berakhirnya jangka waktu konsesi.
- Pada akhir jangka waktu konsesi, Perusahaan wajib:
 - Menyerahkan penguasaannya atas tanah reklamasi secara damai dan dalam keadaan kosong bersamaan dengan area konsesi dan infrastruktur area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan dan bebas dari setiap bentuk pembebanan.
 - Menyerahkan penguasaannya atas aset tidak bergerak yang dimiliki Perusahaan secara damai di dalam area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan dan bebas dari setiap bentuk pembebanan.

- Adjustment on rate applied in the concession area can be made by the Company based on the type, structure and classification of rate set by the Minister.
- The Company will consult with the Port Authority regarding the rate before being applied to service users in order to provide opportunity for the Port Authority to provide input.
- The Company by its own discretion has the right to impose and levy concession rate within the concession area.
- The Company may authorize cooperation partners in connection with the rate within the concession area, with condition that the implementation of such authority must be approved by the Company and in accordance with applicable legislation.
- At the end of the concession period, the Port Authority will enter into a cooperation and operation with the Company for 25 years, which will begin immediately after the expiration of the concession.
- At the end of the concession period, the Company is obliged to:
 - Transfer the authorization of the reclamation land to the Port Authority in an empty condition and free of encumbrance, along with the concession area and concession area infrastructure free of any form of charges.
 - Transfer the authorization of the non-removable assets of the Company to the Port Authority free of encumbrance within the concession area and free of any form of charges.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**a) Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok (lanjutan)**

**a) Concession Agreement - Tanjung Priok
Main Port Authority Office (continued)**

- Aset bergerak dalam area konsesi yang dimiliki oleh Perusahaan, Perusahaan dapat memilih dengan kebijaksanaannya sendiri, untuk mempertahankan hak, kepemilikan dan kepentingan atas aset bergerak dengan memindahkan atau mengeluarkan aset bergerak tersebut dari area konsesi, atau dapat menawarkan aset bergerak tersebut untuk dibeli oleh Otoritas Pelabuhan dengan harga buku atau nilai wajar, yang mana lebih rendah.
- Menyerahkan kepada Otoritas Pelabuhan seluruh dokumen terkait pengoperasian proyek.
- Mengalihkan atau menyebabkan dialihkannya kepada Otoritas Pelabuhan, kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.
- Memindahkan atau mengeluarkan dari area konsesi semua aset bergerak yang ingin dipindahkan atau dikeluarkan oleh Perusahaan.

- For movable assets owned by the Company within the concession area, the Company may choose with its own discretion, to retain the rights, title and interest in movable assets by moving or removing the movable assets from the concession area, or may offer the movable assets to be purchased by the Port Authority with book value or fair value, whichever is lower.
- Transfer all documents related to the operation of the project to the Port Authority.
- Transfer contracts made with third parties to the Port Authority.
- Move or take out from the concession area all movable assets which the Company decided to moved or taken out.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah melakukan pengeluaran (termasuk kapitalisasi biaya pinjaman) terkait pembangunan terminal Kalibaru tersebut masing-masing sebesar Rp7.974.204.773 dan Rp8.544.531.977 dan dicatat sebagai bagian dari akun "Aset takberwujud - aset hak konsesi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan (Catatan 15).

As of December 31, 2017 and 2016, the Company has made capital expenditures (including capitalization of borrowing cost) related to the construction of the Kalibaru terminal amounting to Rp7,974,204,773 and Rp8,544,531,977 and recorded them as part of "Intangible assets - concession assets" in the consolidated statements of financial position of the company (Note 15).

**b) Perjanjian Pembangunan -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP)**

**b) Construction Agreement -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP)**

Pada tanggal 11 September 2012, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/17/2/PI.II-12, dengan PP yang kemudian diperpanjang dengan Perjanjian No. HK.566/19/11/PI.II-13 tanggal 6 Desember 2013. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

On September 11, 2012, the Company entered into Agreement of Constructing North Kalibaru Container Terminal Phase I Tanjung Priok Port No. HK.566/17/2/PI.II-12 with PP which was extended with Agreement No. HK.566/19/11/PI.II-13 dated December 6, 2013. The period of construction work is as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**b) Perjanjian Pembangunan -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (lanjutan)**

**b) Construction Agreement -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (continued)**

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) selama 27 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter), termasuk pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS selama 34 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1B selama 50 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.

Pada tanggal 23 November 2015, Perusahaan dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) II No. HK.566/23/11/1/PI.II-15 dimana mengatur perubahan diantaranya mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya seluruh pekerjaan menjadi sebagai berikut:

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) selama 39 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter), termasuk pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS selama 45 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.
- Biaya seluruh pekerjaan menjadi sebesar Rp7.075.138.987 dan USD265.973.774 termasuk pajak pertambahan nilai.

Pada tanggal 28 November 2016, Perusahaan dan PP sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III No. HK.566/28/11/1/PI.II-16 dimana mengatur perubahan diantaranya mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi sebagai berikut:

- Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) ditetapkan selama 39 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan

- Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 27 months from the Minutes of Handover Locations/Fields.
- Construction Phase 1A2 (451-850 meters), including dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS for 34 months from the Minutes of Handover Locations/Fields.
- Construction Phase 1B for 50 months from the Minutes of Handover Locations/Fields.

On November 23, 2015, the Company and PP agreed to enter into Additional Agreement (Amendment) II No. HK.566/23/11/1/PI.II-15 which changed among others regarding period of work activities and total project cost to become as follows:

- Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 39 months from the Minutes of Handover Locations/Fields.
- Construction Phase 1A2 (451-850 meters), including dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS for 45 months from the Minutes of Handover Locations/Fields.
- Total project cost to be amounted to Rp7,075,138,987 and USD265,973,774 including value added tax.

On November 28, 2016, the Company and PP agreed to enter into Additional Agreement (Addendum) III No. HK.566/28/11/1/PI.II-16 which changed among others regarding period of work activities and total project cost to become as follows:

- Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 39 months from the Minutes of Handover Locations/Fields.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**b) Perjanjian Pembangunan -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (lanjutan)**

**b) Construction Agreement -
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
(PP) (continued)**

- Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter) ditetapkan selama 45 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan. Disamping itu, pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS harus dilakukan pada tahap 1A, tetapi serah terima pekerjaan pengerukan tersebut dilakukan bersamaan dengan serah terima seluruh pekerjaan pengerukan
- Pekerjaan Tahap 1B ditetapkan selama 64 bulan sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan
- Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) III ini berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.

- *Construction Phase 1A2 (451-850 meters) for 45 months from the Minutes of Handover Locations/Fields. Besides that, dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS should be conducted on phase 1A, however the handover of dredging should be conducted simultaneously with the handover of whole dredging.*
- *Construction Phase 1B for 64 months from the Minutes of Handover Locations/Fields.*
- *The Additional Agreement (Addendum) III is effective from the day and date it is signed.*

c) Perjanjian Asuransi Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kalibaru

c) Insurance Agreement on Construction and Development of Kalibaru Terminal

PPI telah mengadakan polis-polis asuransi sebagai berikut atas seluruh pekerjaan yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok yang berlaku selama masa konstruksi sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan 31 Mei 2019:

PPI has arranged the following insurance policies in respect of all works in connection with the construction and development of the infrastructures of the Kalibaru Terminal of the Tanjung Priok Port during the whole construction period from September 30, 2013 until May 31, 2019:

- Polis *Construction All Risks* dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("Jasindo"), pihak berelasi, sebagai *insurer* utama dan batas pertanggungan sebesar USD2.425.000.000.
- Polis *Third Party Liability* dengan Jasindo sebagai *insurer* dan batas pertanggungan sebesar USD10.000.000 per peristiwa.
- Polis *Excess Third Party Liability* dengan PT Asuransi Astra Buana ("AAB") sebagai *insurer* dan batas pertanggungan sebesar USD40.000.000 per peristiwa atas kelebihan dari USD10.000.000 per peristiwa.

- *Construction All Risks policy with PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("Jasindo"), a related party, as the main insurer and limit of indemnity of USD2,425,000,000.*
- *Third Party Liability policy with Jasindo as the insurer and limit of indemnity of USD10,000,000 per one event.*
- *Excess Third Party Liability policy with PT Asuransi Astra Buana ("AAB") as the insurer and limit of indemnity of USD40,000,000 per one event in excess of the USD10,000,000 per one event.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**c) Perjanjian Asuransi Pembangunan dan
Pengembangan Terminal Kalibaru**

PPI telah mengadakan polis-polis asuransi sebagai berikut atas seluruh pekerjaan yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok yang berlaku selama masa konstruksi sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan 31 Mei 2019 (lanjutan):

- Polis *Excess Third Party Liability* dengan AAB sebagai *insurer* dan batas pertanggungan sebesar USD40.000.000 per peristiwa atas kelebihan dari USD50.000.000 per peristiwa.

**d) Perjanjian Pemegang Saham IPC TPK dan
STMS**

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura (STMS) menandatangani Perjanjian Pemegang Saham untuk Terminal Petikemas 1 dan Perjanjian Perubahannya pada tanggal 11 September 2014 dimana IPC TPK dan STMS akan mendirikan perusahaan dengan jumlah saham sebesar 1.000 saham yang terbagi menjadi 510 saham seri A yang dimiliki IPC TPK dan 490 saham seri B yang dimiliki STMS. Perusahaan tersebut didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian sehubungan dengan pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas 1 dan kegiatan lain sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana disetujui oleh IPC TPK dan STMS.

**c) Insurance Agreement on Construction and
Development of Kalibaru Terminal**

PPI has arranged the following insurance policies in respect of all works in connection with the construction and development of the infrastructures of the Kalibaru Terminal of the Tanjung Priok Port during the whole construction period from September 30, 2013 until May 31, 2019 (continued):

- *Excess Third Party Liability policy with AAB as the insurer and limit of indemnity of USD40,000,000 per one event in excess of the USD50,000,000 per one event.*

**d) Shareholders Agreement IPC TPK and
STMS**

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapore (STMS) signed a Shareholders Agreement for Container Terminal 1 and the Amendment Agreement on September 11, 2014, wherein IPC TPK and STMS will establish a company with total shares amounted to 1,000 shares comprising of 510 series A Shares held by IPC TPK and 490 series B Shares held by STMS. The company was set up to operate based on the Construction and Operation Agreement in connection with the operation and development of Container Terminal 1 and other activities in accordance with applicable law as agreed by IPC TPK and STMS.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**d) Perjanjian Pemegang Saham IPC TPK dan
STMS (lanjutan)**

**d) Shareholders Agreement IPC TPK and
STMS (continued)**

Jika dalam suatu tahun buku, perusahaan tersebut memiliki laba yang tersedia untuk didistribusikan maka distribusi akan dilakukan pertama untuk STMS hingga pengembalian modal yang diperbolehkan telah tercapai dan kedua dibagikan secara proporsional kepada STMS dan IPC TPK sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing. Syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian.

If, in respect of any financial year, the company has profit available for distribution then distribution will be made first for STMS until permitted equity return has been achieved and secondly distributed proportionally to STMS and IPC TPK in accordance with their respective ownerships. Other term and conditions are stipulated in the agreement.

Kepemilikan saham IPC TPK pada perusahaan yang didirikan tidak diikuti dengan pengendalian dan karenanya laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan IPC TPK.

IPC TPK's ownership in the company established is not followed by control and therefore, the company's financial statements are not consolidated in the IPC TPK's financial statements.

Perusahaan yang didirikan sehubungan dengan perjanjian tersebut di atas bernama PT New Priok Container Terminal One berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014 (Catatan 1b).

The company established in relation to the above agreement namely PT New Priok Container Terminal One based on Deed No. 33 dated May 28, 2014 (Note 1b).

**e) Perjanjian Pinjaman - Sea Terminal
Management & Service Pte. Ltd., Singapura**

**e) Loan Agreement - Sea Terminal
Management & Services Pte. Ltd.,
Singapore**

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., (STMS) menandatangani Perjanjian Pinjaman dimana STMS memberikan fasilitas pinjaman kepada IPC TPK untuk kepentingan pembayaran Saham Seri A pada NPCT1 sebesar USD15.096.000 dengan tingkat bunga tahunan 7%.

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Services Pte. Ltd. (STMS) signed a Loan Agreement where STMS provides loan facilities to IPC TPK for the purpose of A Series Shares payments in NPCT1 amounting to USD15,096,000 with annual interest rate of 7%.

Fasilitas tersebut akan dibayarkan kembali melalui pengurangan modal pada NPCT1, dengan IPC TPK dan STMS sebagai pemegang sahamnya, dan dari dividen yang dapat dibagikan kepada IPC TPK. Seluruh bunga akan dibayarkan dari dividen IPC TPK.

The amount of the facility will be paid back through a reduction of capital in NPCT1, with IPC TPK and STMS as shareholders, and of dividends that can be distributed to IPC TPK. All interest will be paid from IPC TPK dividends.

Pada tanggal 11 September 2014, IPC TPK dan STMS menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman tertanggal 19 April 2014 untuk mengatur mengenai dilakukannya pembebanan bunga setiap tahun.

On September 11, 2014, IPC TPK and STMS signed the Agreement Amendments to the Loan Agreement dated April 19, 2014 regarding interests that was to be charged per annum.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**e) Perjanjian Pinjaman - Sea Terminal
Management & Service Pte. Ltd., Singapura
(lanjutan)**

**e) Loan Agreement - Sea Terminal
Management & Services Pte. Ltd.,
Singapore (continued)**

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo pokok pinjaman ke STMS masing-masing sebesar USD15.096.000 dan dicatat sebagai bagian dari liabilitas jangka panjang lainnya.

As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding loan principal to STMS amounted to USD15,096,000 and recorded as part of other long-term liabilities account.

Pada tanggal 10 November 2016, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk merevisi tingkat bunga periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018 menjadi 0%.

On November 10, 2016, the Company and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2016 to December 31, 2018 to become 0%.

f) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - PPI

f) Project Implementation Agreement - PPI

Perusahaan mendirikan PPI pada tanggal 5 November 2012 (Catatan 1b). Berdasarkan Surat Perusahaan No. TS.12/1/11/PI.II-13 tanggal 22 Februari 2013, Perusahaan menginstruksikan PPI untuk mempersiapkan dokumen perjanjian pengalihan (novasi) pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku kontraktor dari Perusahaan kepada PPI. PPI juga diminta untuk menunjuk konsultan yang diperlukan dan pelaksanaan *advisory* yang saat ini dilaksanakan oleh Perusahaan akan dialihkan kepada PPI dimana pembebanan seluruh biaya konsultan diambil dari *proceed* yang akan diterima dari mitra Terminal Kalibaru. Perusahaan kemudian juga mengirimkan Surat No. KU.26/26/13/PI.II-13 tanggal 16 April 2013 yang menginstruksikan PPI agar segera memproses pekerjaan *Technical, Legal, Financial, Tax dan Insurance Advisor*.

The Company established PPI on November 5, 2012 (Note 1b). Based on Letter of the Company No. TS.12/1/11/PI.II-13 dated February 22, 2013, the Company instructed PPI to prepare the documents for the assignment (novation) agreement on the construction work of Kalibaru Terminal with PT Pembangunan Perumahan (Persero) as the Company's contractor to PPI. PPI was also asked to appoint consultants as required and the implementation of advisory services which is currently under contracts with the Company shall be assigned to PPI in which the consultants' fees shall be taken from proceeds that will be received from the partner of Kalibaru Terminal. the Company then sent Letter No. KU.26/26/13/PI.II-13 dated April 16, 2013 in which it instructed PPI to process the *Technical, Legal, Financial, Tax and Insurance Advisor* works.

Pada tanggal 30 Mei 2013, Perusahaan dan PPI menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Proyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 dan No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), dimana Perusahaan memberikan kepada PPI hak untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok.

On May 30, 2013, the Company and PPI entered into Project Implementation Agreement for Kalibaru Terminal, Tanjung Priok Port, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 and No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), in which the Company granted to PPI the rights to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**f) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - PPI
(lanjutan)**

**f) Project Implementation Agreement - PPI
(continued)**

PIA berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Konsesi tertanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Perusahaan dengan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, yaitu selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Inilah yang menjadi dasar hukum PPI menandatangani COA (Catatan 44h).

The PIA is valid until the expiration of the term of the Concession Agreement dated August 31, 2012 entered into between the Company and the Port Authority of Tanjung Priok Port, which is 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the requirement on technical documents, financial documents and implementation guarantee by the Company and the Port Authority of Tanjung Priok Port. This is the legal basis on which PPI entered into the COA (Note 44h).

Sesuai dengan PIA, Perusahaan dan PPI selanjutnya harus mengidentifikasi perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan dan pihak ketiga sehubungan dengan proyek untuk dinovasikan kepada PPI. Seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang ada akan dinovasikan kepada PPI. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, proses novasi perjanjian tersebut masih belum terjadi.

In accordance with the PIA, the Company and PPI shall then identify the existing agreements signed by the Company and the third parties concerning the project implementation for assignment (novation) to PPI. All rights and obligations under the existing agreements will be novated to PPI. As of the date of completion of the consolidated financial statements, the process of novating these agreements have not yet occurred.

g) Perjanjian Pengelolaan Proyek - PPI

g) Project Management Agreement - PPI

Pada tanggal 24 Februari 2014, Perusahaan dan PPI menandatangani Perjanjian Manajemen Proyek untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 dan No. PPI-06-1-000495 ("PMA"), dimana Perusahaan menunjuk PPI untuk menangani manajemen proyek yang akan melaksanakan kontrak-kontrak pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru, diantaranya manajemen proyek atas kontrak-kontrak pekerjaan konstruksi serta verifikasi dan evaluasi atas pembayaran pekerjaan konstruksi dan pengawasan. PMA berlaku sampai dengan selesainya proyek. Tidak ada pendapatan untuk PPI atas penyediaan jasa ini.

On February 24, 2014, the Company and PPI entered into Project Management Agreement on the Construction Work for the Kalibaru Utara Container Terminal Phase 1 at the Port of Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 and No. PPI-06-1-000495 ("PMA"), in which the Company appointed PPI as a project management company to carry out the contractual works of Kalibaru Terminal development, among others, the project management of construction works contracts and verification and evaluation on payment of construction and supervision works. The PMA is valid until the end of the project. There is no revenue for PPI for providing this service.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1**

Berdasarkan PIA (Catatan 44f), pada tanggal 9 Juni 2014, PPI dan NPCT1, menandatangani Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas 1, Pelabuhan Priok Baru (COA) dimana PPI menunjuk NPCT1 untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Petikemas 1 selama jangka waktu sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah beroperasinya dermaga 850 meter dan NPCT1 harus melakukan pembayaran sewa di muka dan biaya sewa kuartalan kepada PPI.

Based on PIA (Note 44f), on June 9, 2014, PPI and NPCT1, entered into Construction and Operation Agreement - Container Terminal 1, New Priok Port (COA) through which PPI appointed NPCT1 to develop and operate Container Terminal 1 for the period of 25 (twenty five) years after the commencement of operation of 850 meter quay and NPCT1 shall pay advance site rent and quarterly site rent to PPI.

Pembayaran sewa di muka sebesar USD100.000.000 harus dibayarkan dalam beberapa tahap, yaitu USD30.000.000 setelah tanggal mulai COA, USD40.000.000 setelah penyerahan dermaga 450 meter dan USD30.000.000 setelah penyerahan dermaga 850 meter. Berdasarkan Perjanjian Perubahan Kedua terhadap COA tanggal 24 Desember 2014 ("SAA"), USD30.000.000 akan dibayarkan setelah penyelesaian area lapangan tambahan. PPI harus melakukan penyerahan dermaga 450 meter dan dermaga 850 meter kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 31 Juli 2015 dan 31 Desember 2015.

The advance rental fee of USD100,000,000 shall be paid in several stages, which consist of amounted to USD30,000,000 after the commencement date, USD40,000,000 after the handover of 450 meter quay and USD30,000,000 after the handover of 850 meter quay. Based on the Second Amendment Agreement to the COA dated December 24, 2014 ("SAA"), the final USD30,000,000 will be paid after the completion of additional yard area. PPI shall handover the 450 metre quay and the 850 metre quay to NPCT1 on July 31, 2015 and December 31, 2015, respectively.

Biaya sewa kuartalan harus dibayarkan pada awal setiap kuartal, yaitu sejumlah USD7.000.000 per kuartal untuk periode beroperasinya dermaga 450 meter sampai dengan beroperasinya dermaga 850 meter dan USD14.000.000 per kuartal untuk periode setelahnya.

The quarterly site rent shall be paid at the beginning of each quarter amounting to USD7,000,000 each quarter for the period after the commencement of operation of 450 metre quay up to the commencement of operation of 850 metre quay and USD14,000,000 each quarter for the period thereafter.

Pada tanggal 17 September 2014, PPI menerima pembayaran pertama atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD30.000.000 dari NPCT1.

On September 17, 2014, PPI received the first payment of advance rental fee amounting to USD30,000,000 from NPCT1.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

Penyerahan dermaga 450 meter tidak terjadi pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana tercantum dalam SAA. Pada tanggal 1 Agustus 2015, PPI menerima *Liquidated Damages Notice* dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan ini. Melalui surat tanggal 26 Agustus 2015, PPI menyampaikan bahwa keterlambatan penyerahan tidak mengakibatkan NPCT1 mengalami keterlambatan dalam melakukan konstruksinya sehingga hal tersebut bukan merupakan *Liquidated Damage Event*.

The handover of 450 metre quay did not occur on July 31, 2015 as stated in the SAA. On August 1, 2015, PPI received a Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to the delay. Through a letter dated August 26, 2015, PPI responded by stating that the delay in handover did not cause a delay to NPCT1's construction hence it is not a Liquidated Damage Event.

Selain itu, penyerahan dermaga 850 meter yang seharusnya dilakukan pada tanggal 31 Desember 2015 dan pekerjaan pengerukan tertentu yang seharusnya diselesaikan PPI pada tanggal 31 Januari 2016, juga tidak terjadi. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, PPI tidak menerima *Liquidated Damages Notice* dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan tersebut.

In addition, the handover of 850 metre quay which should have occurred on December 31, 2015 and certain dredging works which should have been completed by PPI on January 31, 2016, did not occur as well. As of the date of completion of the consolidated financial statements, PPI had not received any Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to these delays.

Dermaga 450 meter dan 850 meter telah diserahkan oleh PPI kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 23 Juni 2016 dan 16 Oktober 2016.

450 metre and 850 metre quay have been handed over by PPI to NPCT1 on June 23, 2016 and October 16, 2016, respectively.

Pada tanggal 24 Juni 2016, PPI menerima pembayaran kedua atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD40.000.000 dari NPCT1. Pada tanggal 31 Desember 2016, dermaga 850 meter belum mulai beroperasi sehingga pembayaran pertama dan kedua atas sewa diterima di muka masing-masing sebesar USD30.000.000 dan USD40.000.000 tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

On June 24, 2016, PPI received the second payment of advance rental fee amounting to USD40,000,000 from NPCT1. As of December 31, 2016, commencement of operation of 850 metre quay has not yet occurred hence first and second payment of advance site rent amounting to USD30,000,000 and USD40,000,000, respectively, are recorded as unearned revenue in the consolidated statement of financial position.

Pada tanggal 18 Agustus 2016, dermaga 450 meter telah mulai beroperasi secara komersial. Dengan demikian, pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, PPI telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan sebesar USD10.347.826 (setara dengan Rp137.742.143).

On August 18, 2016, 450 metre quay has started its commercial operation. Therefore, for the year ended December 31, 2016, PPI has recorded the revenue from quarterly site rent amounting to USD10,347,826 (equivalent to Rp137,742,143).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

Pada tanggal 13 Desember 2016, PPI dan NPCT1 menandatangani Surat Persetujuan dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

On December 13, 2016, PPI and NPCT1 signed a Letter of Acceptance which regulates items as follows:

- Penyediaan akses oleh PPI kepada NPCT1 atas area tertentu pada dermaga 850 meter;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasi komersial dermaga 450 meter, yaitu tanggal 18 Agustus 2016;
- Pemberitahuan Konfirmasi Pekerjaan Lokasi untuk Dermaga 850 Meter diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2016 dengan beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan;
- PPI akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan (*PPI Undertaking*):
 - Perkuatan sisi utara tanggal 16 Maret 2017;
 - Penyediaan dan pemasangan *variable speed water drive* dan *pressure tank* dan peralatan terkait tanggal 16 Maret 2017;
 - Pengerukan hingga kedalaman -16m LWS tanggal 31 Mei 2017;
 - Penyelesaian fase kedua dari area *common gate* tanggal 16 Oktober 2017;
 - Penyelesaian hal-hal penting yang belum diselesaikan yang diidentifikasi oleh ahli teknik independen tanggal 16 Maret 2017.
- Kesepakatan bahwa tanggung jawab pemeliharaan area infrastruktur konsesi akan menyesuaikan dengan laporan ahli teknik independen;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasional dermaga 850 meter paling lambat tanggal 16 Maret 2017;
- Jika *PPI Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, NPCT1 akan memperhitungkan pengurangan 25% dari pembayaran sewa kuartalan USD14.000.000 pada pembayaran sewa kuartalan berikutnya;

- Provision of access to certain areas within 850 metre quay from PPI to NPCT1;
- Agreement on the date of commencement of operations of 450 metre quay, which was August 18, 2016;
- Site Works Confirmation Notice for 850 metre quay was issued on 16 October 2016 with note on certain outstanding works;
- PPI will complete the following works within the time specified for each item:
 - Strengthening to north side by March 16, 2017;
 - Supplying and installing variable speed water drive and pressure tank and associated equipment by March 16, 2017;
 - Dredging to a depth of -16m LWS by May 31, 2017;
 - Completion of the second phase of the common gate area by October 16, 2017;
 - Completion of major outstanding items identified by the independent engineer by March 16, 2017.
- Agreement that the maintenance responsibility of concession area infrastructure will be in accordance with the independent engineer's report;
- Agreement that the date of commencement of operations of 850 metre quay will be no later than March 16, 2017;
- If *PPI Undertaking* have not been completed on the predetermined dates, NPCT1 will be credited 25% of quarterly site rent USD14,000,000 on the next payment of quarterly site rent;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

- Jika terdapat salah satu *PPI Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal 16 Oktober 2017, NPCT1 hanya akan melakukan pembayaran atas sewa kuartalan dermaga 450 meter, yaitu USD7.000.000 sampai dengan tanggal dimana seluruh *PPI undertaking* telah diselesaikan.

- *If any one of the PPI Undertakings has not been completed by October 16, 2017, NPCT1 will pay quarterly site rent only on the 450 metre quay, which is USD7,000,000 until the date that all PPI Undertakings have been completed.*

Pada tanggal 16 Januari 2018, PPI dan NPCT1 menandatangani Nota Kesepakatan dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

On January 16, 2018, PPI and NPCT1 signed Memorandum of Agreement which regulates items as follows:

- PPI akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
 - Jalan akses keluar sisi timur area CGA tanggal 15 Desember 2017;
 - Pengoperasian Go-live atas sistem IT tanggal 31 Desember 2017;
 - Pengoperasian Go-live OCR di CGA tanggal 31 Januari 2018;
 - Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi selatan di CGA tanggal 31 Januari 2018;
 - Jalan akses masuk di sisi barat CGA tanggal 28 Februari 2018.
 - Tambahan area buffer untuk parkir truk di sisi barat CGA tanggal 30 April 2018;
 - Penyediaan fasilitas untuk petikemas reefer dan cooling room tanggal 30 April 2018;
 - Pekerjaan perbaikan jalan akses keluar (lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA) tanggal 30 April 2018;
 - Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA tanggal 31 Mei 2018;
 - Penyediaan fasilitas inspeksi untuk mendukung kegiatan bea dan cukai di CGA tanggal 31 Maret 2019.
- Jika pekerjaan tersebut di atas belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, PPI akan dikenakan pembayaran terhadap setiap pekerjaan sebesar USD5.000/hari kerja.

- *PPI will complete the following works within the time specified for each item:*
 - *East area access road of CGA by December 15, 2017;*
 - *Go-live IT system operation by December 31, 2017;*
 - *Go-live OCR operation at CGA by January 31, 2018;*
 - *Reparation of behandle south side dockyard at CGA by January 31, 2018;*
 - *Entry access road west side CGA by February 28, 2018.*
 - *Additional buffer area for trucks park at west side of CGA by April 30, 2018.*
 - *Facility provision for reefer container and cooling room by April 30, 2018.*
 - *Reparation work of exit access road (handle dockyard north side at CGA) by April 30, 2018.*
 - *Reparation of behandle dockyard north side at CGA by May 31, 2018.*
 - *Inspection facilities provision to support custom activities at CGA March 31, 2019.*
- *If the above works have not been completed on the predetermined dates, PPI will pay USD5,000/day for each work;*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU
PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)**

**44. AGREEMENTS RELATED TO THE
DEVELOPMENT AND OPERATION OF
KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK
PORT (continued)**

**h) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

**h) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

- Kesepakatan dalam Surat Keputusan mengenai pengurangan pembayaran sewa dicabut

- Agreement on Letter of Acceptance regarding reduction of rental payment has been waived.

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA

45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS

**a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas
Koja**

**a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas
Koja**

Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja antara Perusahaan dan HPI (Catatan 1b) mengatur syarat-syarat yang menjadi dasar operasional Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja).

The Master Cooperation Agreement between the Company and HPI (Note 1b) sets out the terms and conditions under which Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja) is operating.

Aspek keuangan penting yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk amandemennya adalah sebagai berikut:

The principal financial aspects of this Agreement including its amendments are as follows:

- Bagian investasi dari Partisipan yang dicantumkan dalam Perjanjian yang telah diubah adalah sebagai berikut:

Perusahaan	52,12%	Company
HPI	47,88%	HPI

- The investment proportion of the Participants is specified in the revised Agreement as follows:

- Nilai investasi dari kedua Partisipan tergantung pada audit atas investasi yang dilakukan oleh auditor independen.

- Investments by the Participants are subject to audit by an independent auditor.

- Aset tetap yang diserahkan oleh Partisipan untuk dipergunakan dalam operasional terminal dimiliki secara langsung oleh Partisipan dan dicatat dalam masing-masing pembukuannya.

- Fixed assets provided by the Participants for use in the operations of the terminal are owned directly by the Participants and are recorded in their respective accounting records.

- Partisipan berhak atas pengembalian dana penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh masing-masing Partisipan yang digunakan dalam operasi dan berhak menerima laba sesuai dengan investasi dari Partisipan.

- The Participants are entitled to reimburse depreciation funds from fixed assets owned by the respective Participants used in operation and shall receive profit based on the investments made by the Participants.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas
Koja (lanjutan)**

- Laba yang dapat dibagikan kepada Partisipan ditentukan setelah pengurangan biaya operasional, royalti, biaya bank dan dana penyusutan aset tetap dari pendapatan.
- Royalti akan dibayarkan kepada Perusahaan apabila arus petikemas tahunan yang dihasilkan melebihi target minimum tahunan yang ditetapkan.
- Jika ada pengeluaran modal baru, kedua belah pihak sepakat untuk membiayai belanja modal sesuai dengan persentase investasi Partisipan berdasarkan audit investasi tahun sebelumnya
- Partisipan berhak untuk menerima dana penyusutan dan pembagian laba berdasarkan hasil audit investasi yang berlaku.

Pada tanggal 3 Juni 2014, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang ada di KSO TPK Koja, sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2013.

Pada tanggal 17 November 2014, auditor independen selesai dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2013. Para Partisipan menyetujui dan mendistribusikan sisa hasil investasi dari rekening escrow KSO TPK Koja, untuk tahun 2013 sebesar USD23,66 juta atau setara dengan Rp247,29 miliar untuk Pelindo II dan USD23,54 juta atau setara dengan Rp245,98 miliar untuk HPI pada bulan Desember 2014 (setelah memperhitungkan distribusi interim sebesar USD13,73 juta atau setara dengan Rp143,47 miliar untuk Pelindo II dan USD11,27 juta atau setara dengan Rp117,81 miliar untuk HPI pada bulan Februari 2014). Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2013 adalah 54,91% untuk Pelindo II dan 45,09% untuk HPI.

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas
Koja (continued)**

- Profit distributable to the Participants is determined by deducting operating expenses, royalties, bank administration charges and depreciation funds from revenue.
- Royalties are payable to the Company if the annual container throughput exceeds the minimum annual targets.
- If there are new capital expenditures, both parties agreed to finance the capital expenditures in accordance with the investment percentages of the Participants based on the prior year investment audit.
- The Participants have the right to receive depreciation funds and distribution of profit based on prevailing investment audit result.

On June 3, 2014, the Participants appointed an independent auditor to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of KSO TPK Koja's fixed assets in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2013 net income.

On November 17, 2014, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2013. The Participants approved and distributed the above outstanding return of investment from KSO TPK Koja's escrow account for the year 2013 of USD23.66 million or equivalent to Rp247.29 billion to Pelindo II and USD23.54 million or equivalent to Rp245.98 billion to HPI in December 2014 (after considering interim distribution of USD13.73 million or equivalent to Rp143.47 billion for Pelindo II and USD11.27 million or equivalent to Rp117.81 billion for HPI in February 2014). The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2013 are 54.91% for Pelindo II and 45.09% for HPI.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas
Koja (lanjutan)**

Pada tanggal 11 Juni 2015, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba TPK Koja tahun 2014.

Pada tanggal 15 Desember 2015, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2014 dimana para Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2014 sebesar USD6,56 juta atau setara dengan Rp77,97 miliar untuk Pelindo II dan USD9,17 juta atau setara dengan Rp108,91 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2014 adalah 54,91% untuk Pelindo II dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 22 Agustus 2016, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2015.

Pada tanggal 18 November 2016, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2015 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2015 sebesar AS\$10,78 juta atau setara dengan Rp143,60 miliar untuk Pelindo II dan AS\$12,74 juta atau setara dengan Rp169,74 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2015 adalah 54,91% untuk Pelindo II dan 45,09% untuk HPI.

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas
Koja (continued)**

On June 11, 2015, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of TPK Koja's 2014 net income.

On December 15, 2015, the independent auditors has released the investment audit report for the year 2014 whereby the Participants approved the outstanding return on investment for the year 2014 of USD6.56 million or equivalent to Rp77.97 billion for Pelindo II and USD9.17 million or equivalent to Rp108.91 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for year 2014 are 54.91% for Pelindo II and 45.09% for HPI.

On August 22, 2016, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2015 net income.

On November 18, 2016, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2015 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2015 of US\$10.78 million or equivalent to Rp143.60 billion for Pelindo II and US\$12.74 million or equivalent to Rp169.74 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2015 are 54.91% for Pelindo II and 45.09% for HPI.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas
Koja (lanjutan)**

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan HPI mengadakan Revisi atas Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Terminal Petikemas III Tanjung Priok (Revisi Perjanjian) dimana Perusahaan dan HPI sepakat untuk memperpanjang kerjasama pengoperasian Terminal Petikemas III Tanjung Priok sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Revisi Perjanjian ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Revisi Perjanjian tersebut, TPK Koja akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD8.750.000, sedangkan royalti tidak lagi dibayarkan oleh TPK Koja kepada Perusahaan.

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan HPI telah melakukan perubahan terhadap Revisi Perjanjian di atas dimana pada akhir masa perjanjian, seluruh aset yang dimiliki HPI dan bagian HPI dalam aset bersama serta pekerjaan modal akan dialihkan kepada Perusahaan tanpa adanya pembebanan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD35.000.000 (setara dengan Rp471.686.250) dan USD35.000.000 (setara dengan Rp466.900.000).

Dalam Revisi Perjanjian tersebut, Perusahaan berhak memperoleh pembayaran premium sebesar USD50.000.000 dari HPI sehubungan dengan dilanjutkannya kerjasama antara Perusahaan dan HPI untuk pengelolaan TPK Koja. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp27.735.417. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo yang belum di amortisasi atas premium tersebut adalah sebesar Rp596.311.458 dan Rp624.046.875 dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**a) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas
Koja (continued)**

On August 5, 2014, the Company and HPI entered into a Revised Cooperation Agreement for the Management of Tanjung Priok Container Terminal III (Revised Agreement), whereby the Company and HPI agreed to extend the cooperation for operating Terminal Petikemas III Tanjung Priok until March 26, 2039. The Revised Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Revised Agreement, TPK Koja will have to pay quarterly rent fee amounting to USD8,750,000, while royalty will no longer be paid by TPK Koja to the Company.

On June 22, 2015, the Company and HPI has amended the Revised Agreement mentioned above where at the end of the agreement period, all of the HPI's assets and HPI's interest in the joint assets and the capital works will be transferred to the Company free of encumbrances.

For the year ended December 31, 2017 and 2016, the Company has recorded the revenue from quarterly rent fee amounting to USD35,000,000 (equivalent to Rp471.686.250) and USD35,000,000 (equivalent to Rp466,900,000), respectively.

In the Revised Agreement, the Company has the right to obtain payment of premium amounting to USD50,000,000 from HPI in relation to the continuing cooperation between the Company and HPI for the management of TPK Koja. For the year ended December 31, 2017 and 2016, the Company has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp27,735,417. As of December 31, 2017 and 2016, the balance of unamortized premium amounted to Rp596,311,458 and Rp624,046,875 and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok ("Perjanjian Pemberian Kuasa") dimana Perusahaan menunjuk dan memberikan kuasa pada JICT untuk pengoperasian dan pemeliharaan properti yang telah dikuasakan (mencakup terminal kontainer, fasilitas pendukung terminal kontainer dan utilitas) sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian. Periode perjanjian adalah 20 (dua puluh) tahun sejak 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Sehubungan dengan pemberian kuasa kepada JICT tersebut, JICT akan membayar royalti kepada Perusahaan sebesar 10% dari pendapatan kotor terminal kontainer secara bulanan. Disamping itu, JICT juga akan membayar kepada Perusahaan atas sewa peralatan dan tenaga kerja yang ditempatkan Perusahaan di JICT.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan JICT mengadakan Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa - Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok (Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa) dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Pemberian Kuasa sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD21.250.000 (Catatan 45c), sedangkan royalti, sewa peralatan berupa 4 RTGC dan penempatan tenaga kerja tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan. Perjanjian jasa dan teknis "know how" yang terdapat pada Perjanjian Pemberian Kuasa akan diakhiri. Berdasarkan Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, kegiatan usaha dan aset Terminal 2 akan dialihkan dari JICT kepada Perusahaan (Catatan 45f). Berdasarkan Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, Perusahaan akan menerima pembayaran premium sebesar USD200.000.000 dari HPJ (Catatan 45e).

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

b) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT

On March 27, 1999, the Company and JICT entered into Authorization Agreement for The Operation and Maintenance of Container Terminal in Tanjung Priok Seaport ("Authorization Agreement") whereby the Company appointed and conferred authorization on JICT for the operation and maintenance of the authorization property (including container terminal, container terminal support facilities and utilities) as defined in the agreement. The authorization period is 20 (twenty) years from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement. In consideration of the granting of the authorization to JICT, JICT will pay monthly royalties to the Company calculated at 10% of the preceding month container terminal gross revenue. Moreover, JICT will also pay to the Company for equipment rental and Company's employee secondment in JICT.

On August 5, 2014, the Company and JICT entered into an Amended Authorisation Agreement - Jakarta International Container Terminal, Port of Tanjung Priok (Amended Authorisation Agreement), whereby the Company and JICT agreed to extend the Authorization Agreement until March 26, 2039. The Amended Authorisation Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Amended Authorisation Agreement, JICT will have to pay quarterly rent fee amounting to USD21,250,000 (Note 45c), while royalty, equipment rental of 4 RTGC and secondment of employee will no longer be paid by JICT to the Company. As for the technical "know-how" and services agreement in Authorization Agreement will be terminated. Based on the Amended Authorisation Agreement, Terminal 2 assets and business will be transferred from JICT to the Company (Note 45f). Based on the Amended Authorisation Agreement, the Company will receive payment of premium from HPJ amounting to USD200,000,000 (Note 45e).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT (lanjutan)

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ kepada Perusahaan diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diatur dalam surat Menteri Badan Usaha Milik Negara dan surat Menteri Perhubungan di bawah.

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perusahaan menerima surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Kerjasama Pengelolaan/Pengoperasian JICT dan TPK Koja dimana Menteri Badan Usaha Milik Negara secara prinsip menyetujui rencana kerjasama usaha pengelolaan/pengoperasian JICT dan TPK Koja, dengan kepemilikan minimal di JICT sebesar 51%, dengan persyaratan sebagai berikut:

- Memperhatikan surat Menteri Perhubungan No. HK.201/3/4 Phb 2014 tanggal 18 September 2014, terkait dengan pemisahan fungsi operator dan regulator sesuai UU No. 17 Tahun 2008.
- Melaksanakan surat Wakil Menteri BUMN kepada Direktur Utama BUMN No. S-645/MBU/WK/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 hal penyampaian Hasil Panja Aset BUMN dan Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait kerjasama BUMN.

Berdasarkan Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara tanggal 7 Januari 2016, Perusahaan diharuskan melakukan revisi terhadap Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa dimana Perusahaan perlu melakukan penyesuaian agar sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, revisi atas Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa belum selesai dilakukan.

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

b) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT (continued)

On June 22, 2015, the Company and JICT entered into Amendment Agreement to the Amended Authorisation Agreement in which changed the amount of premium to be paid by HPJ to the Company amounting to USD215,000,000. The Amended Authorisation Agreement needs to have adjustments to be in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Sailing as regulated in the letter of the Minister of State Owned Enterprise and letter of the Minister of Transportation below.

On June 9, 2015, the Company received a letter from the Minister of State Owned Enterprise regarding Cooperation of Management/Operation of JICT and TPK Koja whereas the Minister of State Owned Enterprise principally agrees with the plan of cooperation of JICT and TPK Koja management/operation, with minimum percentage of ownership of 51%, with requirements as follows:

- *To comply with the letter from Minister of Transportation No. HK.201/3/4 Phb 2014 dated September 18, 2014, related to separation of operator and regulator function in accordance with UU No. 17 Year 2008.*
- *To execute letter of Vice Minister of State Owned Enterprise to President Director of State Owned Enterprise No. S-645/MBU/WK/10/2014 dated October 9, 2014 regarding deliverance of Assets Working Committee of State Owned Enterprise and Decision of Constitutional Court, especially related to State Owned Enterprises cooperation.*

Based on the Letter of Minister of Transportation of the Republic of Indonesia to the Minister of State Owned Enterprise dated January 7, 2016, the Company was obliged to revise the Amended Authorisation Agreement where the Company needs to make adjustments to be in accordance with Law No. 17 Year 2008. Until the completion of the consolidated financial statements, the revision on Amended Authorisation Agreement has not been finished.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas lainnya - JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas ("Perjanjian Penggunaan") dimana Perusahaan mengizinkan dan memberikan hak kepada JICT untuk menggunakan dan menyewa properti berikut dengan semua perbaikan yang telah dilakukan oleh JICT sejak tanggal efektif Perjanjian Pemanfaatan. Atas pemberian hak Penggunaan oleh Perusahaan, JICT setuju untuk membayar biaya bulanan yang ditetapkan dalam Perjanjian tersebut, dihitung sebesar 5% dari pendapatan kotor.

Perusahaan tetap memiliki hak kepemilikan properti tersebut. Jangka waktu perjanjian adalah dua puluh tahun dari 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan JICT mengadakan Amandemen Perjanjian Penggunaan dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Penggunaan sampai dengan tanggal berakhirnya Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa. Amandemen Perjanjian Penggunaan ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Amandemen Perjanjian Penggunaan tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD21.250.000 sedangkan kompensasi 5% dari pendapatan kotor JICT tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut sebesar Rp1.143.165.000 dan Rp1.138.553.750.

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

c) Utilization Agreement of Land Under HPL Owned by the Company, Port Facilities Building and Other Container Port Supporting Facilities - JICT

On March 27, 1999, the Company and JICT entered into an Agreement on Utilization of The HPL Land, Port Buildings Facility, and The Container Terminal Support Facility ("Utilization Agreement") whereby the Company granted and conferred the right to utilise and rent to JICT the properties together with all improvements held by JICT commencing from the effective date of the Utilization Agreement. In consideration of the granting of the utilisation right by the Company, JICT agreed to pay a monthly fee defined in these Agreement, calculated at 5% of gross revenue.

The Company retained the rights of the ownership of the properties. The utilisation period is twenty years from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement.

On August 5, 2014, the Company and JICT entered into an Amended Utilisation Agreement whereby the Company and JICT agreed to extend the Utilisation Agreement until the date of termination of Amended Authorisation Agreement. The Amended Utilisation Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Amended Utilisation Agreement, JICT will have to pay quarterly rent fee to the Company amounting to USD21,250,000 while compensation of 5% of JICT's gross revenue will no longer be paid by JICT to the Company. For the year ended December 31, 2017 and 2016, the Company has recorded revenue from quarterly rent fee amounting to Rp1,143,165,000 and Rp1,138,553,750, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Amandemen Perjanjian Pemegang Saham - JICT

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan, HPJ, JICT dan Kopegmar mengadakan Amandemen Perjanjian Pemegang Saham dimana para pihak sepakat untuk melakukan penyesuaian kepemilikan saham sebagai berikut:

- Modal Dasar JICT ditingkatkan sejumlah 18.077.584 saham Seri B.
- Tambahan 18.059.505 lembar saham Seri B untuk Perusahaan.
- Tambahan 18.079 lembar saham Seri B untuk Kopegmar.

Atas penyesuaian kepemilikan ini, kepemilikan saham Perusahaan di JICT meningkat menjadi sebesar 50,9%. Amandemen Perjanjian Pemegang Saham ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Peningkatan kepemilikan saham Perusahaan di JICT belum efektif pada tanggal 31 Desember 2015 karena Perusahaan belum melakukan penyetoran tambahan modal dan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh JICT belum memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JICT tanggal 24 November 2015, para pemegang saham JICT setuju antara lain:

- Bergantung pada persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk meningkatkan modal dasar JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh).

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

d) Amended Shareholders Agreement - JICT

On August 5, 2014, the Company, HPJ, JICT and Kopegmar entered into an Amended Shareholder Agreement, whereby all parties agreed to adjust the shares ownership as follows:

- *Authorised Share Capital is adjusted by increasing 18,077,584 serie B shares.*
- *Additional 18,059,505 serie B shares for the Company.*
- *Additional 18,079 serie B shares for Kopegmar.*

In consideration to the ownership adjustment, the Company's share ownership in JICT increased to 50.9%. The Amended Shareholder Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. The increase of the Company's ownership in JICT has not become effective as of December 31, 2015 since the Company has not paid the additional paid-in capital and the increase of JICT's authorised capital, issued and fully paid capital has not been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Based on the Circular Resolution of Shareholders in Lieu of An Extraordinary General Meeting of Shareholders of JICT dated November 24, 2015, the shareholders of JICT agreed among others:

- *Subject to approval from the Capital Investment Coordinating Board (BKPM), to increase JICT's authorized capital from Rp221,450,406 divided into 1 (one) A Series share and 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 1 (one) A Series share and 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Amandemen Perjanjian Pemegang Saham - JICT (lanjutan)

- Bergantung pada persetujuan BKPM, untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh).
- Untuk tujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh JICT, agar diterbitkan 18.077.583 lembar saham Seri B sebesar Rp9.038.792 dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh) per lembar saham dengan proporsi sebagai berikut:
 - 18.059.505 lembar saham Seri B sebesar Rp9.029.752 akan diambil oleh Perusahaan.
 - 18.079 lembar saham Seri B sebesar Rp9.039 akan diambil oleh Kopegmar.

Pada tanggal 7 Desember 2015, BKPM telah menyetujui perubahan modal JICT tersebut di atas.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum melakukan penyetoran atas tambahan setoran modal tersebut di atas. Disamping itu, peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut di atas belum memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Amended Shareholders Agreement - JICT (continued)

- Subject to approval from BKPM, to increase JICT's issued and paid-up capital from Rp221,450,406 divided into 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).
- For the purpose of the increase of JICT's authorized, issued and fully paid capital, to issue 18,077,583 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) with proportion as follows:
 - 18,059,505 B Series shares amounting to Rp9,029,752 will be subscribed by the Company.
 - 18,079 B Series shares amounting to Rp9,039 will be subscribed by Kopegmar.

On December 7, 2015, BKPM has already approved the above mentioned JICT's capital changes.

Until the completion of the consolidated financial statements, the Company has not paid the additional paid-in capital as mentioned above. Moreover, the increase of authorized capital and issued and paid up capital has not received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Perjanjian Pembayaran Premium - JICT

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan HPJ mengadakan Perjanjian Pembayaran Premium dimana HPJ sepakat untuk melakukan pembayaran premium kepada Perusahaan sebesar USD200.000.000 sebagai imbalan atas tetap dilanjutkannya kerja sama usaha patungan Perusahaan dengan HPJ. Perjanjian ini berlaku efektif pada saat setiap dari persyaratan pendahuluan pada Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa telah dipenuhi (Catatan 45b). Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan HPJ mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pembayaran Premium dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Dalam keadaan tertentu dimana terjadinya pengakhiran secara lebih awal atas Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa, maka premium harus dibayarkan kembali oleh Perusahaan kepada HPJ secara pro-rata. Pada tanggal 2 Juli 2015, Perusahaan telah menerima pembayaran premium tersebut. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp119.262.292. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo yang belum di amortisasi atas premium tersebut adalah sebesar Rp2.564.139.271 dan Rp2.683.401.563 dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

f) Perjanjian Pengalihan Aset - JICT

Pada tanggal 14 Desember 2015, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Pengalihan Aset Terminal 2 dari JICT kepada Perusahaan dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk melakukan pengalihan aset-aset milik JICT yang terdapat di Terminal 2 kepada Perusahaan pada tanggal perjanjian ini. Atas pengalihan aset-aset tersebut, Perusahaan diharuskan melakukan pembayaran sebesar USD2.816.526, yang akan dibayarkan kepada JICT menggunakan mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Nopember 2015, yaitu sebesar Rp38.980.720. Pada tanggal 31 Desember 2017 Perusahaan belum melakukan pembayaran tersebut dan kewajibannya dicatat sebagai bagian dari akun liabilitas jangka pendek lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan (Catatan 20).

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

e) Amended Shareholders Agreement - JICT

On August 5, 2014, the Company and HPJ entered into a Premium Payment Agreement, whereby HPJ agreed to pay premium to the Company amounting to USD200,000,000 as consideration for continuing the joint venture of the Company with HPJ. The Premium Payment Agreement will commence on the date on each of the condition precedent in the Authorization Agreement has been satisfied (Note 45b). On June 22, 2015, the Company and HPJ entered into Amendment Agreement to Premium Payment Agreement in which the amount of premium to be paid by HPJ was amended to USD215,000,000. In certain circumstances leading to early termination of the Amended Authorisation Agreement, the premium shall be repaid by the Company to HPJ using a pro-rate basis. On July 2, 2015, the Company has received payment of the premium. For the years ended December 31, 2017 and 2016, the Company has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp119,262,292, respectively. As of December 31, 2017 and 2016, the balance of unamortized premium amounted to Rp2,564,139,271 and Rp2,683,401,563 and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

f) Assets Transfer Agreement - JICT

On December 14, 2015, the Company and JICT entered into Terminal 2 Assets Transfer from JICT to The Company Agreement where the Company and JICT agreed to transfer assets owned by JICT at Terminal 2 to the Company on the date of this agreement. For the transfer of the assets, the Company is obliged to make payment amounted to USD2,816,526, which will be paid to JICT in Rupiah using BI middle rate as of November 30, 2015, amounted to Rp38,980,720. As of December 31, 2017, the Company has not made the payment and the liability was recorded as part of other current liabilities account in the consolidated financial position of the Company (Note 20).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

- g) Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama pengendalian operasi dengan bentuk *Build, Operate and Transfer* (BOT) berupa Dermaga Nusantara II dengan PT Prima Nur Panurjwan selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai 2029 dengan total nilai kontribusi sebesar Rp262,98 miliar.
- h) Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) untuk pengelolaan dan pengoperasian terminal serbaguna untuk melayani kapal barang/petikemas milik IKPP. Perjanjian tersebut meliputi pembayaran pendapatan jasa kapal dan barang dengan persentase yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal pengelolaan dan pengoperasian terminal yaitu paling lambat tanggal 15 April 1999, Penggunaan hasil reklamasi dikenakan tarif minimal sebesar 30% dari besaran tarif sesuai Kelompok Usaha yaitu sebesar Rp111,54 juta per tahun.
- i) Perusahaan memiliki Perjanjian Kerjasama Operasi dalam bentuk BOT (*Build, Operate and Transfer*) berupa Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Curah Kering di Pelabuhan Panjang dengan PT Inti Sentosa Alam Bahtera. Perjanjian tersebut berlaku sejak 14 Mei 1992 hingga 13 Mei 2017.

Pada saat perjanjian berakhir seluruh fasilitas Terminal Curah Kering seperti dermaga, gudang dan peralatan pelabuhan menjadi milik Perusahaan. Selain itu, selama masa perjanjian Perusahaan juga mendapatkan bagian pendapatan atas pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa bongkar muat dan penumpukan barang berdasarkan persentase tertentu.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, penyerahan aset belum dilakukan dan perusahaan sedang dalam proses penyelesaian perjanjian tersebut.

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

- g) *The Company has a joint control and operation agreement in the form of Build Operate and Transfer (BOT) for Dermaga Nusantara II with PT Prima Nur Panurjwan for the period of 25 (twenty five) years commencing from 2005 to 2029 with contribution value amounting to Rp262.98 billion.*
- h) *The Company entered into Joint control entity agreement with PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) for managing and operating a multipurpose terminal that serves vessels/containers owned by IKPP. The agreement covers vessels and cargo service revenue payment with certain agreed percentage. This agreement is effective for 30 (thirty) years from the date of terminal management and operation. On April 15, 1999, The minimum rate from land reclamation usage is 30% based on the appropriate tariff of the Group or amounting to Rp111.54 million per annum.*
- i) *The Company entered into a Joint control entity agreement in the form of BOT (Build, Operate and Transfer) on Construction & Operation of Bulk Terminal at Port of Panjang with PT Inti Sentosa Alam Bahtera (PT ISAB). The agreement commenced since May 14, 1992 until May 13, 2017.*

At the end of the agreement, all facilities for Bulk Terminal, such as dock, warehouses and port equipment will be owned by the Company. In addition, during the period of the agreement the Company receives a portion of income on the vessel services, cargo services and loading services based on a certain percentage.

Until the completion date of the consolidation financial statements, the transfer of assets has not been done and the Company is still in the process of ending the agreement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

- j) Pada tanggal 2 Maret 2012, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) atas penggunaan bagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik Perusahaan sesuai Surat Perjanjian No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. Perjanjian ini mencakup pengelolaan tanah seluas 329.833 m² berlokasi di Jl Sindang laut dan Jl Raya Cilincing, Jakarta Utara dan berlaku selama 22 (dua puluh dua) tahun sampai dengan 31 Desember 2033.

Perjanjian kerjasama tersebut telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-505/MBU/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Persetujuan Optimalisasi Tanah Perusahaan yang digunakan oleh Indofood.

Pendapatan yang diperoleh Perusahaan atas penggunaan lahan tersebut adalah sebesar Rp1.041.059.197 yang dibayar secara periodik selama 5 (lima) kali pembayaran dan pelunasan pembayaran ke 5 (lima) selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan setelah perjanjian ditandatangani. Perusahaan juga memperoleh pendapatan tambahan atas pengoperasian dermaga/jetty sebesar Rp104.260 per tahun yang dibayarkan setiap awal tahun selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah nota tagihan diterima oleh Indofood. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, jumlah pembayaran yang telah diterima oleh Perusahaan adalah sebesar Rp1.041.059.197. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo yang belum di amortisasi atas penggunaan bagian tanah HPL masing-masing adalah sebesar Rp700.300.382 dan Rp741.206.177 (sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2).

- k) Berdasarkan Surat Perjanjian No. HK.566/7/16/c.Tpk-04 tanggal 27 Mei 2004, Perusahaan dan PT AKR Corporindo Tbk mengadakan perjanjian penggunaan bagian tanah HPL milik Perusahaan seluas 130.000 m² untuk digunakan sebagai tangki timbun untuk pelayanan barang-barang termasuk barang curah cair mudah terbakar (*flammable*) dan pembangunan jaringan pipa bawah laut yang melintasi alur kolam pengasinan dan sebelah selatan *breakwater*. Perjanjian ini berlaku selama 18 tahun sampai dengan 17 Mei 2021.

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

- j) On March 2, 2012, the Company entered into an agreement with PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) for the use of a parcel of land under Rights to Manage (HPL) owned by the Company with Agreement No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. The Agreement included land management with area of 329,833 m² and is valid for 22 (twenty two) years until December 31, 2033.

The agreement has been approved by the Minister of State Owned Enterprise through the letter No. S-505/MBU/2011 dated October 5, 2011 regarding Approval of Optimization of the Company's Land which is used by Indofood.

Revenue earned by the Company from the usage of land amounted to Rp1,041,059,197 and paid periodically for 5 (five) terms, the fifth payment will be settled at the latest 36 (thirty six) months after the agreement was signed. The Company also earned an additional revenue from jetty operations amounting to Rp104,260 annually which will be paid at the latest 7 (seven) work days after the invoice is received by Indofood. As of the date of the financial statements, the payment received by the Company amounted to Rp1,041,059,197. As of December 31, 2017 and 2016, the balance of unamortized use of a parcel of HPL land amounted to Rp700,300,382 and Rp741,206,177, respectively (before deducting final income tax article 4.2).

- k) Based on Agreement No. HK/566/7/16/c.Tpk-04 dated May 27, 2004, the Company and PT AKR Corporindo Tbk entered into agreement of usage of land under the HPL owned by the Company with land area of 130,000 m² to be used as storage tank for goods including flammable liquid and the construction of undersea pipeline which passes the salting basin and south breakwater. The agreement is valid for 18 years until May 17, 2021.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

Berdasarkan surat dari AKR tanggal 22 Oktober 2007 dan surat Direksi Perusahaan tanggal 7 November 2007, kedua pihak sepakat untuk mengadakan pengalihan penggunaan lahan dari AKR kepada entitas anaknya yaitu PT Jakarta Tank Terminal (JTT).

Perjanjian ini telah diubah beberapa kali terakhir berdasarkan addendum No. HK.566/14/9/C.Tpk-10 mengenai penggunaan ruang di bawah dasar laut alur kolam pengasinan dan sebelah selatan *break water* seluas 1.400 m² serta perubahan luas lahan menjadi 130.004 m².

l) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat

Petikemas dan kargo

Pada tanggal 12 Juni 2012, Perusahaan dan beberapa Perusahaan Bongkar Muat (PBM) terseleksi mengadakan Perjanjian Kesepakatan Tingkat Layanan (SLA) dimana para pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat petikemas dan kargo pada wilayah kerja Perusahaan.

Atas pelayanan yang telah dilakukan, Perusahaan dan PBM akan mendapatkan bagi hasil pendapatan masing-masing sebesar 40% dan 60%, kecuali dengan PT PBM Olah Jasa Andal masing-masing sebesar 50% dan 50%.

Jangka waktu perjanjian adalah 14 September 2011 sampai dengan tanggal 31 September 2015.

Jangka waktu perjanjian telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, perpanjangan atas perjanjian-perjanjian tersebut masih dalam proses penyelesaian.

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

Based on a letter from AKR dated October 22, 2007 and letter from the Company's Director dated November 7, 2007, both parties agreed to transfer the usage of land from AKR to its subsidiary, PT Jakarta Tank Terminal (JTT).

This agreement has been amended several times, most recently based on addendum No. HK.566/14/9/C.Tpk-10 in relation of the usage of undersea salting basin and south breakwater with area of 1,400 m² and change of land area to 130,004 m².

l) Loading and Unloading Activities Cooperation

Container and cargo

On June 12, 2012, the Company and several Stevedoring Companies (PBM) entered into Service Level Agreement (SLA) whereas the parties agreed to perform loading and unloading activities for container and cargo in the Company's working area.

For the activities that have been performed, the Company and PBM will receive revenue sharing of 40% and 60%, respectively, except with PT PBM Olah Jasa Andal which is 50% and 50%, respectively.

The term of the agreement is from September 14, 2011 until September 13, 2015.

The term of the agreement was extended until December 31, 2017. Until the completion date of the consolidated financial statements, those agreement extension is still in process of completion.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**I) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat
(lanjutan)**

**I) Loading and Unloading Activities
Cooperation (continued)**

Petikemas dan kargo (lanjutan)

Container and cargo (continued)

No	Perusahaan/ Company	No. Perjanjian / Agreement No.	Wilayah kerja/ Work location	Jangka waktu/ Time period	Thruput minimum/ Minimum throughput
1	PT Mitra Sentosa Abadi	HK.566/3/2/11/ PTP-17	Terminal III	14/09/16 - 31/12/17	-
2	PT Adipurusa	HK.566/3/2/5 /PTP-17	Terminal II	14/09/16 - 31/12/17	-
3	PT Kaluku Maritama Utama	HK.566/3/2/8/ PTP-17	Terminal II	14/09/16 - 31/12/17	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
4	PT Sarana Bandar Nasional	HK.566/3/2/9/ PTP-17	Terminal II	14/09/16 - 31/12/17	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
5	PT Mitra Karunia Samudera	HK.566/3/2/4/ PTP-17	Terminal I	14/09/16 - 31/12/17	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
6	PT Dwipa Hasta Utamaduta	HK.566/3/2/7/ PTP-17	Terminal II	14/09/16 - 31/12/17	-
7	PT Tangguh Samudera Jaya	HK.566/3/2/14/ PTP-17	Terminal III	14/09/16 - 31/12/17	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
8	PT Sarana Ultra Layanan Kargo	HK.566/3/2/1/ PTP-17	Terminal I	14/09/16 - 31/12/17	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
9	PT Prima Nur Panurjwan	HK.566/3/2/10/ PTP-17	Terminal III	14/09/16 - 31/12/17	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
10	PT Mahardi Sarana Tama	HK.566/3/2/6/ PTP-17	Terminal II	14/09/16 - 31/12/17	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
11	PT Andika Andalan Tama	HK.566/3/2/12/ PTP-17	Terminal III	14/09/16 - 31/12/17	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
12	PT Daisy Mutiara Samudera	HK.566/3/2/13/ PTP-17	Terminal III	14/09/16 - 31/12/17	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
13	PT Escorindo Stevedoring	HK.566/3/2/2/ PTP-17	Terminal I	14/09/16 - 31/12/17	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year
14	PT PBM Olah Jasa Andal	HK.566/3/2/19/ PTP-17	Terminal III	14/09/16 - 31/12/17	-
15	PT Srikreasi Unggul Persada	HK.566/3/2/3/ PTP-17	Terminal II	14/09/16 - 31/12/17	1.000.000 ton per tahun/ ton per year atau/or 100.000 box per tahun/box per year

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

l) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat (lanjutan)

Kendaraan dan alat berat

Pada tanggal 7 November 2013, Perusahaan dan PBM terseleksi mengadakan SLA. Berdasarkan kesepakatan tersebut, para pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat kendaraan dan alat berat pada wilayah kerja Perusahaan.

Jangka waktu perjanjian adalah 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015.

Jangka waktu perjanjian telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, perpanjangan atas perjanjian-perjanjian tersebut masih dalam proses penyelesaian.

No	Perusahaan/ Company	No. Perjanjian / Agreement No.	Wilayah kerja/ Work location	Jangka waktu/ Time period	Thruput minimum/ Minimum throughput
1	PT Sapta Kencana Buana	HK.566/3/2/17/PTP- 17	All terminal	4/12/15 - 31/12/17	13.004 ton/tahun/ton per year
2	PT Adimas Bahtera Harapan	HK.566/3/2/15/PTP- 17	All terminal	4/12/15 - 31/12/17	95.000 unit kendaraan per tahun/vehicles per year
3	PT Jaya Cargo Gemilang Indonesia	HK.566/3/2/16/PTP- 17	All terminal	4/12/15 - 31/12/17	57.775 ton per tahun/ton per year
4	PT Triutama Karuna Samudera	HK.566/3/2/18/PTP- 17	All terminal	4/12/15 - 31/12/17	59.667 ton per tahun/ton per year

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan dermaga tambatan dan fasilitas pendukungnya, termasuk lapangan dan gudang dan PBM berkewajiban menyediakan alat-alat, tenaga kerja dan/atau alat bantu bongkar muat serta peralatan lain yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat.

Dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat, PBM berkewajiban memberikan thruput minimal yang jumlahnya disepakati para pihak.

Reward dan penalti akan diberikan kepada PBM atas pencapaian thruput minimal per tahun, sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian.

45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

l) Loading and Unloading Activities Cooperation (continued)

Vehicles and heavy equipment

On November 7, 2013, the Company and several selected PBM entered into SLA whereas the parties agreed to perform loading and unloading activities for vehicles and heavy equipment in the Company's working area.

The term of the agreement was from December 3, 2011 until December 3, 2015.

The term of the agreement was extended until December 31, 2017. Until the completion date of the consolidated financial statements, those agreement extension is still in process of completion.

Based on the above mentioned agreements, the Company has obligation to provide dock and supporting facilities, including yard and warehouse and PBM have obligation to provide equipment, workers and/or supporting equipment and others equipment needed to perform the loading and unloading activities.

In performing the loading and unloading activities, PBM have obligation to provide minimum throughput which was agreed by the parties.

Reward and penalty will be given to PBM for the achievement of the minimum throughput per year, as stipulated in the agreement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

m) Perjanjian Konsesi

Pada tanggal 11 November 2015, Perusahaan dan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (Otoritas Pelabuhan) telah menandatangani Perjanjian Konsesi tentang Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh Perusahaan (Perjanjian Konsesi), yang telah diadendum tanggal 15 Juli 2016, yang mencakup pemberian hak dari Otoritas Pelabuhan kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di area konsesi yang diusahakan oleh Perusahaan sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan Perjanjian Konsesi tersebut, Perusahaan diharuskan untuk membayar pendapatan konsesi yang diperoleh dari kegiatan usaha kepelabuhanan di area konsesi pada masing-masing pelabuhan kepada Otoritas Pelabuhan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak setiap 3 (tiga) bulan sebesar 2,5% dari pendapatan kotor dari pelaksanaan kegiatan usaha kepelabuhanan di area konsesi. Pada saat berakhirnya Perjanjian Konsesi ini, seluruh aset Perusahaan di dalam area konsesi, termasuk tanah yang berstatus hak pengelolaan atas nama dan/atau tanah yang tercatat sebagai aset Perusahaan, tetap menjadi aset dan hak pengelolaan dan/atau tanah Perusahaan.

n) Perjanjian Kredit Modal Kerja

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja KMK (KMK) No. 48 tanggal 18 September 2012 dan Perjanjian KMK No. 50 tanggal 18 September 2012, Perusahaan menerima fasilitas *club deal* KMK sebesar Rp1.000.000.000 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) dengan jumlah fasilitas maksimum masing-masing sebesar Rp500.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk kredit modal kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan tingkat bunga sebesar suku bunga rata-rata deposito berjangka +3,65%.

**45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

m) Concession Agreement

On November 11, 2015, the Company and Tanjung Priok Main Port Authority Office (Port Authority) has signed Concession Agreement regarding Operational Activities at Port that was Operated by the Company (Concession Agreement), which has been amended on July 15, 2016, which includes granting rights from the Port Authority to the Company to perform operation on providing and/or servicing of port services on operated concession area in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Sailing. Based on the Concession Agreement, the Company is obliged to pay concession revenue obtained from the port operation at concession area on each port to Port Authority as Non-tax State Revenue every 3 (three) months amounting to 2.5% of gross revenue from port operation at concession area. At the end of Concession Agreement, all the Company's assets in the concession area, including landrights and/or land recorded as the Company's assets, will remain assets and landrights and/or land of the Company.

n) Working Capital Credit Agreement

Based on Working Capital Credit (KMK) Agreement No. 48 dated September 18, 2012 and KMK Agreement No. 50 dated September 18, 2012, the Company received KMK club deal credit facility amounting to Rp1,000,000,000 from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) with maximum facility of Rp500,000,000, respectively. This facility is used for working capital with period of 1 (one) year and bears interest at average time deposit +3.65%.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

n) Perjanjian Kredit Modal Kerja (lanjutan)

Fasilitas tersebut telah beberapa kali diperpanjang melalui Adendum I Perjanjian KMK No. 22 tanggal 28 Agustus 2013, Adendum I Perjanjian KMK No. 19 tanggal 28 Agustus 2013, Adendum II Perjanjian KMK No. 22 tanggal 22 Agustus 2014 dan Adendum II Perjanjian KMK No. 20 tanggal 22 Agustus 2014 dengan jangka waktu sampai dengan 17 September 2015.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan *negative pledge*, yaitu segala harta kekayaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan pelunasan total terhutang yang timbul dari Perjanjian KMK.

Perusahaan memperpanjang fasilitas KMK dengan Mandiri dengan jangka waktu sampai dengan 17 September 2016 melalui Adendum III Perjanjian KMK No. TOP.CRO/CCL.553/ADD/2015 tanggal 11 September 2015. Berdasarkan Adendum III Perjanjian KMK tersebut, jumlah fasilitas kredit modal kerja diubah menjadi Rp300.000.000 dengan suku bunga JIBOR 3 bulan + 2,50%.

Perusahaan memperpanjang fasilitas KMK dengan BNI dengan jangka waktu sampai dengan 17 September 2016 melalui Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 48 tanggal 17 September 2015. Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit tersebut, suku bunga diubah menjadi JIBOR 3 bulan + 2,50%.

Pada tanggal 15 September 2016, Perusahaan mengadakan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian KMK dengan Mandiri yang mengubah jumlah fasilitas kredit menjadi Rp250.000.000 dengan alokasi sebagai berikut:

- Perusahaan Rp100.000.000
- PTP Rp50.000.000
- JPPI Rp50.000.000
- IKT Rp50.000.000

45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

n) Working Capital Credit Agreement (continued)

These facilities have been extended several times through Amendment I of the KMK Agreement No. 22 dated August 28, 2013, Amendment I of the KMK Agreement No. 19 dated August 28, 2013, Amendment II of the KMK Agreement No. 22 dated August 22, 2014 and Amendment II of the KMK Agreement No. 20 dated August 22, 2014 with period until September 17, 2015.

The credit facilities are secured by negative pledge, which are all assets, both moving and non-moving, and those existing or will exist as collateral of the total loan from the KMK agreement.

The Company extended the KMK facility with Mandiri for the period until September 17, 2016 through Amendment III KMK Agreement No. TOP.CRO/CCL.553/ADD/2015 dated September 11, 2015. Based on the Amendment III KMK Agreement, the amount of credit facility was amended to Rp300,000,000 with interest at JIBOR 3 months + 2.50%.

The Company extended the KMK facility with BNI for the period until September 17, 2016 through Credit Amendment Agreement No. (3) 48 dated September 17, 2015. Based on the Credit Amendment Agreement, the interest was amended to be at JIBOR 3 months + 2.50%.

On September 15, 2016, the Company entered into Amendment and Restatement of KMK Agreement with Mandiri which amended the credit facility to Rp250,000,000 with allocation as follows:

- *The Company Rp100,000,000*
- *PTP Rp50,000,000*
- *JPPI Rp50,000,000*
- *IKT Rp50,000,000*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

n) Perjanjian Kredit Modal Kerja (lanjutan)

Fasilitas KMK tersebut berjangka waktu sampai dengan 14 September 2017 dengan suku bunga akan ditetapkan pada saat penarikan dan bersifat tetap sampai dengan akhir jangka waktu penarikan.

Perusahaan memperpanjang fasilitas KMK dengan BNI dengan jangka waktu sampai dengan 17 September 2017 melalui Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4) 48 tanggal 16 September 2016. Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit tersebut, jumlah fasilitas kredit modal kerja diubah menjadi Rp250.000.000.

Fasilitas KMK dari Mandiri dan BNI tersebut tidak diperpanjang.

o) Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik Jawa Timur

Pada tanggal 9 April 2015, IKT mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan di Gresik Jawa Timur dengan PT Maspion Industrial Estate (MIE) dengan membentuk manajemen kerjasama operasi (MKO) Maspion Terminal Kendaraan Indonesia. Jangka waktu perjanjian adalah 25 tahun dengan porsi pendanaan IKT dan MIE masing-masing sebesar 45% dan 55%.

46. PERKARA HUKUM

a) Gugatan dari Ir. Nuraini Udaya, Handara, S. Maryono, Doly Indra Nasution

Penggugat menyatakan bahwa Kantor Pertanahan mengakui adanya tumpang tindih HPL No.1 dan No.2 dengan tanah-tanah milik Penggugat (surat No.300.7-45/1/2010 tanggal 22 Januari 2010 Perihal Klarifikasi Status Tanah 565 Sertifikat Hak Milik dan Salinan Peta Lokasi Tanah yang terletak di Desa Pulo Ampel dan Desa Margasari Kec. Bojonegara Kabupaten Serang).

45. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

n) Working Capital Credit Agreement (continued)

The KMK Facility period until September 14, 2017 with interest rate will be determined upon withdrawal and at fixed rate until the end of withdrawal period.

The Company extended the KMK facility with BNI for the period until September 17, 2017 through Credit Amendment Agreement No. (4) 48 dated September 16, 2016. Based on the Credit Amendment Agreement, the amount of credit facility was amended to Rp250,000,000.

The credit facilities from Mandiri and BNI are not extended.

o) Construction and Operation Car Terminal In Gresik Jawa Timur

On April 9, 2015, IKT entered into an Agreement of Construction and Operation of Car Terminal in Gresik Jawa Timur with PT Maspion Industrial Estate (MIE) by establishing joint operation management (MKO) Maspion Terminal Kendaraan Indonesia. The period of agreement is 25 years with the funding portion for IKT and MIE amounting to 45% and 55%, respectively.

46. LAWSUIT

a) Lawsuit Filed by Ir. Nuraini Udaya, Handara, S. Maryono, Doly Indra Nasution

The Plaintiffs claimed that the Land Administration Office has admitted the existence of overlapping of HPL No. 1 and No. 2 with lands owned by the Plaintiffs (Letter No. 300.7-45/1/2010 dated January 22, 2010 regarding Clarifications on Status of Lands 565 Right of Ownership and copy of Land Location Map situated at Pulo Ampel Village and Margasari Village, Sub-District of Bojonegara, District of Serang).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- a) Gugatan dari Ir. Nuraini Udaya, Handara, S. Maryono, Doly Indra Nasution (lanjutan)

Penggugat mendalilkan bahwa kantor Pertanahan Kab. Serang telah salah mengeluarkan sertifikat HPL karena dianggap sudah mengetahui adanya sertifikat yang dimiliki oleh para Penggugat, sehingga dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan Nomor 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT tanggal 23 April 2012 telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat.

Pada tanggal 14 Agustus 2012, Perusahaan telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut di atas ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan Nomor 634/PDT/2014/PT.DKI jo. 435/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut yang Amarnya pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT tanggal 23 April 2012.

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perusahaan menempuh upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di atas. Pada tanggal 6 Maret 2017, Perusahaan menerima salinan putusan kasasi No.3281 K/Pdt/2015 yang menolak permohonan kasasi Perusahaan. Atas putusan kasasi tersebut, Perusahaan sedang menyiapkan upaya hukum Peninjauan Kembali.

46. LAWSUIT (continued)

- a) Lawsuit Filed by Ir. Nuraini Udaya, Handara, S. Maryono, Doly Indra Nasution (continued)

Plaintiffs argued that Land Administration Office of Serang District has mistakenly issued HPL Certificate, on the ground that the Land Administration Office was deemed to have known the existence of certificates owned by the Plaintiffs. Therefore, the Land Administration Office has been categorized to have breached the law.

The North Jakarta District Court in their decision No. 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT dated April 23, 2012 has granted in part the lawsuit filed by the Plaintiffs.

On August 14, 2012, the Company has filed an appeal against the decision issued by the North Jakarta District Court as stated above to the DKI Jakarta High Court.

The DKI Jakarta High Court in their decision No. 634/PDT/2014/PT.DKI jo. 435/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut, strengthened the North Jakarta District Court decision No. 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT dated April 23, 2012.

On June 9, 2015, the Company has filed a cassation through the Supreme Court of the Republic of Indonesia on the decision issued by high court of DKI Jakarta as stated above. On March 6, 2017, the Company has obtained a copy of cassation verdict Number 3281 K/Pdt/2015 that rejected the company's appeal. Against the cassation verdict, the Company is currently preparing Judicial Review.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- b) Gugatan dari Sdr. Bakri Abdullah kepada Perusahaan Cabang Teluk Bayur Nomor Perkara 95/PDT.G/2010/PN.PDG Jo. Nomor Perkara 10/PDT/2012.PT.PDG

Sdr. Bakri Abdullah (Penggugat) telah menuntut ganti rugi atas tidak dilakukannya perpanjangan kontrak penggunaan lahan di jalan *By Pass* Padang seluas 5.000 m2 antara Cabang Teluk Bayur dengan Puskoppolda Sumatera Barat berdasarkan Perjanjian Nomor HK.56/4/4/C.Tbs-2005 tanggal 25 Oktober 2005 dan lahan seluas 10.000 m2 berdasarkan Perjanjian Nomor HK.56/4/4/C.Tbs-2005 tanggal 25 Oktober 2005 dan lahan seluas 10.000 m2 berdasarkan Perjanjian Nomor HK.56/5/15 C.Tbs-2005 yang selanjutnya oleh Puskoppolda Sumatera Barat dikerjasamakan dengan Penggugat Surat melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor Kop: B/03.A/35.1/XII/2005/ Puskoppol tanggal 5 Desember 2005, hal mana dilakukan tanpa sepengetahuan Cabang Teluk Bayur. Akibat tidak diperpanjangnya perjanjian dengan Puskoppolda tersebut diklaim telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

Disamping itu, Penggugat menuntut ganti rugi atas terjadinya kerusakan aset milik Penggugat di lahan obyek sengketa sebesar Rp1,84 miliar.

Pengadilan Negeri Padang dalam Putusannya Nomor 95/Pdt.G/2010/PN.PDG tanggal 16 November 2011 menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan dinyatakan Nebis *In Idem* karena gugatan dianggap sama dengan perkara yang pernah diperiksa dan telah mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Padang Nomor 10/PDT/2012.PT.PDG tanggal 31 Januari 2012. Pengadilan Tinggi Padang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang dan memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa dan memutus pokok perkara sepanjang menyangkut dasar gugatan kerusakan tersebut dan petitem yang berkaitan dengan dasar gugatan tersebut.

46. LAWSUIT (continued)

- b) Lawsuit Filed by Bakri Abdullah against Company - Teluk Bayur Branch with Case Number 95/PDT.G/2010/PN.PDG Jo. Case Number 10/PDT/2012.PT.PDG

Bakrie Abdullah (the Plaintiff) claimed for compensation because he was not granted an extension to contract regarding the use of land at By Pass road in Padang with area of 5,000 m2 between Teluk Bayur Branch and Puskoppolda Sumatera Barat pursuant to Agreement No. HK.56/4/4/C.Tbs-2005 dated October 25, 2005 and a land area of 10,000 m2 pursuant to Agreement No. HK.56/5/15 C.Tbs-2005 which furthermore was being cooperated by Puskoppolda of West Sumatera with the plaintiff through Jo. Cooperation Agreement No. Kop: B/03.A/35.1/XII/2005/Puskoppol dated December 5, 2005; this cooperation was without the acknowledgement of Teluk Bayur Branch. No extension of cooperation with Puskoppolda has been claimed to have created loss to the Plaintiff.

In addition to above, the Plaintiff claimed for compensation due to the damage of assets owned by the Plaintiff on the disputed land amounting of Rp1.84 billion.

The Padang District Court in their decision No. 95/Pdt.G/2010/PN.PDG dated November 16, 2011 stipulated that the lawsuit could not be accepted and stated as Nebis in Idem on the ground that the lawsuit was deemed to be the same with a case that has been examined and has been granted with a decision.

In a decision on appeal letter issued by Padang High Court No. 10/PDT/2012.PT.PDG dated January 31, 2012. High Court of Padang has revoked the decision of District Court of Padang and instructed the Panel of Judges of District Court of Padang to examine and close the substance of case as long as related to the basis of lawsuit concerning the damage and petition related to the basis for such lawsuit.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- b) Gugatan dari Sdr. Bakri Abdullah kepada Perusahaan Cabang Teluk Bayur Nomor Perkara 95/PDT.G/2010/PN.PDG Jo. Nomor Perkara 10/PDT/2012.PT.PDG (lanjutan)

Pengadilan Negeri Padang dalam Putusannya Nomor 95/Pdt.G/2010/PN.PDG tanggal 23 Mei 2012 kembali memeriksa dan memutuskan perkara dimaksud, dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan sebagian gugatan Rekonsensi dari Perusahaan antara lain memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah kepada Perusahaan; menghukum Penggugat untuk membayar ganti kerugian kepada Perusahaan sebesar Rp16,5 miliar; dan membayar bunga moratoir sebesar Rp275 juta; serta membayar kerugian immateriil sebesar Rp10 miliar.

Dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Padang Nomor 126/Pdt/2012/PT.PDG tanggal 17 September 2012 Pengadilan Tinggi Padang kembali membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 95/Pdt.G/2010/PN.PDG tanggal 23 Mei 2012, dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Ne Bis in Idem.

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Penggugat dan Perusahaan mengajukan Kasasi dan berdasarkan relas pemberitahuan putusan Kasasi yang diterima oleh Perusahaan pada tanggal 16 Februari 2016 diperoleh informasi bahwa permohonan Kasasi Pemohon Kasasi I dan Perusahaan ditolak.

Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 661 K/Pdt/2013 tanggal 19 Desember 2014, pokok amarnya menyatakan menolak permohonan kasasi dari Sdr. Bakri Abdullah dan Perusahaan Cabang Teluk Bayur.

- c) Gugatan dari Sdr. Syamsul Bachri. CS (131 Orang) eks Warga Koja Utara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 293/PDT.G/2011/PN.JKT.UT

Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah yang dikosongkan oleh Perusahaan antara tahun 1993 - 1997 untuk pembangunan terminal petikemas Koja dan belum menerima ganti rugi.

46. LAWSUIT (continued)

- b) Lawsuit Filed by Bakri Abdullah against Company - Teluk Bayur Branch with Case Number 95/PDT.G/2010/PN.PDG Jo. Case Number 10/PDT/2012.PT.PDG (continued)

Padang District Court in their decision No. 95/Pdt.G/2010/PN.PDG dated May 23, 2012 re-examined and made decision on the case, rejecting Plaintiff's lawsuit for the whole and partially grant the counterclaim filed by the Company i.e., among others instruct the Plaintiff to clear and surrender the land to the Company; penalize the Plaintiff to pay compensation to the Company amounting to Rp16.5 billion plus interest amounting to Rp275 million; and instruct to pay immaterial compensation amounting to Rp10 billion.

In a decision on appeal issued by Padang High Court No. 126/Pdt/2012/PT.PDG dated September 17, 2012, the Padang High Court revoked the decision issued by Padang District Court No. 95/Pdt.G/2010/PN.PDG dated May 23, 2012 with a dictum that the Plaintiff's lawsuit was not acceptable due to Ne Bis in Idem.

Against the decision of high court, the Plaintiffs and the Company filed a cassation and based on notification of the cassation decision that received by Company on February 16, 2016, the Company obtained information that the cassation appeal from Cassation Appealant I and the Company's appeal were rejected.

Based on the Supreme Court of Cassation Decision in Decision No. 661 K/Pdt/2013 dated December 19, 2014, the principal verdict stated to reject the appeal from Sdr. Bakri Abdullah and the Company - Teluk Bayur Branch.

- c) Lawsuit Filed by Syamsul Bachri and Group (131 People) (the plaintiffs) Ex Northern Koja Residents at District Court of Northern Jakarta with a Case No. 293/PDT.G/2011/PN.JKT.UT

The Plaintiffs claimed as the owner of lands that were cleared by the Company in 1993 - 1997 for construction of container terminal of Koja and have not received the relevant compensation.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- c) Gugatan dari Sdr. Syamsul Bachri. CS (131 Orang) eks Warga Koja Utara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 293/PDT.G/2011/PN.JKT.UT (lanjutan)

Tuntutan ganti rugi pengosongan tanah yang digunakan Perusahaan untuk Pembangunan Terminal Petikemas Koja dengan total tuntutan sebesar Rp1,07 triliun.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 293/Pdt.G/2011/PN.JKT-UT tanggal 28 Agustus 2012, eksepsi Perusahaan (Tergugat) ditolak seluruhnya; mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; menghukum Perusahaan (Tergugat) untuk membayar kekurangan pembayaran ganti rugi lahan Koja Utara kepada warga senilai Rp7 miliar.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 435/PDT/2013/PT.DKI tanggal 16 April 2014 yang amar putusannya menyatakan gugatan Syamsul Bachri ditolak.

Pada tanggal 14 Juli 2014, Syamsul Bachri mengajukan permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No.3066 K/Pdt/2014 telah menyatakan menolak permohonan kasasi dari Syamsul Bachri.

- d) Permasalahan Hubungan Industrial dengan 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan Perusahaan yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan
- Terdapat 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan Perusahaan mengajukan pengunduran diri dari jabatan kepada Manajemen Perusahaan dikarenakan merasa sudah tidak sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh manajemen Perusahaan.

46. LAWSUIT (continued)

- c) *Lawsuit Filed by Syamsul Bachri and Group (131 People) (the plaintiffs) Ex Northern Koja Residents at District Court of Northern Jakarta with a Case No. 293/PDT.G/2011/PN.JKT.UT (continued)*

The compensation claimed by the Plaintiffs due to land clearance area for construction of container terminal of Koja amounted to Rp1.07 trillion.

Based on the Decision issued by North Jakarta District Court of No. 293/Pdt.G/2011/PN.JKT-UT dated August 28, 2012, the whole exception made by Company (defendant) has been rejected; partially granting the Plaintiff's lawsuit; penalizing the Company (defendant) to pay the underpayment compensation for North Koja lands to the respective residents amounting to Rp7 billion.

Based on the Decision issued by high court of DKI Jakarta No. 435/PDT/2013/PT.DKI dated April 16, 2014 Syamsul Bachri's lawsuit was rejected.

On July 14, 2014, Syamsul Bachri has filed a cassation on the decision issued by high court of DKI Jakarta. Until the completion date of this consolidated financial statements, Supreme Court has stated in Cassation Verdict Number 3066 K/Pdt/2014 to reject the appeal from Syamsul Bachri.

- d) *Industrial Relations Issue with 33 (thirty three) employees of the Company who resigned from their position*
- *There were 33 (thirty three) employees of the Company who rendered their resignation from their position to the management of the Company as they felt they were not in line with the policy undertaken by the Company's management.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

d) Permasalahan Hubungan Industrial dengan 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan Perusahaan yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan (lanjutan)

- Atas dasar permohonan pengunduran diri dari jabatan tersebut, manajemen Perusahaan mengeluarkan surat persetujuan pengunduran diri sebagai karyawan Perusahaan kepada 33 (tiga puluh tiga) karyawan tersebut dengan dasar bahwa pengunduran diri dari jabatan tidak dikenal di dalam Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta dalam Perjanjian Kerja Bersama. Terhadap surat persetujuan dimaksud, kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Direksi tentang Pengakhiran Hubungan Kerja kepada masing-masing karyawan, namun demikian ada beberapa orang dari ke-33 orang karyawan tersebut yang mengajukan surat permohonan untuk dapat diangkat kembali sebagai karyawan dan 3 orang karyawan sudah diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sehubungan dengan ke 30 (tiga puluh) karyawan tidak terima dengan keputusan Manajemen terkait Pengakhiran Hubungan Kerja, maka melalui Kuasa Hukumnya yakni Ihza & Ihza Lawfirm, mengirimkan Somasi kepada Manajemen Perusahaan dan menuntut untuk dapat dipekerjakan kembali serta diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas Somasi tersebut. Manajemen Perusahaan melalui Kuasa Hukumnya (Kantor Hukum Kemalsjah & Associates) menolak somasi dimaksud.
- Atas penolakan tersebut, Kuasa Hukum Karyawan mendaftarkan penyelesaian tersebut di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara untuk tujuan mediasi.
- Sehubungan dengan gagalnya mediasi ke 30 karyawan yang tidak menerima keputusan manajemen mendaftarkan gugatan industrial pada masing-masing wilayah kerja antara lain Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) DKI Jakarta, PHI Bandung, PHI Serang, PHI Jambi dan PHI Palembang.

46. LAWSUIT (continued)

d) *Industrial Relations Issue with 33 (thirty three) employees of the Company who resigned from their position (continued)*

- *In response to such resignation from the position, the management of the Company issued consent letters to those 33 (thirty three) employees for resignation as the employees of the Company on the basis that the resignation from the job position is not recognized in Law No. 13 of 2003 regarding Labor and the Collective Working Agreement. As a follow up on the consents for resignation, Director's Decisions Letters were issued regarding Employment Termination to each employee. However, there were several terminated employees out of those 33 (thirty three) employees who rendered request letters asking for rehiring as employees. Three employees have been rehired in accordance with the prevailing regulations.*
- *As 30 (thirty) employees did not accept management decisions regarding employment termination, they sent a legal notice to the management of the Company through their legal counsel from Ihza & Ihza Law Firm, demanding for rehiring and receiving their rights in accordance with the prevailing regulations. In response to such legal notice, the management of the Company through their legal counsel from Kemalsjah & Associates Law Firm rejected the legal notice in question.*
- *In response to such rejection, the employees' legal counsel applied for resolution to the case to the Transmigration and Man Power Office of North Jakarta for mediation purpose.*
- *Following to the failed mediation process with 30 employees that did not accept the management decision, the 30 employees submitted industrial lawsuit to Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) DKI Jakarta, PHI Bandung, PHI Serang, PHI Jambi and PHI Palembang.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

d) Permasalahan Hubungan Industrial dengan 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan Perusahaan yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan (lanjutan)

- PHI Jakarta dalam amarnya melalui surat Putusan No.114/PHI.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 23 Juli 2014 menyatakan bahwa hubungan kerja antara 23 mantan karyawan dan Perusahaan berakhir terhitung 22 Juli 2014 dan tergugat wajib membayar kepada 23 mantan karyawan dengan nilai sebesar Rp15.742.190. Atas putusan tersebut Perusahaan mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, Perusahaan masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601 K/Pdt.Sus-Phi/2014 tanggal 7 Januari 2015 dalam amarnya menyatakan membatalkan putusan pengadilan Hubungan Industrial pada PN Jakarta Pusat, mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan hubungan kerja putus, mewajibkan kepada Perusahaan untuk membayar hak para Penggugat antara lain manfaat program pensiun, Uang Pisah sebesar 2x Gaji Merit dan bantuan uang pindah sebagaimana diatur dalam PKB.
- Putusan PHI Palembang No. 14/Pdt.Sus/PHI/2014/PN.Plg tanggal 25 Nopember 2014 dalam amar putusannya menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan Perusahaan berkewajiban membayar uang bantuan pindah sebesar Rp39.888. Atas putusan tersebut, penggugat mengajukan kasasi. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Mahkamah Agung dalam Putusan No.292 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 11 Juni 2015 telah menolak permohonan kasasi pekerja sehingga memenangkan Perusahaan.

46. LAWSUIT (continued)

d) *Industrial Relations Issue with 33 (thirty three) employees of the Company who resigned from their position (continued)*

- *The PHI Jakarta through its Decision letter No. 114/PHI.G/2014/PN.JKT.PST dated July 23, 2014, stated that the work relation between the 23 ex-employees and the Company ended as of July 22, 2014 and the defendant was obliged to paid to the 23 ex-employees amounted to Rp15,742,190. Against the decision, the Company filed a cassation to the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Until the date of the financial statements, the status is still pending the decision from the Supreme Court. Based on Decision of Supreme Court of Republic Indonesia No. 601 K/Pdt.Sus-Phi/2014 dated January 7, 2015 it was decided to reverse the court decision of the Jakarta Pusat District Court regarding industrial relations to reject all the claims of the plaintiff to declare the termination of working relationship and to require the Company to pay the Plaintiff's right such aspension program benefit, severance payment amounting to 2x Salary and relocation fund as regulated in PKB.*
- *The PHI Palembang through its Decision letter No. 14/Pdt.Sus/PHI/2014/PN.Plg dated November 25, 2014, rejected all the plaintiff claims and the Company obliged to pay Rp39,888. Against the decision, the plaintiff filed a cassation to the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Until the completion date of this consolidated financial statements, this case is stil in the cassation process at the Supreme Court. Until the completion date of this consolidated financial statements, Supreme Court has stated in Cassation Verdict No. 292 K/Pdt.Sus-PHI/2015 on June 11, 2015 to reject the appeal from Employee, that won the Company.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

d) Permasalahan Hubungan Industrial dengan 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan Perusahaan yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan (lanjutan)

- Putusan PHI Bandung No. 121/Pdt/-Sus-PHI/2014/PN.BDG pada tanggal 20 Oktober 2014 dalam amar putusannya menyatakan menerima gugatan penggugat untuk sebagian, menghukum Perusahaan untuk mempekerjakan kembali para penggugat, membayar upah para penggugat sebesar Rp502.971. Atas putusan tersebut, Perusahaan menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No.138 k/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 16 April 2015 telah menyatakan menerima permohonan kasasi dari Perusahaan, dan membatalkan Putusan PHI Bandung No.121/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg, sehingga memenangkan Perusahaan.
- Putusan PHI Jambi No. 13/G/2014/PHI.Jmb tanggal 20 November 2014 dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menghukum Perusahaan untuk mempekerjakan kembali penggugat dan membayar upah penggugat sampai putusan Inkracht. Atas putusan tersebut, Perusahaan telah menempuh upaya hukum Kasasi ke mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No.123 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 16 April 2015 telah menyatakan mengabulkan permohonan kasasi Perusahaan, dan membatalkan Putusan PHI Jambi No.13/G/2014/PHI.Jmb., sehingga memenangkan Perusahaan.

46. LAWSUIT (continued)

d) *Industrial Relations Issue with 33 (thirty three) employees of the Company who resigned from their position (continued)*

- *The PHI Bandung through its Decision letter No. 121/Pdt/-Sus-PHI/2014/PN.BDG dated October 20, 2014 partially granted the plaintiff claims, and punished the Company to rehire the plaintiffs, to pay the plaintiffs salaries amounting to Rp502,971. The Supreme Court through its Cassation Verdict No. 138k/Pdt.Sus-PHI/2015 on April 16, 2015 has stated to accept the appeal from the Company, and cancelled the Decision Letter of PHI Bandung No. 121/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg, thus resulting a win to the Company.*
- *The PHI Jambi through its Decision letter No. 13/G/2014/PHI/PN.Jmb dated November 20, 2014 partially granted the plaintiff claims, and punished the Company to rehire the plaintiffs, to pay the plaintiffs salary until In a binding decision. The Supreme Court through its Cassation Verdict No.123 K/Pdt.Sus-PHI/2015 on April 16, 2015 has stated to accept the appeal from the Company, and cancelled the Decision Letter of PHI Jambi No. 13/G/2014/PHI.Jmb, thus resulting a win to the Company.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- d) Permasalahan Hubungan Industrial dengan 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan Perusahaan yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan (lanjutan)
- Putusan PHI Serang No. 49/PHI.G/2014/PN.Srg tanggal 26 November 2014. Dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menghukum tergugat untuk mempekerjakan kembali penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar upah penggugat sebesar 6 (enam) bulan upah sebesar Rp68.546. Perusahaan telah menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No.438 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 28 Agustus 2015 menyatakan mengabulkan permohonan kasasi Perusahaan, dan membatalkan Putusan PHI Serang No.49/PHI.G/2014/PN.Srg, sehingga memenangkan Perusahaan.
- e) Permasalahan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) yang diajukan oleh FX Arief Poyuono dan Haris Rusli untuk Menuntut Pembatalan perpanjangan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan PT Jakarta International Container Terminal.
- FX Arief Poyuono dan Haris Rusli mengajukan gugatan warga negara (citizen law suit) kepada Perusahaan selaku Tergugat I, Pemerintah RI c.q Menteri Perhubungan selaku Tergugat II, Hutchison Port Holdings Ltd selaku Turut Tergugat I, dan PT Jakarta International Container Terminal ("JICT") selaku Turut Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pokok gugatan agar dilakukan pembatalan atas perpanjangan perjanjian kerjasama antara Perusahaan dengan JICT, yang diregister dengan nomor perkara 349/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
 - Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan gugatan tidak diterima sehingga memenangkan Perusahaan.

46. LAWSUIT (continued)

- d) *Industrial Relation Issue with 33 (thirty three) employees of the Company who resigned from their position (continued)*
- *The PHI Serang through its Decision letter No. 49/PHI.G/2014/PN.Srg dated November 26, 2014, partially granted the plaintiff claims, and punished the Company to rehire the plaintiffs, to pay the plaintiffs salary for 6 (six) months amounting to Rp68,546. The Supreme Court through its Cassation Verdict No. 438 K/Pdt.Sus-PHI/2015 on August 28, 2015 has stated to accept the appeal from the Company, and cancelled the Decision Letter of PHI Serang No. 49/PHI.G/2014/PN.Srg, thus resulting a win to the Company.*
- e) *Citizen Suit Law submitted by FX Arief Poyuono and Haris Rusli to claim the cancelation of extension cooperation agreement between the Company and PT Jakarta International Container Terminal.*
- *FX Arief Poyuono and Haris Rusli submitted a Citizen Suit Law to the Company as Defendant I, Government of the Republic of Indonesia c.q. Minister of Transportation as Defendant II, Hutchison Port Holdings Ltd as co-defendant I, and PT Jakarta International Container Terminal ("JICT") as co-defendant II through Jakarta Pusat District Court with principal lawsuit to order cancelation of extension cooperation agreement between Company and JICT, which is registered with case number 349/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.*
 - *Until the completion date of this consolidated financial statements, Jakarta Pusat District Court has rejected the lawsuit thus resulting a win to the Company.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- f) Permasalahan Gugatan PT Resources Alam Indonesia Tbk untuk meminta pembatalan sertifikat hak pengelolaan tanah No. 91 atas nama Perusahaan yang berada di Palembang.
- PT Resources Alam Indonesia Tbk (dahulu PT Susel Prima Permai) mengklaim memiliki tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 100/Sei Selincah tanggal 22 Agustus 1990 seluas 34.340 m², dan tanah Sertifikat HGB No.101/Sei Selincah tanggal 22 Agustus 1990 seluas 65.690 m², keduanya terletak di Desa Sungai Selincah Kecamatan Ilir Timur, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kedua Sertifikat HGB tersebut berakhir pada tanggal 27 April 2012.
 - Perusahaan mempunyai tanah dengan sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) No. 91/Sungai Selincah tanggal 6 Januari 2012 seluas 23.500 m².
 - PT Resources Alam Indonesia Tbk mengklaim bahwa Kantor Pertanahan Kota Palembang menyatakan bahwa perpanjangan kedua Sertifikat tersebut belum dapat dilakukan, dan bahwa telah ada HPL atas nama Perusahaan.
 - PT Resources Alam Indonesia Tbk mengajukan gugatan kepada Perusahaan selaku Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional c.q Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Palembang yang di register dengan nomor perkara 182/Pdt.G/2016/PN.Plg., dengan pokok gugatan agar dilakukan pembatalan atas HPL tersebut di atas dan dilakukan perpanjangan atas HGB tersebut di atas, menuntut ganti rugi sebesar Rp10,56 miliar ditambah bunga 2% perbulan sejak Juli 2012 sampai dibayar lunas, dan ganti rugi immateriil sebesar Rp1 miliar, serta dilakukan sita jaminan atas HPL atas nama Perusahaan tersebut di atas seluas 23.500 m².

46. LAWSUIT (continued)

- f) Claims of PT Resources Alam Indonesia for cancelation of right of land management certificate (HPL) No. 91 under the Company's name in Palembang.
- PT Resources Alam Indonesia Tbk (formerly PT Susel Prima Permai) claimed to have land with Building Rights Title No. 100/Sei Selincah dated August 22, 1990 with area of 34,340 m², and land with Building Rights Title No.101/Sei Selincah dated August 22, 1990 with area of 65,690 m², both of them located at Desa Sungai Selincah Kecamatan Ilir Timur, Palembang, Sumatera Selatan. Both Building Rights Title have expired on April 27, 2012.
 - The Company has land with right of land management certificate (HPL) No. 91/Sungai Selincah dated January 6, 2012 with area of 23,500 m².
 - PT Resources Alam Indonesia Tbk claimed that Palembang Land Administration Office stated that both Building Rights Title cannot be extended since there has been HPL under the company's name.
 - PT Resources Alam Indonesia Tbk submitted claim to Company as Defendant I and National Land Authority c.q Land Administration Office Palembang City as Defendant II through Palembang District Court which was registered with Case Number 182/Pdt.G/2016/PN.Plg., with principle lawsuit to cancel the above HPL Certificate No. 91/Sungai Selincah and to extend the above Building Rights Title, claimed for compensation amounting Rp10.56 billion plus interest 2% per month since July 2012 until fully paid, and immaterial compensation amounting to Rp1 billion, and land sequestration of the above HPL under the Company's name with area of 23,500 m².

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- f) Permasalahan Gugatan PT Resources Alam Indonesia Tbk untuk meminta pembatalan sertifikat hak pengelolaan tanah No. 91 atas nama Perusahaan yang Berada di Palembang (lanjutan)
- Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan No.182/Pdt.G/2016/PN.Plg., telah menyatakan bahwa Sertifikat HPL No.91/Sungai Selincah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah HPL No.91/Sungai Selincah, denda kepada Perusahaan sebesar Rp25 juta per tahun sejak terbitnya HPL No.91/Sungai Selincah tanggal 3 januari 2012 sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Atas putusan tersebut Perusahaan telah menempuh upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang.
 - Pengadilan Tinggi Palembang dalam Putusan Banding No.105/Pdt/2017/PT.Plg., telah menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.182/Pdt.G/2016/PN.Plg. Pada tanggal 14 Februari 2018 Perusahaan telah mengajukan permohonan kasasi.
- g) Permasalahan gugatan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Dewan Pengurus Wilayah Lampung (DPW APBMI Lampung) yang menuntut pembatalan perjanjian kerjasama dengan Cabang Pelabuhan Panjang.
- DPW APBMI Lampung mengajukan gugatan kepada Cabang Pelabuhan Panjang melalui Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang diregister dengan nomor perkara 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk., dengan pokok gugatan agar dilakukan pembatalan atas Kesepakatan Bersama antara APBMI Lampung dengan Cabang Pelabuhan Panjang tanggal 13 Juli 2012, dan menghapus tunggakan para penggugat kepada Cabang Pelabuhan Panjang sebesar Rp2,20 miliar.

46. LAWSUIT (continued)

- f) *Claims of PT Resources Alam Indonesia for cancelation of right of land management certificate (HPL) No. 91 under the Company's name in Palembang (continued)*
- *Palembang District Court through its Decision Letter No. 182/Pdt.G/2016/PN.Plg, has stated that HPL Certificate No. 91/Sungai Selincah was not legally binding, stated legitimate and contained valuable land sequestration of HPL No. 91/Sungai Selincah, fine against the Company with total amount of Rp25 million a year starting from the Issuance of HPL No. 91/Sungai Selincah dated January 3 2012 until legally binding. With regard to that decision Decision, the Company has appealed to Palembang High Court.*
 - *Palembang High Court through its Decision Letter No. 105/Pdt/2017/PT.Plg, has strengthened the Verdict of Palembang District Court No. 182/Pdt.G/2016/PN.Plg. On February 14, 2018 the Company has filed cassation.*
- g) *Lawsuit issue of Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Dewan Pengurus Wilayah Lampung (DPW APBMI Lampung) which claimed agreement cancelation with Port Panjang Branch*
- *DPW APBMI Lampung filed lawsuit to Port Panjang Branch through Tanjung Karang District Court registered with case number 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk., with principal lawsuit to order cancelation of agreement between APBMI Lampung and Port Panjang Branch dated July 13, 2012 and to write-off the plaintiff's debt to Port Panjang Branch amounting to Rp2.20 billion.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- g) Permasalahan gugatan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Dewan Pengurus Wilayah Lampung (DPW APBMI Lampung) yang menuntut pembatalan perjanjian kerjasama dengan Cabang Pelabuhan Panjang. (lanjutan)
- Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan No. 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk. tanggal 3 Desember 2015 dalam Amar Putusannya menyatakan menolak gugatan para penggugat seluruhnya.
 - DPW APBMI menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang diregister dengan perkara nomor 15/Pdt./2016/PT.Tjk.
 - Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam putusan perkara nomor 15/Pdt./2016/PT.TJK. tanggal 30 Mei 2016 dalam Amar Putusannya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Tanggal 7 Desember 2015 Nomor: 52/Pdt.G/2015/Pn.Tjk. yang dimintakan banding tersebut.
 - APBMI Lampung menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang diregister dengan perkara nomor 2975K/Pdt/2016.
 - Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No.2975 K/Pdt/2016 tanggal 10 Januari 2017 telah menyatakan menolak permohonan kasasi APBMI Lampung.
- h) Permasalahan gugatan PT Resource Alam Indonesia Tbk untuk meminta pembatalan sertifikat hak pengelolaan tanah No.88 atas nama Perusahaan yang berada di Palembang.
- PT Resource Alam Indonesia Tbk mengajukan gugatan kepada Perusahaan selaku Tergugat I dan Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Tergugat II yang di register dengan nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Plg., dengan pokok gugatan pembatalan Sertipikat HPL No.88/Sungai Selincah seluas 366.600 m2, ganti rugi Rp5.280.500, kerugian imateriil Rp500.000, sita jaminan atas tanah HPL No.88/Sungai Selincah. Sampai tanggal penyelesaian laporan konsolidasian ini, perkara masih dalam proses di Pengadilan Negeri Palembang.

46. LAWSUIT (continued)

- g) *Problems of lawsuit from Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Dewan Pengurus Wilayah Lampung (DPW APBMI Lampung) which claimed agreement cancelation with Port Panjang Branch. (continued)*
- *Tanjung Karang District Court in their decision No. 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk. dated December 3, 2015 rejected all of the plaintiff claims.*
 - *DPW APBMI takes legal action appeal to the Supreme Court Tanjung Karang and registered with case number 15/Pdt./2016/PT.Tjk.*
 - *Tanjung Karang High Court in decision case number 15/Pdt./2016/PT.TJK. dated May 30, 2016 to strengthened the decision of Tanjung Karang Disctrict Court dated December 7, 2015 Number: 52/Pdt.G/2015/PN.Tjk which have been appealed to.*
 - *APBMI Lampung takes legal action of cassation to Supreme Court which is registered with case number 2975K/Pdt/2016.*
 - *The Supreme Court through its Cassation Verdict No. 2975 K/Pdt/2016 on January 10, 2017 to rejected the appeal of APBMI Lampung*
- h) *Claims of PT Resources Alam Indonesia for cancellation of right of land management certificate (HPL) No.88 under the Company's name in Palembang.*
- *PT. Resource Alam Indonesia Tbk submitted a lawsuit to the Company as Defendant I and Kantor Pertanahan Kota Palembang as Defendant II registered to No 151/Pdt.G/2017/PN.Plg, with pincipal cancelation lawsuit of HPL Certificate No. 88/Sungai Selincah with area of 366.600 m2, compensation of Rp5.280.500, immaterial losses Rp500,000, land sequestration of HPL No. 88/Sungai Selincah. Until the completion date of this consolidated financial statements, this case is stil in the cassation process at the Palembang District Court.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- i) Permasalahan gugatan dari PT Artha Sempana meminta pembatalan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.128/HPL/DA/86 tanggal 18 Desember 1986 yang berisi pemberian Hak Pengelolaan kepada Perusahaan atas tanah seluas 592.771 m2 di Pelabuhan Sunda Kelapa.

PT Artha Sempana menggugat Perusahaan dan Badan Pertanahan Nasional serta beberapa perseorangan yang diregister dengan nomor perkara 650/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan pokok gugatan pembatalan Hak Pengelolaan atas tanah seluas 592.771 m2 di Pelabuhan Sunda Kelapa, ganti rugi materil Rp10.000.000, dan ganti rugi immateril Rp10.000.000. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

- j) Gugatan dari Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal menuntut ganti rugi akibat perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Serikat Pekerja PT JICT mengajukan gugatan kepada PT JICT selaku Tergugat, Perusahaan selaku Turut Tergugat I, dan Hutchison Ports Ltd selaku Turut Tergugat II yang diregister dengan nomor perkara 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., dengan pokok gugatan menuntut pembatalan perpanjangan kerja sama pengelolaan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok antara Perusahaan dengan PT JICT, pengembalian rental fee oleh Perusahaan kepada PT JICT sebesar USD147.595.109 atau setara dengan Rp1.976.869.823, sita jaminan atas rekening bank milik Perusahaan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

46. LAWSUIT (continued)

- i) Lawsuit Issue of PT Artha Sempana requested for cancellation of Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 128/HPL/DA/86 dated December 18, 1986 containing the granting of the right of land management to the Company with area of 592.771 m2 in Port of Sunda Kelapa.

PT Artha Sempana sued the Company and Badan Pertanahan Nasional also individuals which are registered in Case Number 650/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., in Jakarta Utara District Court, with the principal lawsuit of cancelation of HPL with area of 592.771 m2 in Pelabuhan Sunda Kelapa, the material compensation of Rp10.000.000, and immaterial compensation of Rp10.000.000. Until the completion date of this consolidated financial statements, this case is still in process in Jakarta Utara District Court.

- j) Lawsuit filed by Labor Union of PT Jakarta International Container Terminal claiming compensation due to the extension of cooperation agreement on Terminal Petikemas in Pelabuhan Tanjung Priok.

The Labor Union of PT JICT has filed an lawsuit to PT JICT as co-defendant I, and Hutchison Ports Ltd as co-defendant II as registered by Case Number 312/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., with principal issue to order cancelation of extension cooperation on Terminal Peti Kemas in Pelabuhan Tanjung Priok between the company and PT JICT, repayment of rental fee of the Company to PT JICT amounting to USD147,595,109 or equal to Rp1,976,869,823, sequestration of Company's bank account. Until the completion date of this consolidated financial statements, this case is still on process in Jakarta Utara District Court.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. PERKARA HUKUM (lanjutan)

- k) Permasalahan Gugatan dari Wiryanto Khong (PT Carvil Abadi) dkk untuk mengesahkan penguasaannya atas tanah milik Perusahaan di Pelabuhan Sunda Kelapa.

Wiryanto Khong (PT Carvil Abadi) mengajukan gugatan kepada Ade Harris Christian selaku Tergugat I, PT Putra Madya Jayagiri selaku Tergugat II, PT Putra Jaya Giri selaku Tergugat III, Perusahaan selaku Tergugat IV, Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa selaku Tergugat V, dan Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara selaku Turut Tergugat, yang diregister dengan nomor perkara 294/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., dengan pokok gugatan perpanjangan 12 bidang tanah Hak Guna Bangunan seluas keseluruhan 28.455 m² diatas Hak Pengelolaan Perusahaan di Pelabuhan Sunda Kelapa, sita jaminan atas tanah dan bangunan di Pelabuhan Sunda Kelapa, ganti rugi materiil Rp441.309.220, ganti rugi immateriil Rp100.000.000, uang paksa Rp50.000 per hari sejak putusan dibacakan sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perkara masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

46. LAWSUIT (continued)

- k) *Lawsuit issue filed by Wiryanto Khong (PT Carvil Abadi) et al to validate land tenure of the Company in Pelabuhan Sunda Kelapa.*

Wiryanto Khong (PT Carvil Abadi) filed an appeal to Ade Harris Christian as Defendant I, PT Putra Madya Jayagiri as Defendant II, PT Putra Jaya Giri as Defendant II, the Company as Defendant IV, Sunda Kelapa Branch as Defendant V and Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara as co-defendant, which is registerd by Case Number 294/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., with principal lawsuit of the extention of 12 lands with Building Rights Title with total area of 28.455 m² over the HPL of the company in Pelabuhan Sunda Kelapa, material compensation of Rp441.309.220, immaterial compensation of Rp100,000,000, penalty of Rp50.000 a day starting from the verdict is announced until legally binding. Until the completion date of this consolidated financial statements, this case is still on process in Jakarta Utara District Court.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. INFORMASI SEGMENT

Informasi yang menyangkut segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

47. SEGMENT INFORMATION

Information concerning the Group's business segments is as follows:

31 Desember/December 31, 2017

	Operasi Kepelabuhanan/ Port Operation	Jasa Lainnya/ Other Services	Total Sebelum Eliminasi/Total Before Elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues
Pendapatan operasi eksternal	9.985.124.225	928.843.175	10.913.967.400	-	10.913.967.400	External operating revenues
Pendapatan operasi antar segmen	2.325.008.733	7.828.745	2.332.837.478	(2.332.837.478)	-	Inter-segment operating revenues
Total pendapatan operasi segmen	12.310.132.958	936.671.920	13.246.804.878	-	10.913.967.400	Total segment operating revenues
Beban operasi	(9.097.354.360)	(821.093.003)	(9.918.447.363)	2.262.140.498	(7.656.306.865)	Operating expenses
Pendapatan operasi lainnya - neto	20.149.963	22.002.858	42.152.821	(30.742.800)	11.410.021	Other operating income - net
Laba usaha					3.269.070.556	Operating income
Pendapatan keuangan	524.527.539	10.261.789	534.789.328	-	534.789.328	Finance income
Beban keuangan	(1.056.866.135)	(7.270.425)	(1.064.136.560)	-	(1.064.136.560)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	1.124.411.746	-	1.124.411.746	(1.045.329.894)	79.081.852	Equity in income of associates and joint control entity - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					2.818.805.176	Income before final tax and corporate income tax
Beban pajak final	(344.062.569)	(1.160.375)	(345.222.944)	-	(345.222.944)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan badan					2.473.582.232	Income before corporate income tax
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax
Kini	(271.549.007)	(20.282.881)	(291.831.888)	-	(291.831.888)	Current
Tangguhan	17.350.841	6.625.834	23.976.675	-	23.976.675	Deferred
Laba tahun berjalan					2.205.727.019	Income for the year
Posisi keuangan						Financial position
Aset segmen	51.990.594.793	1.170.033.548	53.160.628.295	(5.940.539.982)	47.220.088.359	Segment assets
Liabilitas segmen	35.651.377.334	692.726.133	36.344.103.467	(3.071.932.906)	33.272.170.561	Segment liabilities
Penyusutan dan amortisasi segmen	(712.645.982)	(57.141.873)	(769.787.855)	-	(769.787.855)	Segment depreciation and amortization

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

47. SEGMENT INFORMATION (continued)

Informasi yang menyangkut segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Information concerning the Group's business segments is as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2016

	Operasi Kepelabuhanan/ Port Operation	Jasa Lainnya/ Other Services	Total Sebelum Eliminasi/Total Before Elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues
Pendapatan operasi eksternal	8.124.905.042	801.159.728	8.926.064.770	-	8.926.064.770	External operating revenues
Pendapatan operasi antar segmen	2.263.256.958	3.912.821	2.267.169.779	(2.267.169.779)	-	Inter-segment operating revenues
Total pendapatan operasi segmen	10.388.162.000	805.072.549	11.193.234.549	(2.267.169.779)	8.926.064.770	Total segment operating revenues
Beban operasi	(7.945.676.708)	(732.815.374)	(8.678.492.082)	2.267.030.097	(6.411.461.985)	Operating expenses
Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto	203.311.698	48.890.255	252.201.953	(43.542.168)	208.659.785	Other operating income (expenses) - net
Laba usaha					2.723.262.570	Operating income
Pendapatan keuangan	278.055.502	9.570.280	287.625.782	-	287.625.782	Finance income
Beban keuangan	(1.049.383.067)	(12.664.414)	(1.062.047.481)	18.661.840	(1.043.385.641)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	753.124.916	-	753.124.916	(680.330.540)	72.794.376	Equity in income of associates and joint control entity - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					2.040.297.087	Income before final tax and corporate income tax
Beban pajak final	(250.068.301)	(3.110.247)	(253.178.548)	-	(253.178.548)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan badan					1.787.118.539	Income before corporate income tax
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax
Kini	(220.941.740)	(17.023.924)	(237.965.664)	-	(237.965.664)	Current
Tangguhan	(16.539.990)	4.601.886	(11.938.104)	-	(11.938.104)	Deferred
Laba tahun berjalan					1.537.214.771	Income for the year
Posisi keuangan						Financial position
Aset segmen	46.637.410.171	1.019.536.066	47.656.946.237	(4.183.759.896)	43.473.186.341	Segment assets
Liabilitas segmen	33.155.648.660	835.917.437	33.991.566.097	(2.429.975.697)	31.561.590.400	Segment liabilities
Penyusutan dan amortisasi segmen	592.996.915	44.007.061	637.003.976	-	637.003.976	Segment depreciation and amortization

Informasi yang menyangkut segmen geografis Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

Information concerning the Group's geographical segment is as follows:

Tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember/Year Ended December 31,

	2017	2016	
Pendapatan Operasi			Operating Revenues
Tanjung Priok	8.638.936.129	6.931.268.146	Tanjung Priok
Panjang	332.818.724	375.052.297	Panjang
Palembang	377.221.304	370.447.171	Palembang
Pontianak	231.597.999	246.317.401	Pontianak
Teluk Bayur	215.315.163	234.289.425	Teluk Bayur
Lain-lain	1.118.078.081	768.690.330	Others
Total	10.913.967.400	8.926.064.770	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA II
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

47. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen geografis Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

47. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Group's geographical segment is as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,		
	2017	2016	
Aset tidak lancar			Non current asset
Tanjung Priok	19.214.046.989	18.461.387.970	Tanjung Priok
Panjang	727.313.860	727.915.068	Panjang
Palembang	392.401.736	427.107.405	Palembang
Pontianak	454.749.397	494.575.771	Pontianak
Teluk Bayur	585.704.663	591.745.840	Teluk Bayur
Banten	830.600.980	806.874.463	Banten
Lain-lain	1.233.631.586	1.181.650.723	Others
Total	23.438.449.211	22.691.257.240	Total

48. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. SK-26/MBU/01/2018 tanggal 5 Februari 2018 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima melalui surat No. AHU-AH.01.03-0068895 tanggal 15 Februari 2018, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan mengangkat R. Agus H. Purnomo sebagai Dewan Komisaris Perusahaan.

48. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

Based on Copy of Decision of the Minister of State Owned Enterprise in lieu of the General Meeting of the Company's Shareholders No. SK-26/MBU/01/2018 dated February 5, 2018, which was reported to the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia and acknowledge in its letter No.AHU-AH.01.03-0068895 dated February 15, 2018, the Minister of State Owned Enterprise in lieu of of the General Shareholders Meeting decided to appoint R. Agus H. Purnomo as Board of Commissioner Members of the Company.